



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

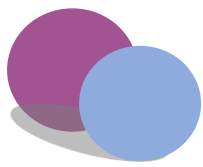
ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023



LAPORAN AKHIR

TAHUN ANGGARAN

2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME sehingga tersusunlah laporan akhir ini, yang merupakan tahap terakhir dari serangkaian kegiatan Analisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Laporan Akhir ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, Analisis kondisi kemiskinan dan kesimpulan dan saran.

Kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait agar menghasilkan output sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Kami berharap kompilasi data serta kajian didalamnya dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

Malang, Mei 2023

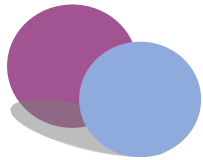
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-2
1.3 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	I-3
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	I-4
1.5 Referensi Hukum	I-5
1.6 Keluaran	I-6
BAB II TINJAUAN TEORI	II-1
2.1 Tinjauan Umum Kemiskinan	II-1
2.2 Pengukuran Kemiskinan	II-3
2.2.1 Determinan Kemiskinan	II-3
2.2.2 Pengukuran Penduduk Miskin	II-4
2.2.3 Pengukuran Garis Kemiskinan	II-5
2.2.4 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	II-7
2.3 Kemiskinan Ekstrem.....	II-7
2.4 Kemiskinan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-8
2.5 Kebijakan Kemiskinan Indonesia	II-10
2.5.1 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	II-10
2.5.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial	II-11
2.5.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	II-13
2.6 Spesifikasi Bangunan Rumah Layak Huni (RLH).....	II-14
2.7 Spesifikasi Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	II-15
2.8 Stunting	II-16
BAB III METODE PENELITIAN.....	III-1
3.1 Tahapan Kegiatan.....	III-1

3.2	Metode Pengumpulan Data	III-1
3.3	Metode Pengolahan Data	III-2
3.3.1	Identifikasi Permasalahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.....	III-3
3.3.2	Identifikasi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan.....	III-8
3.3.3	Analisis dan Review Capaian Program Pengentasan Kemiskinan	III-9
3.3.4	Analisis Pemetaan Aktor	III-9
3.3.5	Perumusan Rekomendasi Prioritas Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan	III-11
BAB IV GAMBARAN UMUM		IV-1
4.1	Gambaran Umum Kab Mojokerto	IV-1
4.1.1	Karakteristik Fisik Dasar	IV-1
4.1.2	Karakteristik Kependudukan	IV-4
4.1.3	Karakteristik Fisik Binaan	IV-10
4.2	Kondisi Kemiskinan Kab Mojokerto	IV-12
4.2.1	Kualitas Sumber Daya Manusia.....	IV-12
4.2.2	Kondisi Kemiskinan Konsumsi.....	IV-16
4.2.3	Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi	IV-19
4.2.4	Analisis Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023..	IV-30
4.3	Identifikasi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto	IV-53
4.4	Analisis Capaian Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto	IV-62
4.5	Rekomendasi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto	IV-83
4.6	Analisis Pemetaan Aktor Dalam Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto	IV-
Error! Bookmark not defined.		
BAB V RENCANA KERJA.....		V-1
5.1	Kesimpulan	V-1
5.2	Saran	V-3



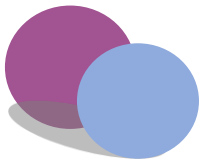
DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan	IV-1
Tabel 4. 2 Jumlah Kelurahan, RW, dan RT Kabupaten Mojokerto	IV-2
Tabel 4. 3 Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto	IV-3
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	IV-5
Tabel 4. 5 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2022	IV-6
Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto	IV-6
Tabel 4. 7 Kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	IV-7
Tabel 4. 8 HLS dan RLS penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022	IV-8
Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Kabupaten Mojokerto, 2022	IV-9
Tabel 4. 10 Status Pekerjaan Utama Kabupaten Mojokerto, 2022	IV-9
Tabel 4. 11 Penggunaan Lahan Kabupaten Mojokerto.....	IV-10
Tabel 4. 12 Persebaran Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Kabupaten Mojokerto	IV-10
Tabel 4. 13 Persebaran Sarana Kesehatan Kabupaten Mojokerto	IV-11
Tabel 4. 14 Persebaran sarana peribadatan Kabupaten Mojokerto.....	IV-12
Tabel 4. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Menurut Komponen.....	IV-14
Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-17
Tabel 4. 17 Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Bekerja dan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Mojokerto	IV-20
Tabel 4. 18 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-20
Tabel 4. 19 Karakteristik Pendidikan Kabupaten Mojokerto	IV-22
Tabel 4. 20 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-22
Tabel 4. 21 Risiko Stunting Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto.....	IV-24
Tabel 4. 22 Persebaran Sarana Kesehatan Kabupaten Mojokerto.....	IV-25
Tabel 4. 23 Kondisi Rumah Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-25
Tabel 4. 24 Ketersediaan Akses Terhadap Sanitasi Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto.....	IV-27
Tabel 4. 25 Persentase Capaian Fasilitas Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022	IV-28
Tabel 4. 26 Penanganan Penyandang Masalah Sosial Kabupaten Mojokerto.....	IV-29
Tabel 4. 27 Proses Perumusan Kode Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.	IV-33
Tabel 4. 28 Daftar Permasalahan Kemiskinan Kab Mojokerto.	IV-37
Tabel 4. 29 Tabel Daftar Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto	IV-53
Tabel 4. 30 Tabel Capaian Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto.....	IV-63
Tabel 4. 31 Persentase Sasaran/Penyebab Kemiskinan.....	IV-82
Tabel 4. 32 Rekomendasi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	IV-87
Tabel 4. 33 Daftar Identifikasi Aktor	IV-93
Tabel 5. 1 Kebutuhan Tenaga Ahli, Penunjang dan Kualifikasi.....	V-2
Tabel 5. 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	V-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2018—2022	I-2
Gambar 1. 2 Sebaran Jumlah Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40%	I-4
Gambar 2. 1 Skema Poverty-environment Traps	II-3
Gambar 3. 1 Contoh Visualisasi Social Network Analysis: Social Degree Centrality (kiri) dan Betweenness Centrality (kanan)	III-7
Gambar 3. 2 Alur Penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto	III-8
Gambar 4. 1 Persentase Penduduk Kabupaten Mojokerto Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan , 2022	IV-8
Gambar 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto, 2018-2022	IV-14
Gambar 4. 3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mojokerto, 2018-2022.....	IV-15
Gambar 4. 4 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto, 2018-2021	IV-16
Gambar 4. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022.....	IV-17
Gambar 4. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022	IV-18
Gambar 4. 7 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022	IV-19
Gambar 4. 8 Persentase Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-21
Gambar 4. 9 Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-23
Gambar 4. 10 Persentase Risiko Stunting Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto.....	IV-24
Gambar 4. 11 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di (a) Desa Beratkulon, Kec Kemlagi (b) Desa Kedungsari, Kec. Kemlagi dan (c) Desa Watusumpak, Kec. Trowulan Tahun 2023.....	IV-26
Gambar 4. 12 Persentase Kondisi Rumah Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto	IV-27
Gambar 4. 13 Persentase Akses Terhadap Sanitasi Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto.....	IV-28
Gambar 4. 14 Kondisi Sumber Air Sumur dan Ledeng di Desa Kedungsari, Kec Kemlagi	IV-29
Gambar 4. 15 Poverty Traps Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	IV-52
Gambar 4. 16 Persentase Penyebab Kemiskinan	IV-82
Gambar 4. 17 Proses Sintesa Strategi Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	IV-83
Gambar 4. 18 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 1)	IV-84
Gambar 4. 19 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 2)	IV-84
Gambar 4. 20 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 3)	IV-85
Gambar 4. 21 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 4)	IV-85
Gambar 4. 22 Pemetaan Koordinasi Stakeholder Terkait Penanganan Kemiskinan Kab Mojokerto	V-95
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	V-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan tetap menjadi masalah utama global dan menjadi prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TAPB/SDG) yang melanjutkan tujuan utama Tujuan Pembangunan Milenium. Kemiskinan tetap menjadi salah satu topik utama, tulang punggung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TAPB/SDG), yaitu “Mengakhiri kemiskinan di mana pun dan dalam segala bentuknya”.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan tetapi mencakup beberapa hal seperti: (i) kerentanan individu atau komunitas dan kerentanan terhadap pemiskinan; (ii) tentang ada/tidak terpenuhinya hak dasar warga negara dan ada/tidaknya perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan yang bermartabat (RPJPN 2005-2025).

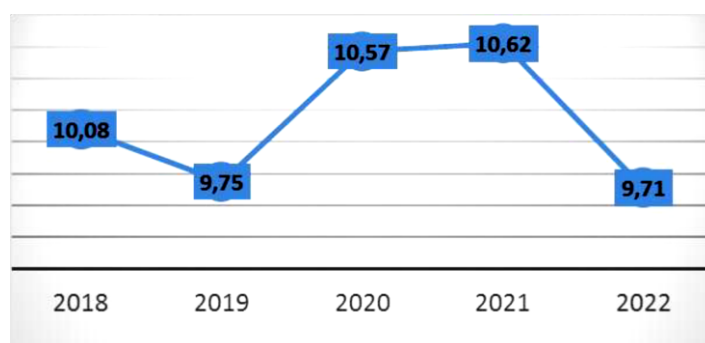
Pada Juli 2021, World Bank mengategorikan Indonesia kembali dalam *negara lower-middle income* setelah sebelumnya termasuk dalam kategori *upper-middle income*. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia sejak Maret 2020. Pembangunan pada tahun 2020 - 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Dampak ini masih mungkin terus berlanjut hingga tahun 2022, sebagian dari penduduk Indonesia juga jatuh pada kategori miskin ekstrem.

Menurut Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, di mana pada Maret 2021 jumlahnya 27,54 juta jiwa (10,14%), sedangkan pada Maret 2022 jumlahnya turun menjadi 26,16 juta jiwa (9,54%).



Jawa Timur merupakan provinsi dengan urutan ke-15 yang memiliki penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 4.181.290 jiwa atau 10,48% dari total jumlah penduduknya. Selain itu, Jawa Timur terpilih sebagai salah satu dari tujuh provinsi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan data dari Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, yaitu persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto cenderung turun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah daerah. Pada periode 2018—2019, persentase penduduk miskin cenderung turun dan naik kembali pada tahun 2020-2021. Penduduk miskin Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sedikit menurun dari 10,62 persen menjadi 9,71 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan persentase penduduk miskin ini adalah berakhirnya pandemic covid-19 sehingga tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2018—2022

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Meskipun jumlah penduduk miskin akan berkurang pada tahun 2022, program penanggulangan kemiskinan harus terus dilanjutkan dan dicermati secara menyeluruh untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0% sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030) dan amanat Presiden dalam Pedoman Presiden. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan harus dilakukan untuk menentukan kebijakan dan program mana yang paling tepat dan tepat untuk Kabupaten Mojokerto.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang terkait kajian kemiskinan di Kabupaten Mojokerto maka tujuan kajian tersebut adalah sebagai berikut:

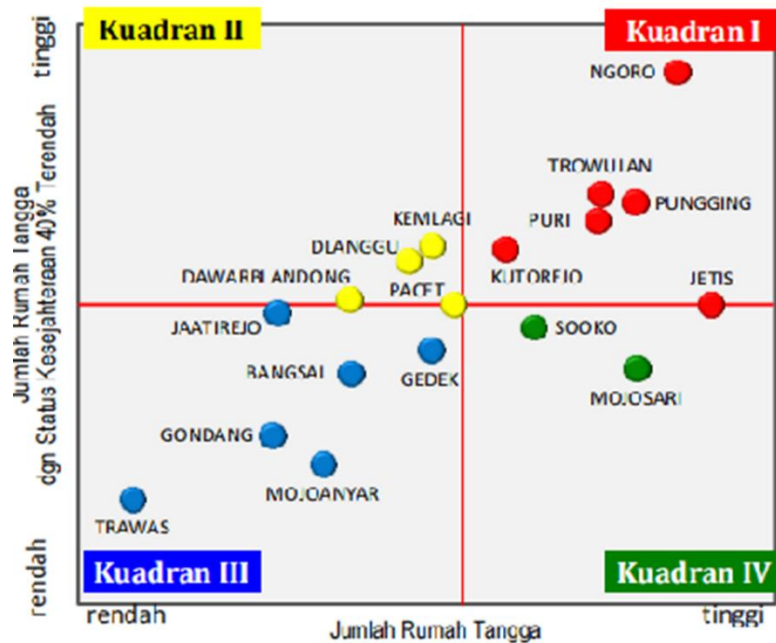


- 1) Mendapatkan informasi terbaru terkait penurunan kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
- 2) Melakukan review temuan dari kajian sebelumnya tahun 2022 terkait penyebab program pengentasan kemiskinan tidak terserap secara maksimal.
- 3) Melakukan review pada kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang sedang dan/atau sudah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan indikator penurunan kemiskinan.
- 4) Memberi rekomendasi prioritas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan urgensi dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.
- 5) Memetakan aktor yang memiliki peran kuat dalam implementasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

1.3 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Lokasi dari kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto adalah pada seluruh wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto, dengan pengamatan terfokus pada Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Trowulan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2022, pemilihan wilayah studi dilakukan berdasarkan data Sebaran Rumah Tangga Miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Wilayah studi terpilih adalah Kecamatan Jatirejo yang masuk kedalam Kuadran III dalam kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Mojokerto. Indikator kesejahteraan Kabupaten Mojokerto berupa pendidikan, kesehatan dan gizi, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan, dan indikator sosial. Posisi Kecamatan Jatirejo dapat dilihat dalam kuadran berikut.



Gambar 1. 2 Sebaran Jumlah Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40%

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Maka perlu ditambahkan wilayah penelitian lain pada kegiatan studi ini untuk dibandingkan dengan Jatirejo. Daerah yang dipilih adalah Kecamatan Trowulan yang stasiunnya berada di Kuadran I, dengan kondisi yang berbeda dengan Kecamatan Jatirejo yang berada di Kuadran III.

Oleh karena itu, dalam menyusun dokumen Analisis Status Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, wilayah perencanaan difokuskan pada Kecamatan Jatirejo dan Trowulan.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

- Melakukan pengumpulan data sekunder kemiskinan, termasuk kondisi kependudukan, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan data terkait kemiskinan lainnya.
- Melakukan review terhadap kajian kemiskinan yang pernah dilakukan di Kabupaten Mojokerto.
- Melakukan pengumpulan data dan capaian dari kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang sedang dan/atau sudah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto.



- d. Menyusun prioritas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan temuan data dan hasil kajian.
- e. Menganalisis peran aktor pada kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

1.5 Referensi Hukum

Referensi hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto yaitu.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota



- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- 16) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022;
- 17) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 18) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Nomor 188/02/416-201/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- 19) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Nomor 188/03/416-201/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

1.6 Keluaran

Laporan Pendahuluan berisikan penjabaran KAK ke dalam item - item jenis dan urutan kegiatan yang menampilkan rencana kegiatan, struktur organisasi dan tata kerja personil yang bertanggung jawab, gambaran umum wilayah perencanaan, serta pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut:

- Judul Buku : LAPORAN PENDAHULUAN
- Jumlah Buku : 2 (dua) buku
- Ukuran Buku : A4 (29,7 x 21,5 cm²)



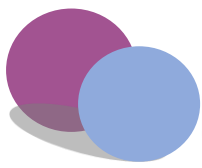
- Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS putih polos
- Cetak : berwarna
- Kulit/ Sampul : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

Laporan Akhir, merupakan laporan tahap akhir setelah dilakukan penyempurnaan berdasar hasil diskusi. Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap akhir setelah dilakukan penyempurnaan berdasar hasil diskusi. Laporan akhir ini merupakan laporan secara utuh dari dari proses analisis kondisi kemiskinan dan rekomendasi strategi pengentasan kemiskinan.

Adapun spesifikasi buku Laporan Akhir adalah sebagai berikut:

- Judul Buku : LAPORAN AKHIR
- Jumlah Buku: 4 (empat) buku
- Ukuran Buku : A4 (29,7 x 21,5 cm²)
- Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS putih polos
- Cetak : berwarna
- Kulit/ Sampul : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

Backup Data, Back up semua laporan dalam Flashdisk berisi seluruh file laporan baik materi tulisan maupun gambar sebagaimana hardcopy yang diserahkan bersama Laporan Akhir.



BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana uang dan barang tidak tersedia untuk menjamin kelangsungan hidup. Secara lebih luas, kemiskinan adalah fenomena multifaset atau multidimensi.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dalam bahasa Indonesia sebagai keadaan atau keadaan kurang kaya, yang dihitung dalam rupiah per kapita per bulan. Di sisi lain, kebutuhan fisik minimum (BFM) sebagai acuan untuk definisi kemiskinan diterjemahkan menjadi keadaan di mana kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, perumahan) tidak tersedia selama sebulan, berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan mineral lain yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Kebutuhan konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari (kelompok makanan) ditambah kebutuhan minimum lainnya (non makanan) meliputi perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan (BPS, 2008).

Naisikun (2002) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:



- a. Kemiskinan Absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan Relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan Kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan Struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selo Soemardjan berpendapat bahwa kemiskinan struktural tidak terjadi di antara orang miskin karena mereka malas atau tidak memiliki penghasilan, tetapi karena struktur sosial masyarakat yang ada membatasi hak mereka untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia bagi mereka (Soemardjan, 1980).

Kemudian, menurut Taufiwi (2022 dalam Karakteristik Kemiskinan Ekstrim di 35 Kabupaten), masalah kemiskinan dari sudut pandang kultural (budaya) tidak hanya terkait dengan kelangkaan sumber daya ekonomi, tetapi juga distribusi alat-alat produksi yang tidak adil. , hingga distribusi alat-alat produksi yang tidak adil, hingga kelangkaan sumber daya ekonomi. atau pemerintahan. ketersediaan modal keuangan untuk kelompok tertentu. Selain kendala struktural, masalah kemiskinan juga mempengaruhi sikap mental, pola perilaku dan keputusan sikap, yang diakibatkan oleh keadaan pikiran (mental state and mental attitude) yang tidak dapat berjalan seiring dengan semangat perubahan, kemajuan dan pembangunan. . Perbaikan kondisi dan kualitas hidup. Penelitian perkembangan antropologis memunculkan pepatah: "Kemiskinan adalah keadaan kemauan daripada kelangkaan" (kemiskinan adalah kemauan daripada kelangkaan sumber daya).

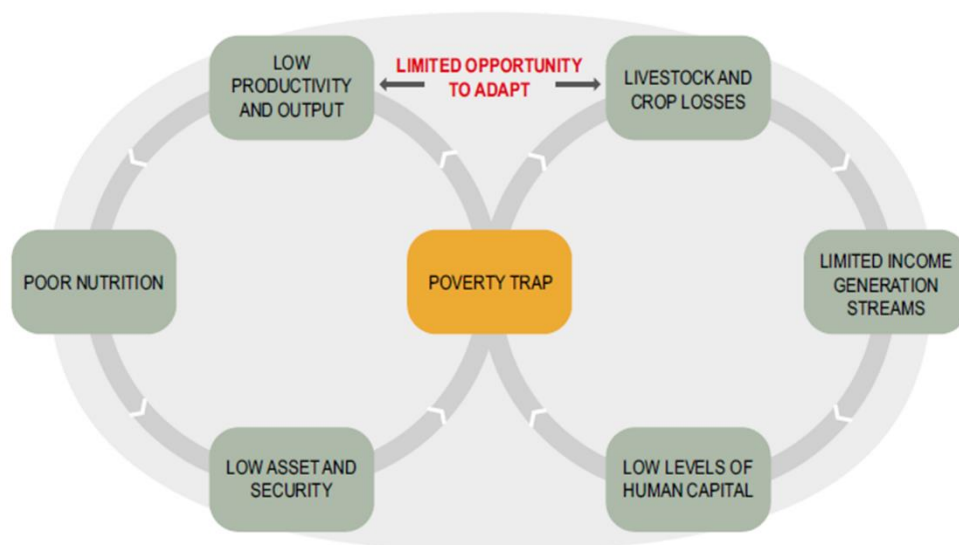


2.2 Pengukuran Kemiskinan

2.2.1 Determinan Kemiskinan

Determinan kemiskinan didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menentukan kemiskinan dalam analisis kemiskinan. Faktor-faktor penentu kemiskinan akan berbeda di setiap daerah sehingga determinan kemiskinan perlu diperhitungkan dalam penyusunan program anti kemiskinan.

Determinan kemiskinan umumnya merupakan pembentuk sebuah siklus jebakan kemiskinan atau *Poverty Traps*. *Poverty traps* diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu sistem sosial-ekologi membentuk suatu mekanisme yang menyebabkan individu atau komunitas terus menerus berada di dalam kemiskinan. (Haider, 2018). Bentuk *Poverty Traps* berbeda-beda dan terpengaruh dari karakteristik daerah masing-masing. Misalnya untuk daerah perdesaan, beberapa penyebab utama kemiskinan yang terus-menerus dapat berupa tingkat kepemilikan aset yang rendah, kendala keuangan dan struktural, kualitas tanah yang rendah dan kekurangan air atau nutrisi telah diidentifikasi sebagai di daerah pertanian pedesaan, karena berkontribusi pada hasil panen yang rendah, yang selanjutnya menyebabkan kesehatan yang buruk dan/atau berpenghasilan rendah. Kesehatan yang buruk dan penyebaran penyakit adalah penyebab umum kemiskinan pedesaan lainnya (Sonja Radosavljevic, 2021). Berikut adalah skema poverty traps terkait lingkungan terkait yang juga dirumuskan oleh IPCC.



Gambar 2. 1 Skema Poverty-environment Traps

Sumber: IPCC Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 8: Poverty, Livelihoods and Sustainable Development. 2022. (Emily Boyd, 2022)



Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isnaini & Nugroho (2020) lewat analisis OLS (*Ordinary Least Square*) didapatkan bahwa variabel PDRB, APBD dan angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel PDRB dan APBD memiliki pengaruh negatif dan signifikan yang berarti kedua variabel dapat digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sementara variabel angkatan kerja memiliki pengaruh positif yang mana angkatan kerja dapat meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu Zamhari et al. (2015) dengan analisis GSCA (*Generalized Structured Component Analysis*) menemukan bahwa jumlah anggota pada keluarga, akses terhadap fasilitas telekomunikasi, dan status wilayah rumah tangga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Selama pandemi covid-19, terdapat penelitian yang membandingkan determinan yang mempengaruhi presentase penduduk miskin sebelum dan setelah pandemi berlangsung. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Putranto (2022) dengan *Multiple Classification Analysis* (MCA) yang menemukan bahwa variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan angka morbiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan saat covid berlangsung.

2.2.2 Pengukuran Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan standar yang terdapat pada konsep *basic needs approach*, kemiskinan dapat diukur berdasarkan kemampuan seseorang memenuhi asupan kebutuhan pangan minimalnya yaitu sebesar 2100 kilokalori/kapita/hari. Standar ini selanjutnya akan menjadi penyetaraan untuk pengukuran garis kemiskinan makanan yang dilakukan dengan perhitungan harga komoditas makanan untuk memenuhi asupan minimal kalori tersebut. Pengeluaran ini akan ditambah lagi dengan pengeluaran non-makanan esensial yang dihitung dengan rasio pengeluaran tiap jenis komoditi terhadap pengeluaran total (Taufik, 2022).



2.2.3 Pengukuran Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berikut merupakan Rumus perhitungan dalam menentukan garis kemiskinan berdasarkan BPS.

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Nilai GKM dapat dihitung dengan 2 tahapan yaitu penentuan kelompok referensi yaitu 20% dari penduduk yang berada di atas GKS (Garis Kemiskinan Sementara). GKS dapat dihitung dengan Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). Garis Kemiskinan Makanan yang merupakan total dari nilai pengeluaran 52 komoditi dasar pangan yang di konsumsi akan disertakan dengan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nilai pengeluaran disetarakan dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi rata-rata kalori yang dibutuhkan dari 52 komoditi. Berikut merupakan rumus untuk menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM).

$$GKM_{jp}^* = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp}^* = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.



P_{jkp} = Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan Provinsi p .

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j dan Provinsi p .

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j dan Provinsi p .

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke- p .

GKM $_j$ tersebut kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 pada harga implisit rata-rata kalori pada daerah j , sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j dan Provinsi p .

$\overline{HK}_{jp}$ = Harga rata-rata kalori di daerah j dan Provinsi p .

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke- p .

Perhitungan nilai GKNM dilakukan dengan menjumlahkan nilai kebutuhan minimum komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi non-makanan dihitung dengan rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio dihitung berdasarkan hasil SPKKD 2004 yang memiliki data lebih rinci mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$GKNM_{jp}^* = \sum_{k=1}^{52} r_{kj} \cdot V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}^*$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j provinsi p .

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi /sub-kelompok non-makanan di daerah j dan Provinsi p .



- r_{jkp} = Rasio pengeluaran komoditi /sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j .
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih
- j =Daerah (perkotaan atau pedesaan).
- p =Provinsi ke- p .

2.2.4 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (GK). Indeks Kesenjangan Kemiskinan-P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pengeluaran rata-rata penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran tentang distribusi pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin.

Berikut merupakan Rumus perhitungan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

- α = 0,1,2
- z = Garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- n =Jumlah penduduk

Dari perhitungan diatas, jika $\alpha=0$ maka akan disebut sebagai Head Count Indeks (Po), jika $\alpha=1$ maka diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1 dan jika $\alpha=2$ maka akan disebut sebagai Indeks Keparahan Kemiskinan-P2.

2.3 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana penduduk yang tidak adapat memenuhi kebutuhan primer sebagai manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi yang layak,



kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi. Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,90 PPP (Purchasing Power Parity). Nilai ini setara dengan USD 2,12 pada tahun 2022. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Status kemiskinan ekstrem dapat ditentukan oleh karakteristik internal seperti jumlah tanggungan hingga kepemilikan tempat. Kepemilikan tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial sehingga menjadikan penduduk miskin lebih rentan secara sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufik. N (2022) ditemukan juga bahwa rumah tangga miskin ekstrem memiliki ciri kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian, KRT berada pada usia produktif dengan lama sekolah dibawah 9 tahun.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di angka 4% yang mana meningkat sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya yang berada di 3,8% (Rapitasari, Dwairta, & Herlambang, 2021). Peningkatan ini mulai terjadi sejak tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 setelah sebelumnya pada tahun 2015-2019 angka kemiskinan ekstrem terus menurun. Peningkatan kemiskinan di tahun 2021 disebabkan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja dan penurunan anggaran untuk bantuan sosial (Rapitasari, Dwairta, & Herlambang, 2021).

2.4 Kemiskinan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) atau Sustainable Development Goals (SDG) adalah pembangunan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang menjaga kelestarian kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin pemerataan. dan untuk memperkenalkan manajemen yang mampu menjamin kualitas hidup dari generasi ke generasi.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar MDGs, yaitu. H.49 dari 67 indikator, namun indikator yang tersisa akan dilanjutkan dalam implementasi SDG/TPB. Indikator yang belum tercapai adalah penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan angka kematian ibu (AKI), pencegahan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan



sanitasi fasilitas di pedesaan dan ada perbedaan besar antara negara-negara federal dalam pencapaian tujuan.

Tidak ada yang tertinggal atau “tidak ada yang tertinggal” adalah prinsip utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip ini sesuai dengan dua hal, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural berarti sejauh mana para pihak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partai-partai itu hanya untuk partai-partai lainnya. Pemerataan substantif berarti sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau akan menjawab permasalahan warga negara, khususnya kelompok yang kurang beruntung.

“Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun” adalah tujuan pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 (TPB/SDGs). Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar bagi seluruh penduduk, terutama kelompok miskin dan rentan, serta membangun ketahanan terhadap dampak bencana alam dan non-alam yang mempengaruhi sumber daya dan penghidupan yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada orang-orang.

Target dari Tujuan pertama ini antara lain:

- 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.



1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

1.5.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

1.5.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

2.5 Kebijakan Kemiskinan Indonesia

Tiap era kepemimpinan di Indonesia memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa Orde Baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-Makruf juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam lima Prioritas Kerja Presiden 2019 -2024, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

2.5.1 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kebijakan terbaru terkait kemiskinan adalah Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah, sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Kemudian pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan



menjadi 0% pada tahun 2024. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Tiga strategi utama yang diusung:

- a. Menurunkan beban pengeluaran, strategi ini dilakukan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial,
- b. Meningkatkan pendapatan diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi yang merupakan hasil sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem yang disusun oleh lintas kementerian terkait pada tahun 2022.

2.5.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial

Pada tahun 2020, Kementerian Sosial memaparkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk membuka akses dan memberdayakan kelompok terpinggirkan. Mensos menyatakan bahwa subyek kebijakan pemabngunan kesejahteraan sosial antara lain masyarakat miskin, penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, lanjut usia, anak terlantar, dan anak berurusan dengan hukum, dan pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya. Pertama dalam penanganan kemiskinanm dilakukan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang dikelola oleh Kementrian Sosial. Bersamaan dengan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah membuat beberapa program berupa:

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosia serta mendorong perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat miskin.

B. Bansos Beras Sejahtera (Rastra)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BNPT merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan.



C. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

UEP diperuntukkan bagi masyarakat miskin perorangan atau kelompok usaha bersama (KUBE) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif.

D. Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)

BPUM dijalankan dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang merebak di tahun 2020. Berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020), dimana 99% UMKM responden sudah menerima bantuan lebih dari 50% dengan adanya program bantuan pemerintah mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Pada tahun 2023, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan tidak akan lagi memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) karena UMKM dianggap sudah cukup pulih dan dapat survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi

E. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini diberikan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

F. Program Bantuan Sembako

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, terutama pada masa pandemi Covid-19. Sebagai respons dalam menghadapi wabah Covid-19 mulai Maret 2020 indeks manfaat program sembako yang sebelumnya Rp150.000/KPM/bulan berubah menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan. Keluarga



Penerima Manfaat (KPM) yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat langsung memanfaatkan bantuan yang diberikan. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 setiap bulan.

2.5.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu memuat data dan informasi yang memiliki status ekonomi dari 40% rumah tangga termiskin yang dapat digunakan untuk perencanaan, penganggaran, monitoring, dan mengevaluasi program-program perlindungan sosial. Tujuan dari DTKS yaitu agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah. DTKS dapat dianalisis secara sektoral dan spasial ditingkat desa atau kelurahan yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan berbasis data atau bukti di daerah (Kemensos, 2020).

Menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti fakir miskin dan anak terlantar
2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti keluarga penerima program keluarga harapan (KPM PKH), keluarga penerima program (KPM Sembako)
3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Maka dari itu pemerintah mengambil 40% dari populasi rumah tangga yang berada di seluruh Indonesia berdasarkan DTKS, kemudian menjadi desil 1 sampai dengan desil 4 yang lalu dirangking menjadi status kesejahteraan sebagai berikut:

1. Desil 1 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia atau termiskin.
2. Desil 2 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia atau hampir miskin



3. Desil 3 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia atau hampir miskin.
4. Desil 4 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia atau rentan miskin (puspensos.kemensos.go.id, 2021).

2.6 Spesifikasi Bangunan Rumah Layak Huni (RLH)

Berdasarkan Permenpupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rumah Layak Huni atau RLH merupakan rumah yang telah memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan atas minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Rumah layak huni berdasarkan UU PKP merupakan rumah yang telah memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, luas tempat tinggal yang cukup, adanya akses air minum yang layak serta akses ke sanitasi layak. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, standar yang harus dipenuhi rumah layak huni adalah sebagai berikut.

1. Memiliki luas bangunan dengan standar luas per orang $9\text{m}^2/\text{orang}$
2. Bangunan mendapatkan cukup banyak cahaya dan distribusi cahaya yang didapatkan merata
3. Konstruksi bangunan menggunakan beton bertulang/kayu/baja yang telah memenuhi standar SNI, Jika menggunakan material lain, material tersebut harus mampu menahan guncangan gempa hingga 8 skala richter
4. Atap bangunan harus kuat dan mampu melindungi penghuni dari panas dan hujan. Bahan yang dinilai layak adalah beton, genteng, seng, dan kayu/sirap yang telah sesuai standar SNI
5. Dinding bangunan mampu menyekat udara luar dengan bahan yang dinilai layak adalah tembok, plesteran, anyaman bambu, dan kayu yang sesuai dengan standar SNI
6. Lantai bangunan memiliki fungsi untuk memutus perkembangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari tanah dengan bangunan yang masuk kedalam kriteria adalah marmer/granit, keramik, parkit/vinil, tegel/ubin, kayu/papan dan bata merah
7. Memiliki sumber air minum yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan 100 liter/hari/orang. Sumber air bersih yang dianggap layak diantaranya adalah



8. Ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, penampungan air hujan, dan air minum dalam kemasan
9. Memiliki akses ke sanitasi untuk satu rumah tangga sendiri dengan kloset leher angsa yang terhubung dengan IPALD atau menggunakan tangki septik yang disedot minimal 1 kali dalam 3 tahun.

2.7 Spesifikasi Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan rumah yang tidak sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas serta kesehatan penghuni. RTLH dianggap tidak layak sebagai tempat hunian sebab tidak memenuhi syarat baik dari aspek fisik, kesehatan keamanan hingga sosial. Menurut ketentuan dari program KemenPUPR, spesifikasi RTLH ialah sebagai berikut.

1. Luas lantai yang tidak mencukupi standar minimal luas/anggota keluarga=9 m²
2. Material lantai berupa kayu kelas IV atau tanah
3. Dinding dengan material bilik bambu / kayu / rotan kelas IV
4. Material atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah tidak layak
5. Ventilasi dan pencahayaan yang kurang hingga tidak ada
6. Fasilitas sanitasi dan pembuangan yang tidak tersedia
7. Ketidaktersediaan/ keterbatasan air minum layak konsumsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatikhurrizqi & Kurniawan (2022) ditemukan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah cenderung tinggal di Rumah Tidak Layak Huni. Masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem memiliki kecenderungan untuk tidak menyewa rumah untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Hal tersebut dikarenakan untuk menyewa rumah yang layak diperlukan kemampuan finansial.

Pemerintah yang menyadari hal tersebut telah menyiapkan beberapa program stimulan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak salah satunya adalah BSPS dan RS Rutilahu. Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan bantuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Program perumahan swadaya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan dari program BSPS ini yaitu diantaranya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Memiliki tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah selain RTLH yang ditempati, belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan dibawah UMK serta adanya swadaya dan membentuk KPB.

2.8 Stunting

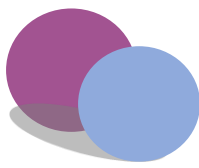
Stunting berdasarkan definisi dari Kementrian Kesehatan merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang lebih lambat daripada anak seusianya akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. *Stunting* pada anak dapat mengganggu tidak hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga mental, intelektual hingga kemampuan kognitif. Gangguan pertumbuhan ini dapat terjadi karena praktik pemberian kolostrum dan asi eksklusif yang belum maksimal, pola konsumsi, dan infeksi yang mengakibatkan terganggunya asupan gizi pada anak. Selain itu *stunting* juga dapat terjadi karena sulitnya akses terhadap bahan makanan, sanitasi dan kesehatan lingkungan yang layak (Ruswati, et al., 2021).

Berdasarkan WHO *Child Growth Standard*, balita *stunting* dapat diidentifikasi berdasarkan indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas z-score kurang dari -2 Standar Deviasi pada kurva pertumbuhan (Apriluana & Fikawati, 2018). Apriluana & Fikawati (2018) berpendapat jika *stunting* terus berlanjut hingga usia anak lebih dari 5 tahun maka keadaan tersebut akan berlanjut hingga dewasa dan meningkatkan kemungkinan adanya siklus *stunting* berikutnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Indonesia berada di angka 21,6% pada tahun 2022 yang mana masih lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. Tingginya angka prevalensi balita *stunting* di Indonesia menunjukkan masih banyaknya anak yang tidak mendapat asupan gizi sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan data BPS tahun 2019 dimana mayoritas anak yang mengidap *stunting* berasal dari keluarga miskin (Nurahardiyatika, Atmaka, & Imani, 2022). Keluarga yang tergolong miskin akan mengalami kesulitan untuk mencukupi asupan nutrisi



yang sesuai kualitas dan kuantitas pada balita yang akhirnya akan berdampak pada tumbuh kembangnya.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto meliputi:

1) Tahapan Persiapan Dasar

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian data, informasi, serta studi literatur yang telah ada sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan laporan;

2) Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan mencakup, utamanya adalah data sekunder, yang disertai data primer berupa dokumentasi lokasi penduduk miskin pada wilayah studi. Proses dokumentasi dilakukan dengan dokumentasi kondisi eksisting mencakup kondisi wilayah dan kependudukan, serta kondisi infrastruktur permukiman eksisting.

3) Tahap Pengolahan Data

Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data. Tahap ini merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode, serta teknik analisis studi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara praktis sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

4) Tahap Penyusunan Laporan

Tahap terakhir, yaitu penyusunan laporan, mencakup laporan pendahuluan dan laporan akhir.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto, yang sekurang-kurangnya memuat data berikut:



- 1) Data umum (peta wilayah administrasi dan table mengenai data jumlah Kecamatan/ kelurahan/ desa, RTRW dan kebijakan daerah terkait kemiskinan dan kesejahteraan)
- 2) Data Demografi, mencakup data proporsi penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, sebaran kepadatan.
- 3) Data Kemiskinan, meliputi jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, Garis Kemiskinan Non Makanan, Nilai pengeluaran, Data kemiskinan ekstrem.
- 4) Kebijakan terkait pengentasan kemiskinan dan program kesejahteraan di Kabupaten Mojokerto (Bantuan BBM, PKH, BLT, Bansos, dst)
- 5) Kebijakan dan perencanaan strategis Kabupaten Mojokerto (RAD, RKPD, RAD SDGs 2021-2026, Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab Mojokerto 2022
- 6) Kajian Terdahulu

Data sekunder tersebut mayoritas dikumpulkan tidak secara langsung atau melalui perantara pihak lain. Data hasil survei sekunder diperoleh dari studi literatur maupun dokumen dari instansi-instansi terkait.

A. Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun catatan pribadi (Suraatmaja, 2015).

B. Instansi

Studi instansi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data ataupun dokumen-dokumen resmi yang didapat dari instansi atau lembaga terkait (Fathoni, 2011).

3.3 Metode Pengolahan Data

Beberapa keluaran/ output utama yang ingin dicapai pada penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut.



3.3.1 Identifikasi Permasalahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Identifikasi permasalahan kemiskinan dilakukan melalui pengumpulan dan olah data serta literatur/studi terdahulu sehingga didapatkan tren kenaikan/penurunan angka kemiskinan, serta karakteristik atau jenis kemiskinan pada Kabupaten Mojokerto.

A. Identifikasi Permasalahan Dengan Data Statistik

Beberapa permasalahan kemiskinan dapat diketahui melalui Data Statistik, yaitu:

- a. Kualitas sumber daya manusia, dapat dideskripsikan dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. Kondisi Kemiskinan Konsumsi, dapat diketahui dari data Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan.
- c. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi, dapat diketahui dari Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan, Pencapaian Kinerja Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, dan Bidang Sosial.

B. Identifikasi Permasalahan Dengan Analisis Coding

Sedangkan menurut kajian terdahulu yang telah dilakukan pada tahun 2022, faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto didapatkan dari hasil wawancara, yang mengungkap penyebab kemiskinan dari sudut pandang masyarakat sebagai berikut:

- (1) Bantuan kurang tepat sasaran
- (2) Bantuan bersifat insidental
- (3) Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas
- (4) Keterbatasan program pelatihan
- (5) Pendapatan rendah dan tidak tetap
- (6) Rendahnya taraf Pendidikan
- (7) Produktifitas masyarakat yang rendah
- (8) Rendahnya akses pekerjaan
- (9) Pengangguran karena pandemi
- (10) Pekerjaan tidak tetap
- (11) Ketimpangan pendapatan



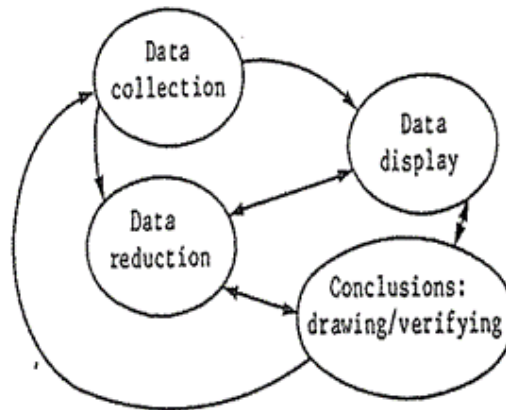
- (12) Rendahnya edukasi finansial warga
- (13) Ketidaktahuan masyarakat tentang hak - hak pekerja
- (14) Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan
- (15) Kurangnya sinkronisasi dan sinergitas antar program pengentasan kemiskinan
- (16) Hambatan investasi yang masuk

Hasil kajian 2022 tersebut kemudian dikonfirmasi lagi pada analisis tahun 2023, dengan wawancara di lokasi sampel yang berbeda dan dengan sasaran informan yang berbeda. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat tepat apabila didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian, yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu sendiri untuk memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. Dalam kajian ini, penentuan sampel penelitian didasarkan pada kebutuhan informasi terkait program-program pengentasan kemiskinan. Sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel nonprobability berdasarkan tujuan, dimana yang paling sering digunakan yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Nasution (1988 dalam Sugiyono, 2011) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (narasumber/ informan) dianggap telah memadai atau mencukupi apabila telah sampai pada tahap “*redudancy*” artinya data yang ada telah jenuh dimana apabila sampel ditambah lagi tidak akan memberikan informasi yang baru.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini menggunakan *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu misalnya seseorang yang dianggap paling tahu tentang informasi apa yang ingin peneliti ketahui atau orang tersebut adalah sebagai “penguasa” sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Manajemen data adalah sebuah langkah dalam analisis kualitatif yang memiliki tujuan untuk membuat proses yang sistematis dan koheren dalam pengumpulan data, sehingga menghasilkan:

1. Data – data yang berkualitas tinggi dan memiliki akses yang mudah,
2. Dokumentasi dari kegiatan analisis yang telah dilakukan, dan
3. Penyimpanan data dan analisis yang berkaitan setelah penelitian selesai dilakukan.



Gambar 3. 1 Proses Manajemen Data

Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Miles dan Huberman (1992) membagi analisis data kualitatif dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bukan merupakan tahapan yang sekuensial (berurutan), tetapi terjadi secara bersama dan berulang terus.

Pemberian kode dalam penelitian kualitatif merupakan suatu bagian dari integral analisis data yang dipandu berdasar pertanyaan penelitian dan mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan baru. Pemberian kode dilakukan untuk menandai unit-unit makna pada setiap informasi deskriptif atau inferensial yang disepakati dan diizinkan selama berlangsungnya kajian tersebut. Kode biasanya ditempatkan pada “potongan-potongan” dari ukuran yang beragam berupa: kata-kata, ungkapan, kalimat, atau alinea. Pemberian kode adalah dua kegiatan yang bersamaan, yakni pengurangan data mekanis dan pengkategorian analisis dari data ke dalam tema. Pemilihan kode didasarkan pada peneliti, kode harus menarik dan mudah diingat agar mempermudah proses analisis.

Peneliti kualitatif memakai tatanan di dalam mengorganisasi data. Peneliti terlibat secara langsung ke dalam proses mekanis dimana momen analisis yang sebenarnya terjadi selama kegiatan pengumpulan data dan pengenalan pola.



Gambar 3. 2 Skema Coding

Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Terdapat 3 (tiga) kategori dalam pemberian kode. Metode coding ini bukan merupakan tahapan, tetapi peneliti bisa memilih salah satu diantaranya tergantung pada tujuan dan kebutuhan penelitian. Kategori tersebut adalah:

1. **Pemberian kode terbuka (Open Coding)**

Coding terbuka bertujuan untuk menyusun kategori sesuai sifat dan ukurannya dengan variasi teknik sampel:

- terencana -> memilih lokasi, subyek, dan dokumen
- sistematis -> memilih berdasarkan urutan dari daftar yang sudah dibuat
- kebetulan -> ditemukan secara tidak sengaja ketika sedang proses pengambilan data

Tahapan dalam melakukan pengkodean terbuka adalah:

a. Pelabelan fenomena

Pengkonsepan data; bukan meringkas. Contoh: Duduk dan berbicara -> berunding

b. Penemuan kategori

Proses pengelompokan konsep yang berujung pada pengkategorian

c. Penamaan kategori

Ditentukan sendiri oleh peneliti, berdasarkan nama yang paling logis dengan karakter suatu kategori. Sifatnya harus menarik perhatian peneliti dan mudah diingat

d. Penyusunan kategori berdasarkan sifat dan ukuran

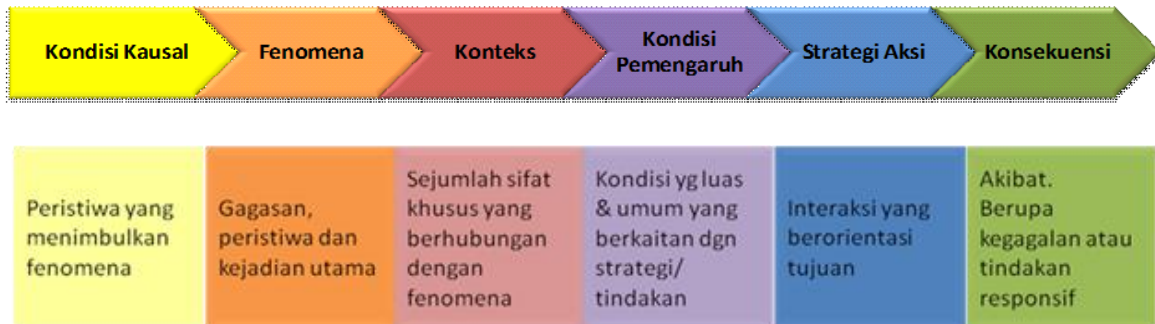
Variasi cara: baris per baris, per kalimat, per paragraf



e. Penulisan catatan kode

2. Pemberian kode aksial (Axial Coding)

Prosedur penempatan data kembali dengan cara baru, dengan **membuat hubungan** antara kategori dengan subkategorinya.



Gambar 3. 3 Tahapan Axial Coding

Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Berikut adalah penjabaran tahapan axial coding:

- Mengaitkan dan menyusun Kategori dengan Paradigma
- Menghubungkan Sub Kategori dengan Kategori dengan cara bertanya tentang hubungannya
- Pembuktian pernyataan terhadap data
- Pengembangan lebih lanjut atas kategori dan subkategori berdasarkan sifat dan tempat kematraan
- Menghubungkan kategori pada tingkat kematraan

3. Concept Mapping.

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi, dimana Proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik (Novak dalam Dahar 1988: 150). Peta konsep adalah gambaran visual dari teori dan fenomena yang akan menjadi studi. Peta konsep ini juga merupakan alat untuk mengembangkan konteks konseptual dari desain, menghasilkan teori dan melihat implikasi dari teori untuk studi atau penelitian. Peta konsep biasanya diwakili dengan kotak atau lingkaran yang diberi label dan panah atau garis penghubung.

Peta konsep adalah cara “berpikir di atas kertas” (Howard & Barton, 1986). Seperti memo, konsep peta dapat menunjukkan koneksi tak terduga atau mengidentifikasi



celah atau kontradiksi dalam teori yang digunakan, dan membantu mencari cara untuk menyelesaikannya. Peta konsep memiliki jenis-jenis yang berbeda, disesuaikan dengan tujuannya masing – masing:

- Kerangka abstrak yang memetakan hubungan antara konsep
- Diagram alur seperti gambaran peristiwa dan bagaimana hal terhubung
- Jaringan kausal dari variabel atau pengaruh
- Diagram pohon dari makna kata – kata (Miles dan Huberman, 1994)
- Diagram Venn, mewakili konsep sebagai lingkaran overlapping.
- Variance map, berhubungan dengan abstrak, dan konsep umum yang menggambarkan bagaimana faktor atau sifat dari sesuatu mempengaruhi yang lainnya
- Process map, menjelaskan secara kronologis, ada awal dan akhir dan kategori dicatat sebagai peristiwa khusus daripada variabel.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menggunakan visualisasi jaringan kausal dengan model Poverty Traps yang menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) terkait kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk menyimpulkan hasil penelitian.

3.3.2 Identifikasi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan

Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data terkait program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto serta indikator-indikator yang ingin dicapai atau dituju. Program pengentasan kemiskinan tersebut juga dirinci dari Perencanaan Jangka Menengah-Jangka Panjang, baik daerah maupun pusat untuk kemudian dianalisis capaiannya pada tahun 2022.

Kemudian daftar kebijakan dan program tersebut akan direview dan dikonfirmasi berdasarkan kata kunci penyebab kemiskinan menurut kajian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Review tersebut disajikan dalam matriks perbandingan sebagai berikut.

No	Kebijakan/ Program	Tahun	Baseline	Satuan	Penyebab Kemiskinan	Pelaksana Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

Keterangan:



- (1) Sudah jelas.
- (2) Nama Kebijakan/ Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto
- (3) Tahun Kebijakan/ Program Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan/ dimulai
- (4) Data dasar saat Kebijakan/ Program Pengentasan Kemiskinan dimulai, misalnya jumlah penduduk miskin
- (5) Satuan dari data di kolom (4), misalnya: jiwa
- (6) Data kondisi tahun 2022, misalnya jumlah penduduk miskin tahun 2022.
- (7) Faktor penyebab kemiskinan menurut kajian terdahulu yang relevan dengan Kebijakan/Program.
- (8) Stakeholder yang berperan utama

3.3.3 Analisis dan Review Capaian Program Pengentasan Kemiskinan

Analisis dan review capaian program membahas mengenai indikator yang tercapai, belum tercapai, dan indikator tidak ada pada RPJMD maupun RPJP terkait pengentasan kemiskinan. Review juga akan dikaitkan dengan capaian dari Propinsi dan Nasional.

3.3.4 Analisis Pemetaan Aktor

Aktor/ *stakeholders* pihak yang bersinggungan langsung dengan isu dan permasalahan yang sedang terjadi atau berkembang di dalam masyarakat. Aktor atau *Stakeholders* dapat dibagi ke dalam tiga kelompok menurut Maryono dalam (Handayani & Warsono, 2017) antara lain:

a. *Stakeholders* primer

Stakeholder primer adalah *stakeholder* utama yang bersinggungan langsung dengan aktivitas, proyek atau pembangunan. Sehingga *stakeholder* atau aktor tersebut merasakan dalam langsung dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. *Stakeholder* primer tentunya memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap suatu aktivitas di wilayah mereka. Dalam implementasi program atau kegiatan *stakeholder* utama sangat penting untuk berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan dari perencanaan sampai pada review kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* dari unsur pemerintah atau state terutama ditingkat lokal, yang memiliki otoritas formal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. *Stakeholder* kunci dalam penelitian ini adalah *stakeholder*/OPD yang bertanggungjawab dalam program pengentasan kemiskinan.



c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholder pendukung adalah individu, kelompok atau organisasi baik formal maupun informal yang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan atau sebuah proyek, tetapi memiliki perhatian atau kepentingan yang cukup besar terhadap suatu proyek tertentu. Misalkan kelompok NGO aktor pemerhati lingkungan dan lain sebagainya.

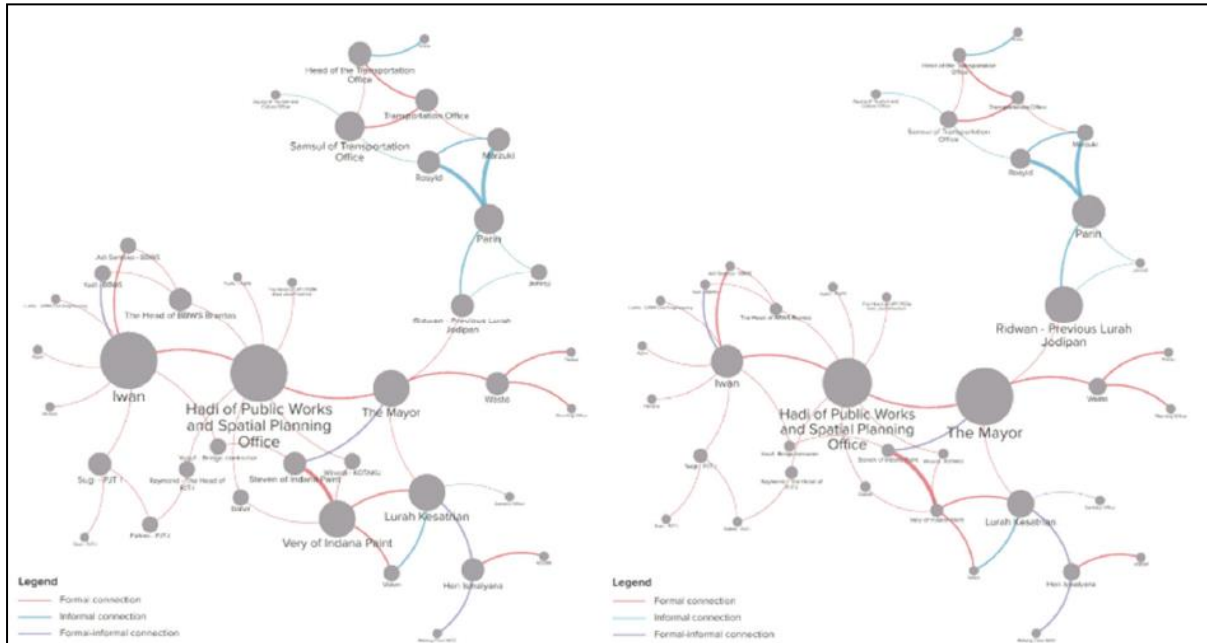
Dalam pemetaan aktor terkadang ditemukan aktor yang memiliki multi peran, sebagai individu, kelompok dan bahkan organisasi, biasanya aktor ini merupakan aktor yang paling berpengaruh didalam masyarakat. Berdasarkan pendalaman data dan informasi melalui wawancara mendalam dengan key informan, FGD, wawancara dengan aktor dan penyebaran kuesioner, teridentifikasi aktor-aktor (*stakeholders*) yang berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam penentuan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Untuk mempermudah proses pemetaan aktor, studi ini menggunakan *social network analysis* (SNA) dalam mengidentifikasi aktor dan struktur jejaring sosial. Manfaat menggunakan *social network analysis* adalah dengan memetakan seluruh jaringan, analisis ini dapat menunjukkan keseluruhan sistem yang dapat mengidentifikasi broker (menggunakan *betweenness centrality*). *Social network analysis* dapat mengidentifikasi aktor yang berada di luar *immediate circle* (lingkaran sosial terdekat). *Social network analysis* menunjukkan bagaimana seluruh sistem saling berhubungan dimana tidak ada individu yang dapat melihat kondisi tersebut secara utuh. Penggunaan *social network analysis* di dalam studi ini penting untuk mempelajari keterkaitan yang kompleks antara aktor-aktor yang berpengaruh. Penggunaan *social network analysis* secara visual dapat memilah-milah koneksi yang kompleks dan menampilkan kekuatan hubungan antar aktor untuk mengidentifikasi aktor primer, aktor kunci dan aktor pendukung.

Selanjutnya, untuk menganalisis posisi para aktor, studi ini menggunakan beberapa properti jaringan, yaitu:

- (1) Perhitungan *radian* dan *medial network* (Borgatti & Everett, 2006)
- (2) Kekuatan hubungan, diidentifikasi menggunakan kombinasi antara frekuensi, kedekatan emosional, pengakuan dan hubungan timbal balik antar aktor (Erickson,

(3) Hubungan formal dan informal antar aktor (Guinness, 2009; Kreibich, 2012; McFarlane & Waibel, 2012; Monge & Contractor, 2003; Pieterse, 2013)



Sumber: Sutikno, 2022.

Secara keseluruhan, rangkaian analisis studi ini dapat digambarkan melalui kerangka berikut.

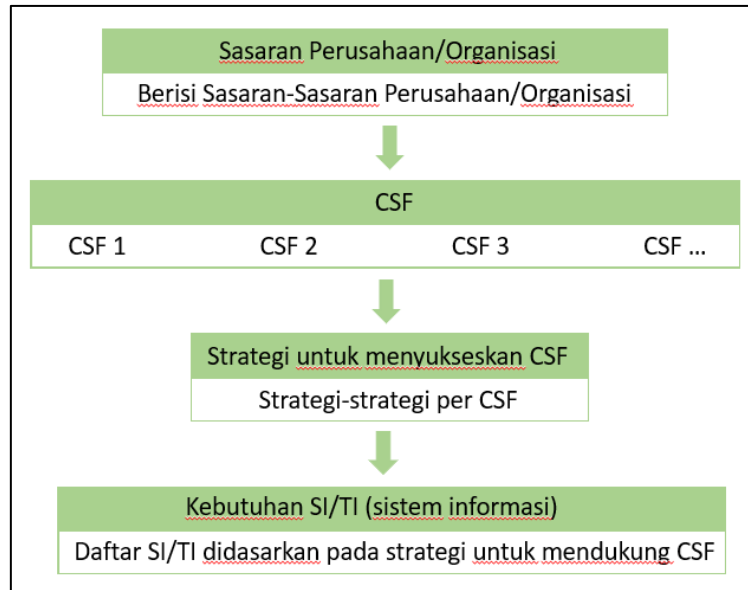
Prioritas kebijakan dan program diperlukan mengingat urgensi permasalahan kemiskinan yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan dan kemajuan daerah. Prioritas disusun berdasarkan review kebijakan yang telah disusun, dimana



kebijakan yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dapat dipertimbangkan dijadwalkan pada awal timeline.

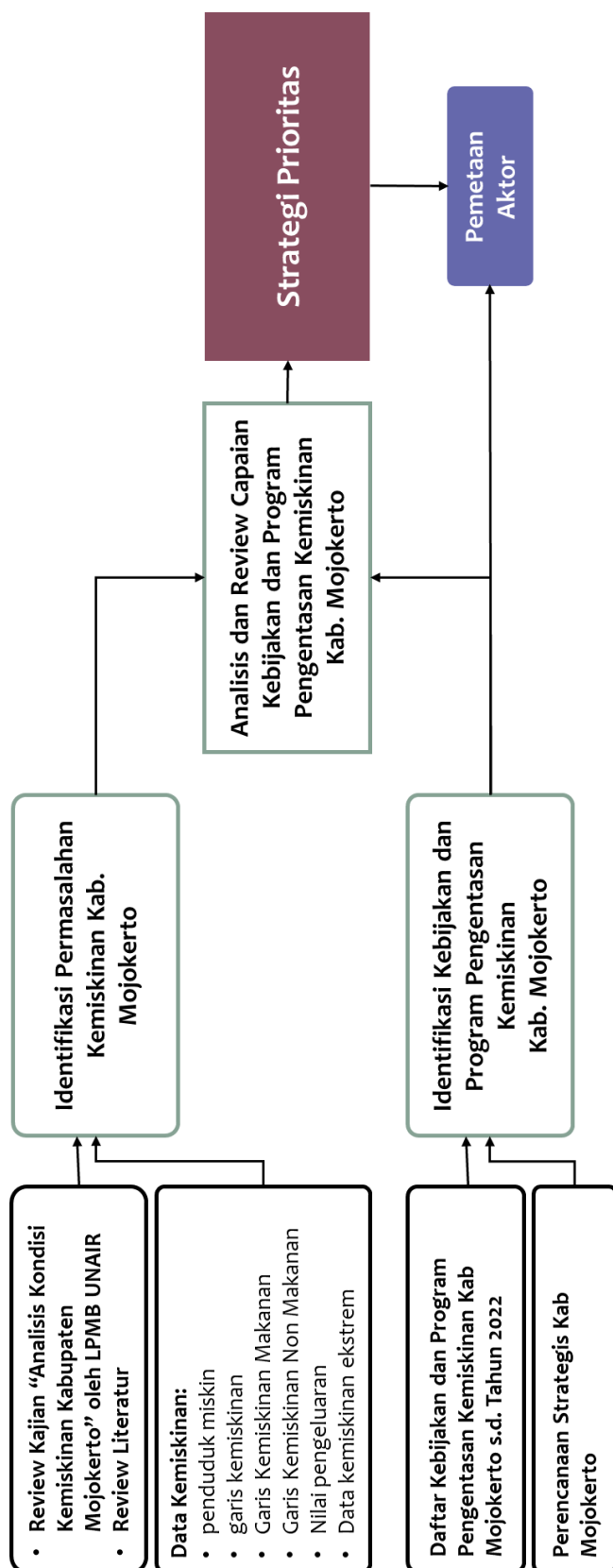
Prioritas kebijakan dilakukan dengan identifikasi faktor-faktor vital yang dapat menyebabkan suatu perubahan atau perkembangan dalam suatu kegiatan yang sedang direncanakan. Faktor tersebut adalah Critical Success Factor (CSF), yaitu suatu area pada organisasi, yang dapat menentukan kesuksesan performansi organisasi apabila area tersebut dilaksanakan atau dipenuhi (Rockart, 1981). Bullen & Rockart (1981) menyatakan bahwa CSF merupakan faktor-faktor yang harus dipastikan berjalan dengan tepat (*“things must go right”*) oleh perusahaan dimana faktor penentu keberhasilan adalah jumlah yang relatif kecil dari hal-hal yang benar-benar penting di mana seorang manajer harus memusatkan perhatiannya. Faktor-faktor CSF mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan sumber daya sistem informasi manajemen rantai pasok yang sangat penting untuk kesuksesan dari perusahaannya itu sendiri. CSF memberikan gambaran pada perusahaan tentang aspek-aspek kritis apa saja di setiap aktivitas dan proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta keberhasilan bisnisnya. Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan.

Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya, memfokuskan proses perencanaan strategi SI (Sistem Informasi) pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI.

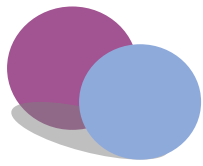


Gambar 3. 5 Skema Audit Situasi

Terdapat beberapa pemahaman atau pilihan skenario dalam skema analisis untuk mencapai perencanaan strategis. Pertama, audit situasi dilakukan secara komprehensif dan tidak memungkinkan hanya satu cara, tetapi mengikuti skema di atas. Kedua, skema analisis mencakup segala hal yang penting di lingkup internal dan eksternal. Ketiga, skema konsep pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penelitian. Keempat, audit situasi ini tidak dilakukan sebagai formalitas melainkan benar-benar dilakukan dengan tujuan mewujudkan perencanaan strategis.



Gambar 3. 6 Alur Penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto



BAB IV ANALISIS KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO

4.1 Gambaran Umum Kab Mojokerto

Gambaran umum Kabupaten Mojokerto memberikan informasi terkait Kabupaten Mojokerto. Terdapat empat karakteristik wilayah Kabupaten Mojokerto yang akan dijelaskan, yaitu karakteristik fisik dasar, karakteristik Kependudukan dan karakteristik fisik binaan. Berikut merupakan penjelasan tiap komponen gambaran umum Kabupaten Mojokerto.

4.1.1 Karakteristik Fisik Dasar

a. Geografi

Kabupaten Mojokerto merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berdasarkan letak geografisnya berada di antara $111^{\circ}20'13''$ sampai dengan $111^{\circ}40'47''$ bujur timur dan antara $7^{\circ}18'35''$ Sampai dengan $7^{\circ}47'0''$ lintang selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Mojokerto berada di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 692,15 Ha yang terbagi menjadi 18 Kecamatan. Batas Wilayah administrasi Kota Mojokerto meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1	Jatirejo	32,98	4,76
2	Gondang	39,11	5,65
3	Pacet	45,16	6,52
4	Trawas	29,86	4,31
5	Ngoro	57,48	8,3
6	Pungging	48,14	6,96
7	Kutorejo	42,83	6,19
8	Mojosari	26,65	3,85



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
9	Bangsals	24,06	3,48
10	Mojoanyar	23,02	3,33
11	Dlanggu	35,42	5,12
12	Puri	35,65	5,15
13	Trowulan	39,20	5,66
14	Sooko	23,46	3,39
15	Gedek	22,98	3,32
16	Kemlagi	50,05	7,23
17	Jetis	57,17	8,26
18	Dawar Blandong	58,93	8,51
	Total	692,15	100

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 desan, dan 5 Kelurahan, 1173 Dusun, 2093 RW dan 7118 RT. Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 692,15 Km². Kecamatan paling luas yang terdapat di Kabupaten Mojokerto adalah kecamatan Dawar Blandong dengan luas 58,93 km². Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah berupa perairan ataupun laut. Berikut merupakan Jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 2 Jumlah Kelurahan, RW, dan RT Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah				
		Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Jatirejo	19		58	108	341
2	Gondang	18		71	82	278
3	Pacet	20		80	132	435
4	Trawas	13		29	80	251
5	Ngoro	19		68	103	552
6	Pungging	19		87	176	602
7	Kutorejo	17		108	141	351
8	Mojosari	14	5	53	150	570
9	Bangsals	17		49	74	296
10	Mojoanyar	12		44	69	262
11	Dlanggu	16		80	94	310
12	Puri	16		68	141	453
13	Trowulan	16		60	110	408
14	Sooko	15		42	110	419
15	Gedek	14		46	107	384
16	Kemlagi	20		76	136	372
17	Jetis	16		79	120	484
18	Dawar Blandong	18		75	160	350
	Total	299	5	1173	2093	7118

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

b. Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Mojokerto terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dialiri sungai Brantas. Kabupaten ini memiliki ketinggian rata-rata 170 meter diatas permukaan laut dengan struktur tanahnya yang cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi dibagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur,



meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kemiringan tanah lebih dari 15 derajat. Sisanya berupa wilayah dataran sedang dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dengan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Berikut pembagian kemiringan tanah di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 3 Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto

No	Kemiringan	Luas	
		Ha	%
1	0,0-2,0	45.886	47,34
2	2,0-15,0	22.072	22,77
3	15,0 – 40,0	8.474	8,74
4	Di atas 40,0	20.504	21,15
Total		96.936	100

Sumber : BPN Kabupaten Mojokerto

c. Klimatologi

Kabupaten Mojokerto mempunyai perubahan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim kemarau pada bulan mei hingga september dan musim hujan pada bulan oktober hingga april dengan curah hujan rata-rata sebesar 259,61 mm. Kabupaten Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 64 mdpl. Curah hujan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022 berkisar 1.300 – 1.900 mm. Per tahun Curah hujan terendah terjadi pada bulan agustus yaitu sebesar 9 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari sebesar 376 mm.

Sedangkan untuk jumlah hari hujan di Kabupaten Mojokerti berkisar antara 80-140 hari hujan pertahun. Hari hujan tertinggi pada bulan januari dengan jumlah 22 hari hujan serta hari hujan paling rendah pada bulan agustus dengan 1 hari hujan.

d. Geologi

Secara geologi Kabupaten Mojokerto terbagi atas empat macam batuan, yaitu aluvium, pliosen fassies sedimen, pliosen fasies batu gamping miosen fasies sedimen. Jenis batuan aluvium dam miosen fasies sedimen banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tegalan dan sawah serta sebagian kecil batuan pliosen fasies sedimen untuk tegalan.



Struktur geologi Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 3 yaitu struktur primer, struktur sekunder dan struktur sekunder lainnya. Struktur primer berupa perlapisan batuan dan lipatan antiklin – sinklin yang dapat ditemukan pada sisi utara. Struktur sekunder berupa sesar normal dan sesar geser dengan arah baratdaya-timurlaut dan barat laut- tenggara yang serta berkembang di bagian tengah dan selatan. Struktur sekunder lainnya berupa kekar-kekar pada batuan berkembang dalam skala yang lebih kecil dan dikontrol oleh aktifitas struktur regionalnya.

Tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 macam yaitu: Tekstur halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari, dan Trawas. Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto tersebar merata kecuali Kecamatan gedeg dan Kemlagi.

e. Hidrologi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021, terdapat 161 buah mata air, namun yang berfungsi hanya 153 buah mata air. Mata air tersebut mayoritas tersebar di Kabupaten Mojokerto bagian selatan. Rata-rata debit air maksimum pada mata air tersebut yaitu 19,42 liter/detik dan rata-rata debit air minimum pada mata air tersebut yaitu 7,60 liter/detik. Selain mata air, Kabupaten Mojokerto memiliki 61 sungai yang sudah memiliki nama dan masih terdapat banyak saluran tersier maupun kuarter yang belum bernama. Sungai besar yang melewati Kabupaten Mojokerto yaitu Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik.

4.1.2 Karakteristik Kependudukan

A. Jumlah Penduduk

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.133.584 jiwa yang terdiri dari 569.966 jiwa laki-laki dan 563.618 jiwa perempuan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023). Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat *sex ratio* sebesar 101,2. Berikut merupakan rincian jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto dan *sex ratio* di 18 kecamatan.



Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sex Ratio
1.	Jatirejo	44.707	105
2.	Gondang	43.470	101
3.	Pacet	59.399	101
4.	Trawas	31.227	100
5.	Ngoro	85.883	98
6.	Pungging	79.850	101
7.	Kutorejo	67.807	103
8.	Mojosari	78.475	100
9.	Bangsar	51.462	101
10.	Mojoanyar	51.154	102
11.	Dlanggu	56.201	101
12.	Puri	79.200	102
13.	Trowulan	75.366	102
14.	Sooko	75.798	101
15.	Gedek	57.013	101
16.	Kemlagi	58.535	100
17.	Jetis	87.137	103
18.	Dawar Blandong	50.900	99
Kabupaten Mojokerto		1.133.584	101

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Jetis menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar 87.137 jiwa. Sedangkan Kecamatan Trawas menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 31.227 jiwa. Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat *sex ratio* sebesar 101 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki di Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Jatirejo memiliki nilai *sex ratio* tertinggi di Kabupaten Mojokerto yakni sebesar 105 sedangkan Kecamatan Dawar Blandong memiliki *sex ratio* terkecil diantara seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar 99.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan rata-rata tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain adalah kelahiran (*fertilitas*), Kematian (*mortalitas*), dan migrasi. Berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk pada Kabupaten Mojokerto berdasarkan proyeksi penduduk SUPAS 2015.



Tabel 4. 5 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	1.109.067	0,90	99,83
2019	1.118.625	0,86	99,83
2020	1.127.882	0,83	99,82
2021	1.136.879	0,80	99,78
2022	1.145.650	0,77	99,76

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto, 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berada di 0,77 persen yang mana angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,80% (tahun 2021). Penurun tersebut dapat menjadi indikator atas keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk yang di jalan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten mojokerto yang terbagi ke setiap Kecamatan.

Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
Jatirejo	44.325	0,86
Gondang	43.119	0,81
Pacet	58.913	0,82
Trawas	31.011	0,7
Ngoro	85.431	0,53
Pungging	79.258	0,75
Kutorejo	66.977	1,24
Mojosari	78.176	0,38
Bangsar	51.103	0,7
Mojoanyar	50.808	0,68
Dlanggu	55.733	0,84
Puri	78.532	0,85
Trowulan	74.829	0,72
Sooko	75.278	0,69
Gedek	56.708	0,54
Kemlagi	58.016	0,89
Jetis	86.621	0,6
Dawar Blandong	50.684	0,43
Total	1.133.584	0,72

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto berada di angka 0,72% pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk tersebut meningkat setelah sebelumnya pada tahun 2021 berada di angka 0,42%. Pada Tahun 2021, pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Kuterejo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24% dan Kecamatan Mojosari menjadi Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil yaitu pada 0,38%.



C. Kepadatan Penduduk

Menurut BPS, kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk per satuan luas. Kepadatan penduduk didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah penduduk dalam suatu wilayah dengan luas wilayah (dalam satuan km²/jiwa). Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sebesar 692,15 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 1.626 km²/jiwa.

Tabel 4. 7 Kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Jatirejo	32,98	44.707	415
2.	Gondang	39,11	43.470	441
3.	Pacet	45,16	59.399	550
4.	Trawas	29,86	31.227	538
5.	Ngoro	57,48	85.883	1218
6.	Pungging	48,14	79.850	1774
7.	Kutorejo	42,83	67.807	1559
8.	Mojosari	26,65	78.475	2720
9.	Bangsals	24,06	51.462	1992
10.	Mojoanyar	23,02	51.154	2189
11.	Dlanggu	35,42	56.201	1569
12.	Puri	35,65	79.200	2286
13.	Trowulan	39,20	75.366	1641
14.	Sooko	23,46	75.798	3927
15.	Gedek	22,98	57.013	2178
16.	Kemlagi	50,05	58.535	1382
17.	Jetis	57,17	87.137	1643
18.	Dawar Blandong	58,93	50.900	495
Kabupaten Mojokerto		692,15	1.133.584	1.169

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

D. Struktur Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak serta kompeten. Berdasarkan UUD 45 pasal 31 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dengan tujuan mencerdaskan bangsa sehingga diberlakukannya peraturan wajib belajar 9 tahun. Pembahasan pada bidang pendidikan akan di fokuskan terhadap pencapaian yang telah tercapai di bidang pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan manusia. Angka harapan lama sekolah merupakan



asumsi peluang seorang anak akan tetap bersekolah per jumlah penduduk. Sedangkan Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh pendidikan.

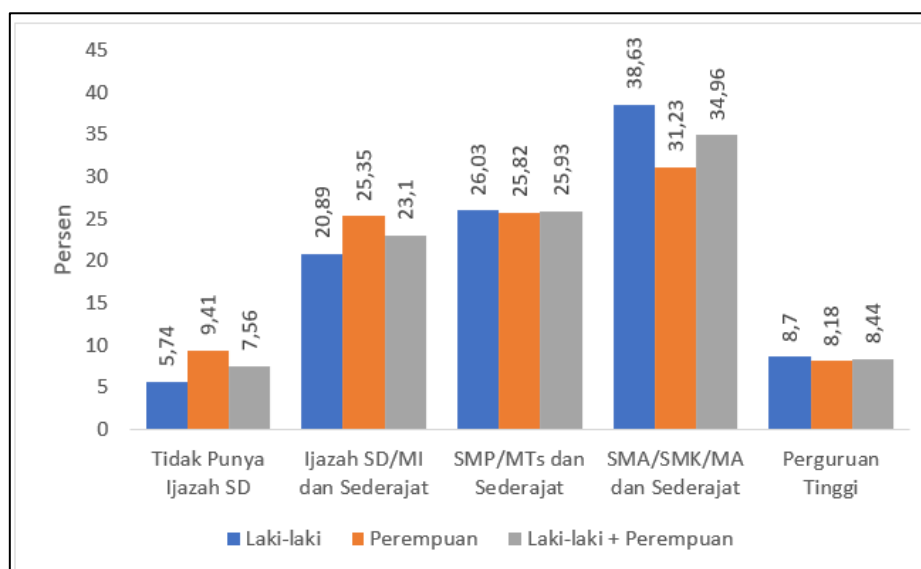
Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,01% menjadi 12,96 tahun. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa lamanya sekolah di masa yang akan datang mencapai lulusan SMA sederajat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto juga mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada tahun 2021 berada di 8,64 tahun dan meningkat menjadi 8,97 tahun yang berarti rata-rata penduduk yang berusia 15 keatas telah mengenyam pendidikan selama 8,97 tahun atau setara dengan setingkat SMP sederajat.

Tabel 4. 8 HLS dan RLS penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12,61	12,88	12,95	12,96
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,18	8,49	8,51	8,64	8,97

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

Pada Kabupaten Mojokerto, persentase penduduk berumur 15 tahun keatas memiliki ijazah SMA sederajat dengan total 34,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Mojokerto yaitu sebanyak 56,6% menempuh pendidikan di Tingkat SMP kebawah.



Gambar 4. 1 Persentase Penduduk Kabupaten Mojokerto Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan , 2022

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2022



E. Mata Pencarian dan Struktur Pekerjaan

Ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja merupakan pendorong bagi roda perekonomian. Pada Kabupaten Mojokerto, Penduduk akan terbagi menjadi 2 yaitu sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja akan terbagi lagi menjadi Angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran terbuka. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Kecamatan Mojokerto memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 646.778 Jiwa dengan angkatan kerja yang bekerja sebesar 615.557 jiwa dan pengangguran terbuka sebesar 31.221 jiwa.

Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Kabupaten Mojokerto, 2022

Kegiatan Utama	Jumlah
Angkatan Kerja	646.778
Bekerja	615.557
Pengangguran Terbuka	31.221
Bukan Angkatan Kerja	259.875
Jumlah	906.653

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2023

Penduduk yang memiliki kegiatan utama bekerja akan terbagi menjadi 6 kategori status pekerjaan utama yang terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada Kabupaten Mojokerto penduduk dengan status pekerjaan terbanyak adalah sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai dengan total tenaga kerja sebanyak 244.397 jiwa.

Tabel 4. 10 Status Pekerjaan Utama Kabupaten Mojokerto, 2022

Status Pekerjaan Utama	Jumlah
Berusaha Sendiri	103.326
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	87.725
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	10.292
Buruh/karyawan/pegawai	244.397
Pekerja bebas	100.181
Pekerja keluarga/tdk dibayar	69.636
Jumlah	615.557

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023



4.1.3 Karakteristik Fisik Binaan

A. Karakteristik Penggunaan Lahan

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah secara keseluruhan sebesar 969.360 km² atau sekitar 2,09% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan rincian penggunaan atau pemanfaatan lahan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 11 Penggunaan Lahan Kabupaten Mojokerto

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (km ²)
Permukiman	132.440
Pertanian	371.010
Hutan	289.480
Perkebunan	170.000
Rawa-Rawa/ Waduk	0,490
Lahan Kritis	0,200
Padang rumput	1.590
Semak-semak / alang-alang	0,720
Jumlah	969.360

Sumber: Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data jenis penggunaan lahan di Kabupaten Mojokerto, guna lahan terbesar digunakan sebagai lahan pertanian yaitu sebesar 371.010 km². Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun terus mengalami peralihan fungsi, contohnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan.

B. Karakteristik Sarana Pemukiman

1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan dan pembelajaran terbagi menjadi 2 jenis yaitu sarana pendidikan formal dan nonformal. Sarana pendidikan formal terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dapat berbentuk SD/MI sederajat dan SMP/MTs. Pendidikan Menengah contohnya SMA, MA, SMK dan sederajat sedangkan pendidikan tinggi dapat berupa pendidikan diploma, sarjana, magister dan doktor yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Berikut jumlah dan persebaran sarana pendidikan dan pembelajaran di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 12 Persebaran Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Perguruan Tinggi
1	Jatirejo	33	11	7	1
2	Gondang	24	8	8	-



No	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Perguruan Tinggi
3	Pacet	37	13	10	3
4	Trawas	19	5	5	-
5	Ngoro	45	14	8	-
6	Pungging	37	15	12	3
7	Koturejo	42	16	7	-
8	Mojosari	41	18	20	2
9	Bangsals	32	9	5	1
10	Mojoanyar	25	4	3	1
11	Dlangu	31	7	5	-
12	Puri	37	13	10	-
13	Trowulan	35	14	10	1
14	Sooko	32	17	13	2
15	Gedek	35	10	4	-
16	Kemlagi	36	10	8	1
17	Jetis	45	15	9	-
18	Dawar Blandong	37	11	7	-
Total		632	210	151	15

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

2. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan. Menurut SNI 03-1733-2004 Sarana kesehatan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu rumah sakit, Rumah sakit bersalin, Puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan, tempat praktik dokter, dan apotek. Berikut jumlah dan persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 13 Persebaran Sarana Kesehatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Jatirejo	-	-	-	1	4	3
2	Gondang	1	-	-	1	4	3
3	Pacet	1	-	3	3	3	3
4	Trawas	2	-	1	1	2	2
5	Ngoro	2	-	2	2	4	3
6	Pungging	-	-	2	2	3	5
7	Koturejo	-	-	1	2	3	4
8	Mojosari	3	-	7	2	2	7
9	Bangsals	1	-	2	1	2	2
10	Mojoanyar	1	-	3	1	3	3
11	Dlangu	1	-	1	1	3	2
12	Puri	1	1	6	1	3	7
13	Trowulan	-	-	3	2	2	4
14	Sooko	2	-	1	1	3	7
15	Gedek	1	1	1	2	3	5
16	Kemlagi	3	-	2	-	2	3



No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
17	Jetis	-	-	3	2	3	4
18	Dawar Blandong	-	-	1	1	3	4
Total		19	2	39	26	52	71

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana yang digunakan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan sesuai peraturan dan keputusan masyarakat. Sarana Peribadatan terdiri dari Masjid, musholla, langgar, gereja, pura, vihara, klenteng dan sebagainya. Berikut jumlah dan persebaran sarana peribadatan di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 14 Persebaran sarana peribadatan Kabupaten Mojokerto.

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Putra	Vihara	Kelenteng
1	Jatirejo	61	247	-	-	-	-	-
2	Gondang	71	147	5	-	2	-	-
3	Pacet	93	264	4	1	-	-	-
4	Trawas	34	144	-	-	-	-	-
5	Ngoro	83	470	1	-	-	-	-
6	Pungging	79	307	-	-	1	-	-
7	Koturejo	122	1273	2	-	-	-	-
8	Mojosari	69	281	5	1	1	-	-
9	Bangsals	54	233	-	-	-	-	1
10	Mojoanyar	46	187	2	-	-	-	-
11	Dlangu	75	242	3	-	-	-	-
12	Puri	82	254	1	-	-	-	-
13	Trowulan	72	276	1	-	1	1	-
14	Sooko	62	205	1	1	1	1	1
15	Gedek	35	178	-	3	-	-	-
16	Kemlagi	48	163	2	3	-	-	-
17	Jetis	72	369	5	-	2	-	-
18	Dawar Blandong	64	222	7	1	-	-	-
Total		1222	5462	39	10	8	2	2

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

4.2 Kondisi Kemiskinan Kab Mojokerto

4.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dari seorang individu yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu layanan yang profesional menurut Sugeng dalam Gerhana et. al (2019) .Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widodo (2015) bahwa sumber daya manusia dapat dianggap memiliki kualitas jika individu tersebut telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan

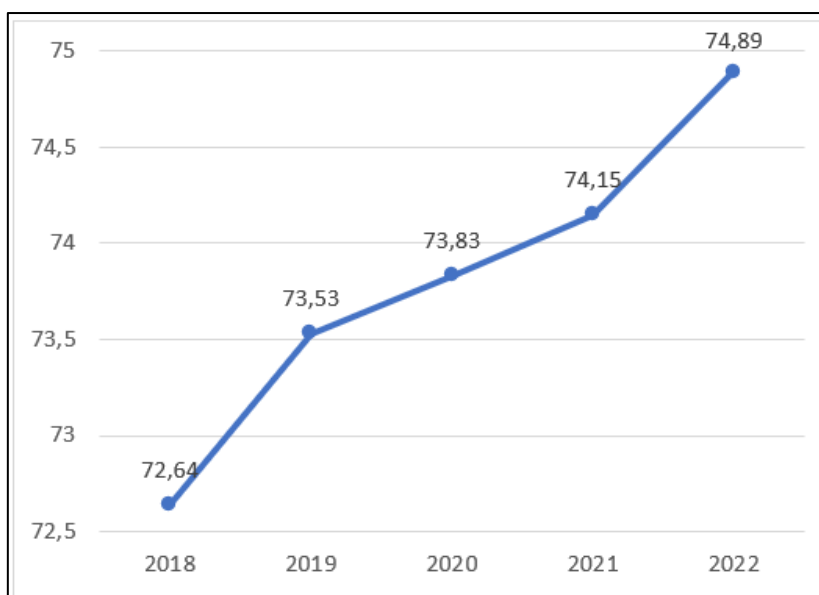


tanggung jawabnya. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi ini berdasarkan Ndaraha (2002) merupakan SDM yang tidak hanya menciptakan suatu nilai komparatif namun juga nilai kompetitif, generatif hingga inovatif. Untuk melihat lebih jauh mengenai kualitas sumber daya manusia khususnya pada Kabupaten Mojokerto, akan dilihat berdasarkan 3 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pembangunan khususnya yang memiliki perspektif pada kualitas sumber daya manusia dan gender sesuai dengan tujuan kelima dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesetaraan gender.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Pengukuran IPM dilakukan lewat 3 pendekatan yaitu Harapan Hidup, Pengetahuan dan kehidupan yang layak. Angka harapan hidup dihitung oleh komponen umur harapan hidup (UHH) yang merupakan perkiraan rata-rata tambahan hidup yang diharapkan dapat dicapai seseorang terus hidup (BPS Kabupaten Mojokerto, 2020). Pada dimensi pengetahuan akan dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sedangkan dimensi kehidupan yang layak akan dihitung berdasarkan komponen pengeluaran per kapita, yang akan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita serta paritas daya beli.

Pembangunan manusia di kabupaten Mojokerto sendiri terus mengalami kenaikan selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto berada di angka 72,64,83 dan terus meningkat dalam waktu 4 tahun kedepan menjadi 74,89 di tahun 2022. Peningkatan indeks pembangunan manusia ini juga meningkatkan peringkat Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya sempat turun pada tahun 2020 di posisi 12 dan kembali ke peringkat 11 pada tahun 2021 dan 2022.



Gambar 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto, 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis khususnya di tahun 2022. Pada 2022, IPM Kabupaten Mojokerto meningkat hingga 1 persen dengan 0,74 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto yang didasarkan oleh komponen seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Tabel 4. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	Tahun	72,24	72,43	72,53	72,59	72,93
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12,61	12,88	12,95	12,96
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,18	8,49	8,51	8,64	8,97
Pengeluaran per kapita	Rupiah	12.454	12.860	12.799	12.844	13.051
IPM		72,64	73,53	73,83	74,15	74,89
Pertumbuhan IPM	%	0,39	1,23	0,41	0,43	1,00

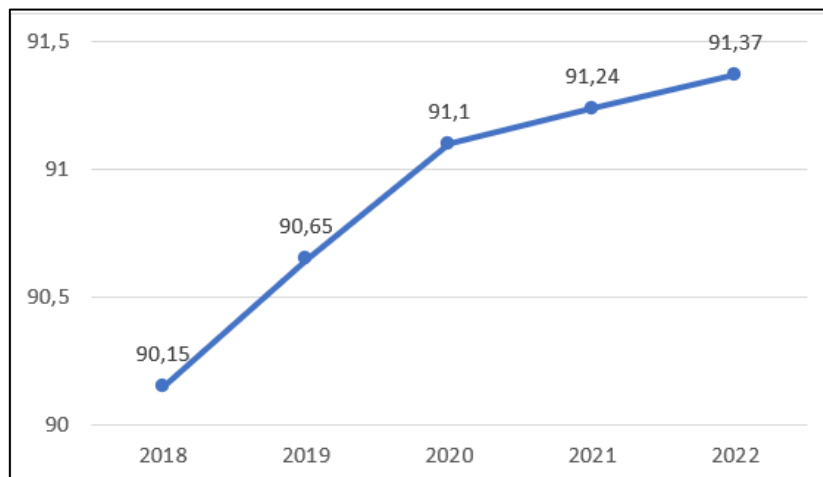
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan IPM sebesar 1 persen pada tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan baik di UHH, Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah hingga pengeluaran perkapita. Peningkatan komponen ini menghantarkan Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di angka 74,89.



B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender atau IPG menjadi indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan manusia namun dengan memperhatikan gender (Kemen PPPA, 2020). Pada indeks pembangunan gender, jika angka IPG mendekati 100 maka indeks pembangunan manusia pada wilayah tersebut hampir rata antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 berada di angka 91,37. Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 91,24 pada tahun 2021, 91,1 pada tahun 2020 dan 90,65 pada tahun 2019.



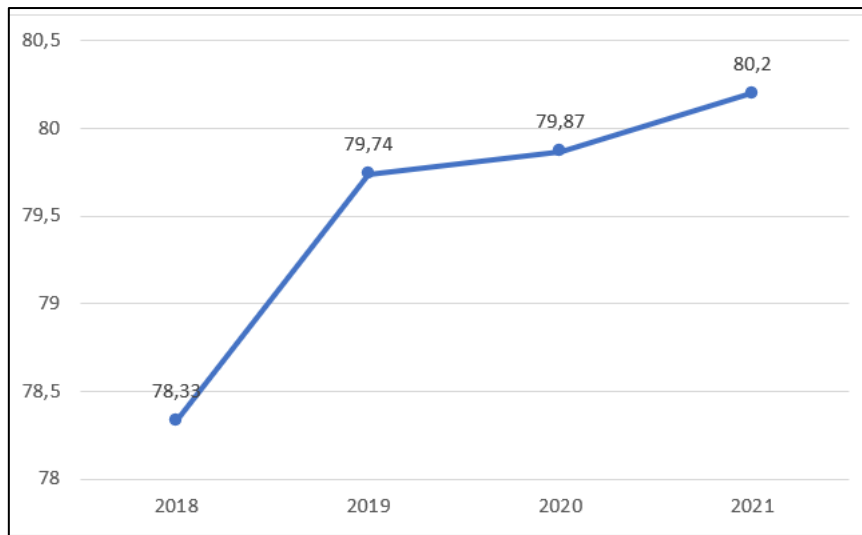
Gambar 4. 3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mojokerto, 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG menurut BPS merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar keikutsertaan perempuan dalam kehidupan berekonomi dan politik. IDG dihitung berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan di dalam parlemen, Pengambilan Keputusan, dan distribusi pendapatan (Kemen PPPA, 2020).

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto sendiri mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto berada di angka 80,2 meningkat sebesar 0,33 poin dari tahun 2020 yang memiliki nilai di angka 79,87 dan meningkat 2,13 poin dari tahun 2018 yang berada di angka 78,33.



Gambar 4. 4 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto, 2018-2021

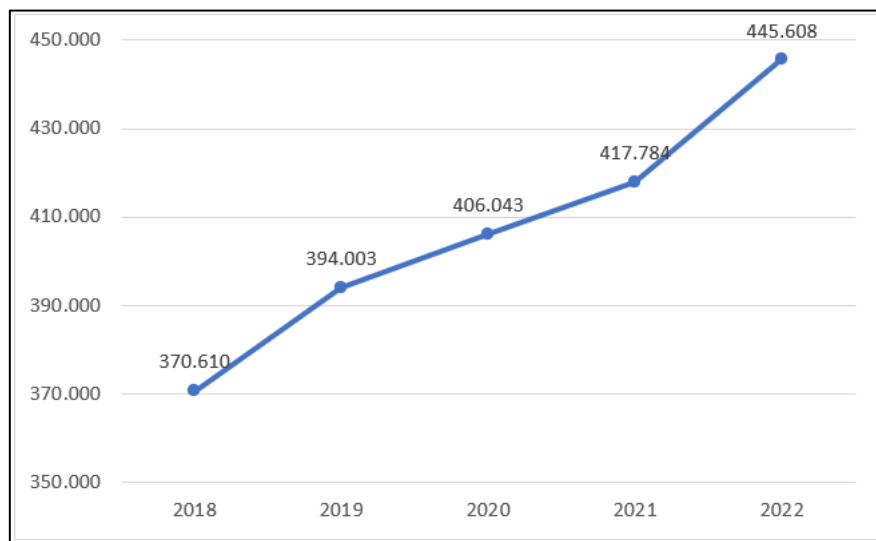
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

4.2.2 Kondisi Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan konsumsi merupakan pengukuran kemiskinan yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi (Marbun & Suryahadi, 2009). Pengukuran kemiskinan konsumsi di Indonesia sendiri dihitung berdasarkan pengukuran garis kemiskinan lewat biaya yang diperlukan untuk mendapatkan makanan dengan kandungan kalori sebesar 2.100kalori perkapita perhari. Pada penentuan garis kemiskinan konsumsi, terdapat 2 komponen yang harus dihitung yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berikut merupakan kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

A. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk menentukan keadaan ekonomi seseorang. Jika seseorang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan, maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan dihitung setiap 1 tahun sekali oleh BPS lewat Susenas atau Survei Sosial Ekonomi. Penghitungan garis kemiskinan didasarkan kepada pengeluaran minimal yang dikeluarkan untuk sejumlah makanan demi memenuhi kebutuhan kalori harian dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengeluaran bukan makanan yang digunakan untuk hidup secara layak.



Gambar 4. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto berada di angka Rp 370.610 dan terus meningkat hingga Rp 445.608 pada tahun 2022. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi terus menerus dan secara bertahap dalam jangka waktu 4 tahun dengan rata-rata kenaikan Rp 18.750 dan kenaikan terbesar terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 27.824.

B. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut memiliki pengeluaran perkapita perbulan yang berada di bawah standar garis kemiskinan sehingga dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

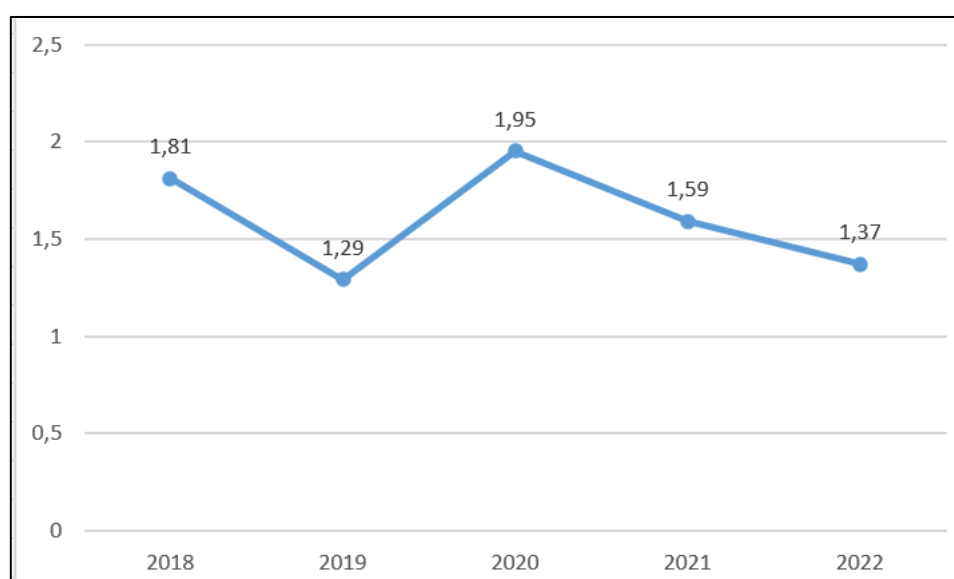
Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk miskin (%)
2013	116,6	10,99
2014	113,3	10,56
2015	113,86	10,57
2016	115,38	10,61
2017	111,79	10,19
2018	111,55	10,08
2019	108,81	9,75
2020	118,8	10,57
2021	120,54	10,64
2022	111,03	9,71

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mengalami penurunan setelah sebelumnya terdapat peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Penduduk miskin pada tahun 2022 sendiri mengalami penurunan hingga 9,51 ribu jiwa dimana sebelumnya persentase penduduk miskin berada di angka 10,64% menjadi 9,71%.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan salah satu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menurut BPS. Semakin tinggi angka Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin tinggi kemiskinan di wilayah tersebut.



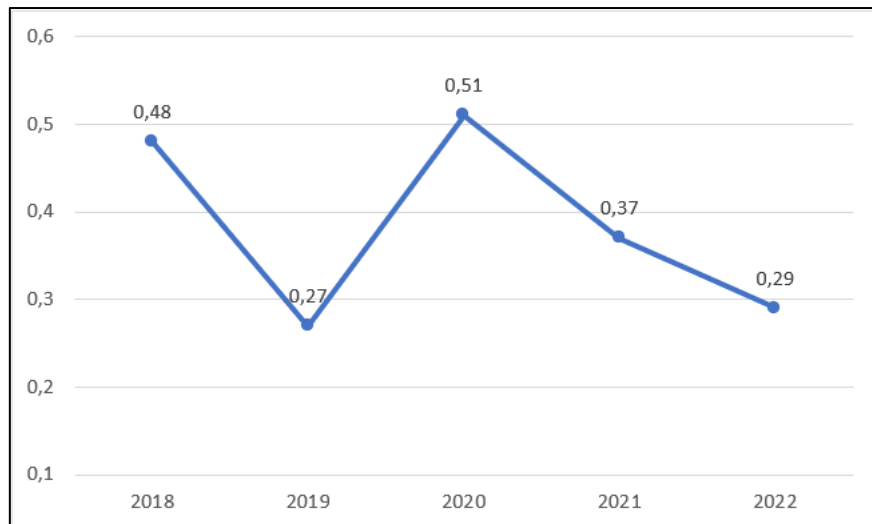
Gambar 4. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan yang cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 IKK Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan namun naik kembali pada tahun 2020 dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2022. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020-2022 menandakan makin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

D. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan menurut BPS merupakan gambaran atas penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Menurut Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin besar angkanya maka semakin besar jarak atau gap pengeluaran antara penduduk miskin.



Gambar 4. 7 Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2022 memiliki pola yang hampir mirip dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan hingga 0,51 dari yang sebelumnya berada di 0,27. Namun angka tersebut terus menurun di 2 tahun setelahnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 hingga menjadi 0,29(2022).

4.2.3 Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi

Kondisi kemiskinan Non konsumsi merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum komoditas bukan makanan terpilih, yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi kemiskinan non konsumsi dapat ditangani dengan adanya program bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Kondisi eksisting di Kabupaten Mojokerto masyarakat merasa terbantu dari adanya program bantuan namun masih merasa kurang padahal mereka telah menerima PKH dan masih meminta bantuan dari desa. Saat ini pemerintah selalu melakukan peninjauan mengenai jumlah masyarakat miskin karena mengurangi ketergantungan masyarakat miskin kepada bantuan yang diberikan. Berikut merupakan kondisi kemiskinan Non-Konsumsi di Kabupaten Mojokerto.

A. Bidang Ketenagakerjaan

Kemiskinan menurut beberapa ahli dipicu oleh adanya pengangguran. Pengangguran mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebab tidak memiliki pendapatan. Kabupaten Mojokerto memiliki persentase penduduk



miskin yang tidak bekerja sebesar 37,14% pada tahun 2022. Persentase tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu 47,02%.

Tabel 4. 17 Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Bekerja dan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Mojokerto

Karakteristik Ketenagakerjaan	2020	2021	2022
Status Bekerja			
Tidak Bekerja	43,39	47,02	37,14
Bekerja di Sektor Informal	36,1	30,41	34,35
Bekerja di Sektor Formal	20,51	22,57	28,5
Lapangan Pekerjaan			
Tidak Bekerja	43,39	47,02	37,14
Bekerja di Sektor Pertanian	17,97	16,74	20,46
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	38,64	36,24	42,4

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto, 2022

Berdasarkan status bekerja penduduk miskin kabupaten Mojokerto, terdapat penurunan pekerja di sektor informal pada tahun 2021 yang diikuti oleh peningkatan jumlah pekerja di sektor formal dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerja sektor informal yang pindah bekerja ke sektor formal ataupun tidak bekerja kembali. Sementara itu berdasarkan lapangan pekerjaan, pada tahun 2022 penduduk miskin di kabupaten Mojokerto memiliki persentase pekerjaan terbesar pada sektor diluar pertanian sebesar 42,4%.

Tabel 4. 18 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

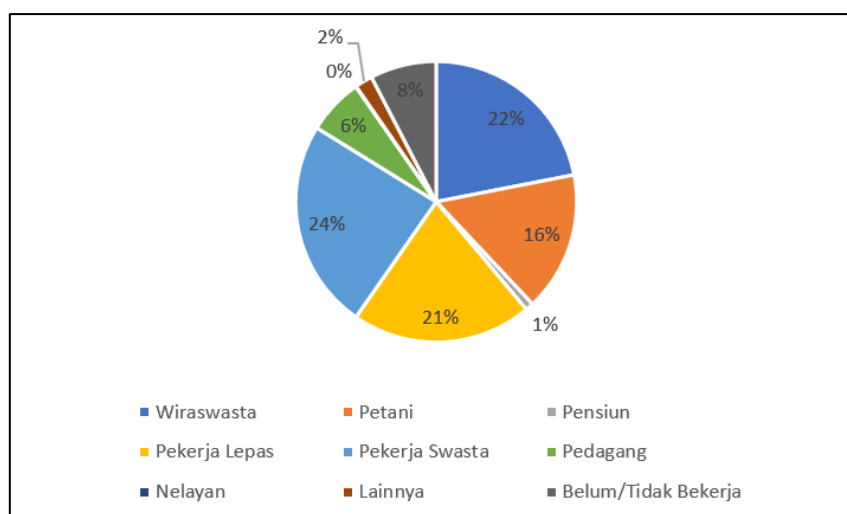
No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga								
		Wiraswasta	Petani	Pensiun	Pekerja Lepas	Pekerja Swasta	Pedagang	Nelayan	Lainnya	Belum/ Tidak Bekerja
1	Bangsalsari	2378	885	176	3418	2651	673	3	390	686
2	Dawarblandong	2378	5651	53	1033	1395	785	18	177	347
3	Dlanggu	3516	2842	173	2945	2535	1389	13	280	1234
4	Gedeg	1659	541	276	2984	3810	726	7	255	1308
5	Gondang	3040	2666	79	2066	1413	771	4	169	674
6	Jatirejo	2550	1506	119	3888	1527	1037	3	303	1118
7	Jetis	2274	2372	113	2696	7173	1003	14	354	1042
8	Kemlagi	2333	2417	96	2753	4118	907	8	191	1725
9	Kutorejo	4050	4040	142	2308	4212	888	16	327	1248
10	Mojoanyar	842	644	133	3523	3054	789	2	202	937
11	Mojosari	5579	1114	184	3001	3767	1041	3	441	1412
12	Ngoro	3801	2800	101	3555	7402	1057	11	310	1508
13	Pacet	3561	5766	100	1982	2247	864	13	255	744
14	Pungging	5225	3026	126	2880	5523	1125	5	380	1624



No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga								
		Wiraswasta	Petani	Pensiun	Pekerja Lepas	Pekerja Swasta	Pedagang	Nelayan	Lainnya	Belum/Tidak Bekerja
15	Puri	3403	1433	220	3252	5021	1282	5	488	1328
16	Sooko	2774	425	135	5666	2704	1019	4	330	1159
17	Trawas	1364	2084	48	1229	2243	399	9	125	458
18	Trowulan	6560	1737	153	5049	2333	1146	13	321	1338
Kabupaten Mojokerto		57287	41949	2427	54228	63128	16901	151	5298	19890

Sumber: Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga penduduk miskin di kabupaten Mojokerto memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta sebesar 63.129 kepala keluarga atau sekitar 24% dari total kepala keluarga dan diikuti oleh wiraswasta sebesar 22% atau 57.287 kepala keluarga. Namun sebanyak 19.891 kepala keluarga atau sekitar 8% masih berada di keadaan tidak/belum bekerja. Berikut merupakan persentase jenis pekerjaan kepala keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 4. 8 Persentase Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

Sumber : Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

B. Bidang Pendidikan

Pendidikan dapat membantu seseorang untuk berkembang melalui ilmu yang didapat. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan dapat membantu penduduk di bawah garis kemiskinan untuk dapat berkembang dan keluar dari garis kemiskinan. Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam tingkat kesejahteraan penduduk terbukti dengan digunakannya angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Penduduk miskin di



Kabupaten Mojokerto sendiri dalam 5 tahun terakhir memiliki tamatan jenjang pendidikan yang makin meningkat. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan tamatan SLTA ke atas sebesar 31,13% setelah sebelumnya berada di 25,93% pada tahun 2021. Selain itu terjadi juga penurunan penduduk miskin yang tidak tamat SD menjadi 13,38%.

Tabel 4. 19 Karakteristik Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf					
15-24 tahun	100	100	100	100	98,15
15-55 tahun	98,54	100	99,33	97,86	98,65
Angka Partisipasi Sekolah					
7-12 tahun	100	100	100	100	94,01
13-15 tahun	98,54	100	99,33	97,86	98,21
Pendidikan yang ditamatkan					
Tidak tamat SD	18,54	19,54	21,67	19,12	12,38
Tamat SD dan SLTP	62,17	57,36	50,28	54,96	55,49
Tamat SLTA ke atas	19,29	23,11	28,05	25,93	31,13

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Tabel 4. 20 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

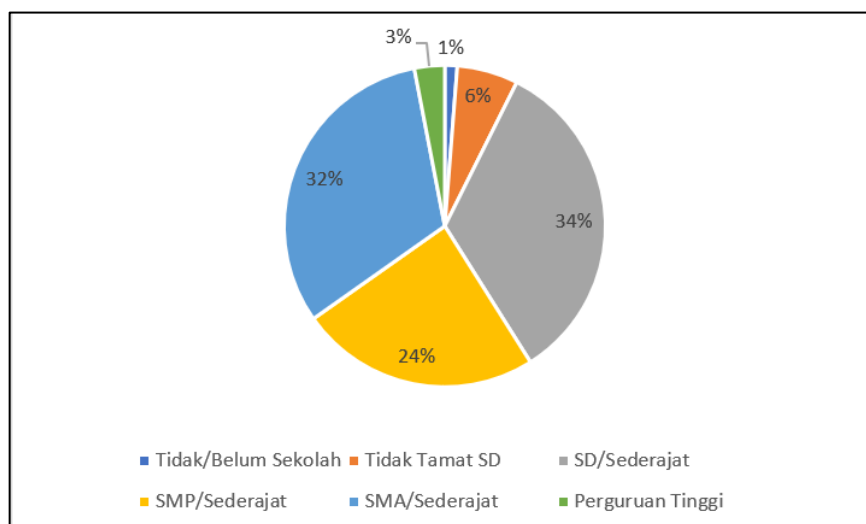
No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Bangsals	97	498	2833	2934	4450	448
2	Dawarbladong	148	972	4917	2655	2826	319
3	Dlanggu	138	1077	4460	4035	4659	558
4	Gedeg	131	552	3312	2524	4704	343
5	Gondang	90	786	4262	2863	2610	271
6	Jatirejo	137	779	5006	2898	2815	396
7	Jetis	155	791	5215	4216	4252	351
8	Kemlagi	291	1153	5249	3512	4039	304
9	Kutorejo	152	1060	5726	4372	5364	557
10	Mojoanyar	112	425	3084	2284	3934	287
11	Mojosari	150	915	4319	3973	6541	644
12	Ngoro	784	1930	6032	4261	7023	515
13	Pacet	210	1058	6588	3753	3520	403
14	Punggging	255	1135	6297	4697	6921	609
15	Puri	67	480	5270	4256	5805	554
16	Sooko	79	521	4117	3367	5443	690
17	Trawas	102	586	3358	1606	2138	171
18	Trowulan	139	1225	7165	4467	5170	484
Kabupaten Mojokerto		3237	15943	87210	62673	82214	7904

Sumber: Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Pada tabel diatas terdapat data mengenai tingkat pendidikan kepala keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto. Tingkat pendidikan kepala keluarga miskin di Kabupaten



Mojokerto di dominasi oleh lulusan SD/ sederajat. Terlihat bahwa tingkat pendidikan SD/ sederajat memiliki total 87.210 jiwa atau 32% dari total kepala keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto. Menyusul jumlah tamatan SMA/ sederajat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 82.214 jiwa atau sebesar 32%. Namun masih terdapat 7% kepala keluarga yang belum menempuh pendidikan dan tidak menamatkan pendidikan di tingkat SD dan Kecamatan Ngoro menjadi kecamatan dengan kepala keluarga miskin yang memiliki tingkat pendidikan belum menamatkan SD dan tidak/ belum bersekolah dengan total 2.714 kepala keluarga. Berikut merupakan persentase tingkat pendidikan kepala keluarga miskin Kabupaten Mojokerto.



Gambar 4. 9 Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

Sumber : Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

C. Bidang Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia dimana Angka Harapan Hidup menjadi salah satu faktornya. Sehingga menyebabkan kesehatan memiliki pengaruh terhadap produktivitas seseorang. Produktivitas yang rendah dapat menyebabkan individu tersebut terjebak dalam kemiskinan yang akhirnya akan menimbulkan kesulitan bagi individu tersebut untuk memenuhi kebutuhannya (Isroviyah, 2022). Akibatnya akan muncul masalah-masalah kesehatan baru salah satunya adalah stunting. Stunting merupakan keadaan dimana terganggunya pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada jangka waktu yang lama. Menurut Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Mojokerto



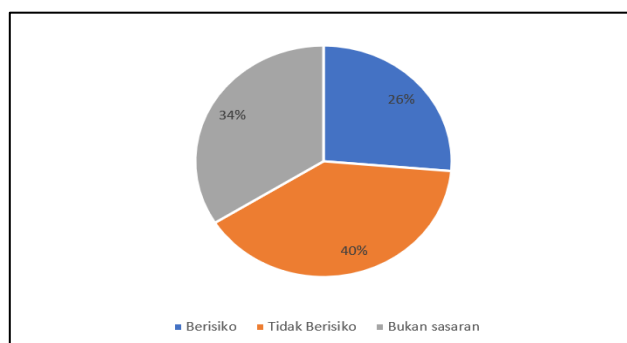
sendiri telah berhasil menurunkan angka *stunting* dari yang sebelumnya berada di angka 27.4% di tahun 2021 menjadi 11,6% pada tahun 2022.

Tabel 4. 21 Risiko Stunting Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Risiko Stunting		
		Berisiko	Tidak Berisiko	Bukan sasaran
1	Bangsals	3191	4076	3994
2	Dawarbladong	2445	4814	4578
3	Dlanggu	3659	6359	4909
4	Gedeg	3236	4911	3419
5	Gondang	2896	4776	3210
6	Jatirejo	3704	4935	3412
7	Jetis	5021	5607	6413
8	Kemlagi	3428	6471	4649
9	Kutorejo	4069	6805	6357
10	Mojoanyar	3107	3840	3179
11	Mojosari	4374	6988	5180
12	Ngoro	5741	8004	6799
13	Pacet	3837	6450	5245
14	Pungging	4519	8239	7156
15	Puri	4451	6022	5959
16	Sooko	4624	4965	4627
17	Trawas	1474	3241	3244
18	Trowulan	5065	7289	6296
Kabupaten Mojokerto		68841	103792	88626

Sumber: Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Saat ini hampir 40% atau 103.792 keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto tercatat tidak berisiko *stunting* dan 34% bukan menjadi sasaran *stunting*. Keluarga yang memiliki risiko *stunting* sendiri berada di angka 68.841 keluarga atau 26% dari total keluarga miskin dengan Kecamatan Trowulan menjadi kecamatan dengan keluarga miskin berisiko *stunting* terbanyak di Kabupaten Mojokerto. Namun walaupun demikian, tetap dilakukan berbagai pencegahan dan inovasi untuk mencapai Kabupaten Mojokerto Zero *Stunting*. Berikut merupakan persentase risiko *stunting* di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 4. 10 Persentase Risiko Stunting Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

Sumber : Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022



Selain angka stunting, derajat kesehatan masyarakat dapat di pengaruhi oleh keberadaan sarana dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan Kabupaten Mojokerto dalam Angka tahun 2023, seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto telah terlayani oleh sarana kesehatan khususnya puskesmas, puskesmas pembantu dan apotik.

Tabel 4. 22 Persebaran Sarana Kesehatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Jatirejo	-	-	-	1	4	3
2	Gondang	1	-	-	1	4	3
3	Pacet	1	-	3	3	3	3
4	Trawas	2	-	1	1	2	2
5	Ngoro	2	-	2	2	4	3
6	Pungging	-	-	2	2	3	5
7	Koturejo	-	-	1	2	3	4
8	Mojosari	3	-	7	2	2	7
9	Bangsals	1	-	2	1	2	2
10	Mojoanyar	1	-	3	1	3	3
11	Dlanggu	1	-	1	1	3	2
12	Puri	1	1	6	1	3	7
13	Trowulan	-	-	3	2	2	4
14	Soko	2	-	1	1	3	7
15	Gedek	1	1	1	2	3	5
16	Kemlagi	3	-	2	-	2	3
17	Jetis	-	-	3	2	3	4
18	Dawar Blandong	-	-	1	1	3	4
Total		19	2	39	26	52	71

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2023

D. Bidang Infrastruktur Permukiman

Infrastruktur merupakan salah satu aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi. Bahkan infrastruktur dapat menjadi faktor penentu atas pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang akan dibahas lebih lanjut saat ini adalah mengenai rumah tinggal khususnya pada penduduk miskin. Berikut merupakan kondisi rumah tinggal keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 23 Kondisi Rumah Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Kondisi	
		RTLH	RLH
1	Bangsals	43	11217
2	Dawarbladong	804	11033
3	Dlanggu	187	14740
4	Gedek	71	11495
5	Gondang	376	10506
6	Jatirejo	615	11435
7	Jetis	489	16552
8	Kemlagi	1309	13239
9	Kutorejo	147	17084



No	Kecamatan	Kondisi	
		RTLH	RLH
10	Mojoanyar	42	10084
11	Mojosari	97	16445
12	Ngoro	302	20242
13	Pacet	349	15183
14	Pungging	159	19755
15	Puri	73	16359
16	Sooko	168	14048
17	Trawas	9	7950
18	Trowulan	500	18150
Kabupaten Mojokerto		5740	255517

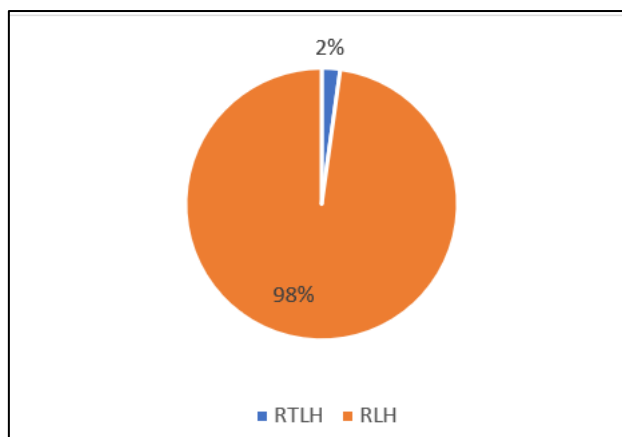
Sumber: Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Berdasarkan data P3KE, di Kabupaten Mojokerto terdapat 2% atau 5740 keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dimana mayoritas RTLH tersebut masih menggunakan material yang tidak layak seperti bambu yang digunakan sebagai dinding dan lantai yang masih berupa tanah. RTLH terbanyak berada di Kecamatan Kemlagi sebanyak 1309 rumah dari total 14.548 rumah yang dihuni oleh penduduk miskin di Kecamatan Kemlagi.



Gambar 4. 11 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di (a) Desa Beratkulon, Kec Kemlagi (b) Desa Kedungsari, Kec. Kemlagi dan (c) Desa Watusumpak, Kec. Trowulan Tahun 2023.

Berikut merupakan persentase kondisi rumah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto. Kualitas rumah huni dan fasilitas sanitasi semakin baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni, dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya



Gambar 4. 12 Persentase Kondisi Rumah Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

Sumber : Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Selain masih terdapat rumah yang tidak layak huni, masih terdapat pula keluarga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Sebanyak 10991 keluarga atau 4% dari seluruh keluarga miskin masih belum memiliki jamban pribadi dan menggunakan jamban bersama. Selain itu masih terdapat 2% atau 5.339 keluarga yang memiliki jamban tanpa septik tank. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan yang mengharuskan ketersediaan fasilitas sanitasi di setiap rumah. Pada Kabupaten Mojokerto sendiri Kecamatan Ngoro menjadi kecamatan dengan keluarga dengan akses sanitasi yang kurang sesuai terbesar yaitu sebanyak 1.652 keluarga yang memakai jamban bersama atau tidak memiliki septik tank.

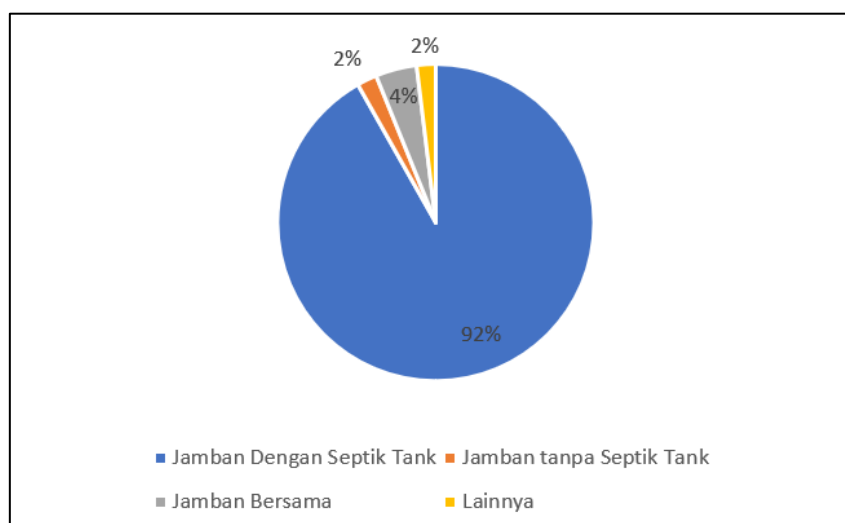
Tabel 4. 24 Ketersediaan Akses Terhadap Sanitasi Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Kondisi Sanitasi			
	Jamban Dengan Septik Tank	Jamban tanpa Septik Tank	Jamban Bersama	Lainnya
Bangsals	10123	521	445	171
Dawarbladong	11393	242	167	35
Dlanggu	13617	93	689	528
Gedeg	10713	192	630	31
Gondang	9330	322	781	449
Jatirejo	9601	161	1204	1085
Jetis	16347	180	466	48
Kemlagi	13434	238	643	233
Kutorejo	16403	191	437	200
Mojoanyar	8709	469	683	265
Mojosari	15501	265	636	140
Ngoro	18626	697	955	267
Pacet	13869	766	580	317
Pungging	18639	295	488	492



Kecamatan	Kondisi Sanitasi			
	Jamban Dengan Septik Tank	Jamban tanpa Septik Tank	Jamban Bersama	Lainnya
Puri	15797	147	319	169
Sooko	13104	94	793	225
Trawas	7889	58	8	4
Trowulan	16768	408	1067	407
Total	239863	5339	10991	5066

Sumber: Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022



Gambar 4. 13 Persentase Akses Terhadap Sanitasi Keluarga Miskin Kabupaten Mojokerto

Sumber : Sinkronisasi Data P3KE dengan DTKS, 2022

Kualitas infrastruktur yang berpengaruh terhadap kemiskinan dapat dilihat pula dari kualitas dan ketersediaan sumber air bersih, fasilitas sanitasi dan penerangan listrik. Berikut adalah data perkembangan fasilitas tersebut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4. 25 Persentase Capaian Fasilitas Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2022

Indikator Fasilitas Perumahan	Tahun		
	2020	2021	2022
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	44,70	41,67	58,34
Sumur Bor/Pompa, sumur terlindungi	46,20	39,28	58,24
Jamban sendiri	85,37	88,63	91,07
Tempat pembuangan akhir tinja dengan tangki septik	96,67	91,34	95,25
Sumber penerangan listrik	100	100	100

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto 2022 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto, 2022.



Gambar 4. 14 Kondisi Sumber Air Sumur dan Ledeng di Desa Kedungsari, Kec Kemlagi

Data perkembangan fasilitas permukiman tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah, mengindikasikan bahwa ada upaya peningkatan kualitas kebersihan dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni, dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

E. Bidang Sosial

Kesejahteraan sosial menurut PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, merupakan kondisi yang patut diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan baik material, spritual sosial agar dapat hidup layak dan dapat mengembangkan dirinya sendiri. Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial sendiri dapat berupa penelantaran anak, anak jalanan, gelandangan, pemulung dan sebagainya. Kabupaten Mojokerto sendiri telah memiliki program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dimana pada tahun 2021 terdapat 116.683 permasalahan sosial yang telah di selesaikan. Pada tahun 2021 telah ditangani sebanyak 163 jiwa penduduk lanjut usia yang terlantar, selain itu terdapat 9 permasalahan gelandangan yang telah diselesaikan di tahun 2021 dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

Tabel 4. 26 Penanganan Penyandang Masalah Sosial Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	0	0
2	Anak Terlantar	Jiwa	0	0
3	Anak yang Behadapan dengan Hukum	Jiwa	0	0
4	Anak Jalanan	Jiwa	10	9
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	0	0
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	0	0
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jiwa	50	50
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	100	163



No	Uraian	Satuan	2020	2021
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa	25	82
10	Tuna Susila	Jiwa	11	17
11	Gelandangan	Jiwa	10	9
12	Pengemis	Jiwa	0	0
13	Pemulung	Jiwa	5	5
14	Kelompok Minoritas	Jiwa	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan Masyarakat	Jiwa	0	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	0	0
17	Korban Penggunaan NAPZA	Jiwa	0	0
18	Korban Trafficking	Jiwa	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	5	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	0	0
21	Korban Bencana Alam	KK	1520	1376
22	Korban Bencana Sosial	Jiwa	5	5
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	15	12
24	Keluarga Fakir Miskin	Jiwa	129644	114948
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Jiwa	0	0
26	Komunitas adat terpencil	KK	0	0
	Jumlah		131400	116683

Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto, 2023

4.2.4 Analisis Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Analisis Penyebab Kemiskinan Kabupaten Mojokerto digunakan untuk mengidentifikasi apa saja penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Analisis ini dilakukan dengan mengkompilasi data kualitas sumber daya manusia, kondisi kemiskinan konsumsi, kondisi kemiskinan non konsumsi. Hal-hal yang dapat disimpulkan dari identifikasi data tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Indeks Pembangunan Manusia Meningkat
- 2) Indeks Pembangunan Gender Meningkat dan Mendekati 100
- 3) Indeks Pemberdayaan Gender Meningkat
- 4) Garis Kemiskinan Meningkat
- 5) Jumlah Penduduk Miskin Menurun
- 6) Indeks Keparahan Kemiskinan (Gap) Menurun
- 7) Persentase Penduduk Miskin Tidak Bekerja Menurun
- 8) Jumlah Pekerja Sektor Informal Menurun



- 9) Jumlah Pekerja Sektor Formal Meningkat
- 10) Jumlah tamatan SLTA ke atas meningkat
- 11) Jumlah penduduk miskin yang tidak tamat SD Menurun
- 12) Jumlah RTLH Menurun

Dari 12 identifikasi data tersebut, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tren kesejahteraan Kabupaten Mojokerto menjadi lebih baik pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2022 telah berjalan dengan cukup baik, sehingga arahnya adalah program-program tersebut dapat tetap dilaksanakan sebagai upaya menekan angka kemiskinan sampai 0%.

Selain itu, untuk menelaah lebih mendalam penyebab kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, hasil interpretasi data sekunder tersebut kemudian dikonfirmasi dengan hasil temuan wawancara yang telah dilakukan, dengan sasaran informan sebagai berikut.

1. Bappeda Kab. Mojokerto
2. Badan Pusat Statistik Kab. Mojokerto
3. Dinas Sosial Kab. Mojokerto
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto
5. Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto
6. Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto
7. Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto
8. Kepala/ Perangkat Desa Beratkulon, Kec. Kemlagi
9. Kepala/ Perangkat Desa Japanan, Kec. Kemlagi
10. Kepala/ Perangkat Desa Kedungsari, Kec. Kemlagi
11. Kepala/ Perangkat Desa Mojojajar, Kec. Kemlagi
12. Kepala/ Perangkat Desa Mojopilang, Kec. Kemlagi
13. Kepala/ Perangkat Desa Wonorejo, Kec. Trowulan
14. Kepala/ Perangkat Desa Temon, Kec. Trowulan
15. Kepala/ Perangkat Desa Pakis, Kec. Trowulan
16. Kepala/ Perangkat Desa Trowulan, Kec. Trowulan
17. Kepala/ Perangkat Desa Watesumpak, Kec. Trowulan



Hasil wawancara kemudian ditranskripsi dan dirumuskan dalam bentuk kode-kode untuk mempermudah interpretasi penelitian. Tahap Coding yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Open Coding*, yaitu memberi kode pada statement/opini penting dari informan.
2. *Axial Coding*, yaitu mengelompokkan tiap statement menjadi tema besar.

Proses coding menghasilkan 402 quotes/statements yang dikelompokkan dalam 42 kode. Berikut merupakan tabel perumusan kode identifikasi kondisi dan permasalahan penyebab kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Tabel 4. 27 Proses Perumusan Kode Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Pembahasan	Kode	Ukuran/ Keterangan	Sumber
Masalah	Seluruh permasalahan	Masalah	Seluruh fenomena yang menyebabkan atau memperparah kondisi kemiskinan, termasuk fenomena yang tidak mengubah kondisi menjadi lebih baik.	Wawancara 2023
	Hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan penyaluran program pengentasan kemiskinan.	Hambatan Program	Hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan penyaluran program pengentasan kemiskinan.	Wawancara 2023
Rekayasa/ Respon	Seluruh upaya/ tanggapan/ respon terhadap masalah	Respon	Seluruh respon/ tanggapan/ reaksi/ program/ langkah yang telah dilakukan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik, termasuk untuk mengurangi/ menghapus hal-hal yang menjadi masalah.	Wawancara 2023
	Rencana pengentasan kemiskinan mendatang	Rencana	Seluruh respon/ tanggapan/ reaksi/ program/ langkah yang diharapkan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik, termasuk untuk mengurangi/ menghapus hal-hal yang menjadi masalah.	Wawancara 2023
Kondisi Kemiskinan	Kondisi Kemiskinan masih tetap atau menurun sedikit dari tahun sebelumnya	Kondisi Kemiskinan	kemiskinan berkurang ... kemiskinan bertambah	Wawancara 2023
	Penyebab Kemiskinan menurut asumsi informan	Penyebab	faktor/ isu penyebab kemiskinan	Wawancara 2023
	Dampak Manfaat/ perubahan setelah dilakukan program pengentasan kemiskinan	Dampak Manfaat Program	tetap miskin ... sedikit berkurang ... signifikan	Wawancara 2023
Bantuan Sosial	Jenis Bantuan	Bantuan Sosial	nama bantuan sosial	Wawancara 2023
	Prosedur penyaluran bantuan	Prosedur	tahap pelaksanaan dan penyaluran bantuan	Wawancara 2023
	Bantuan terkait Stunting	Bantuan Stunting	nama bantuan terkait pencegahan dan pengurangan stunting	Wawancara 2023
	Bantuan terkait Kemiskinan Ekstrem	Bantuan KE	nama bantuan terkait pencegahan dan penanganan Kemiskinan Ekstrem	Wawancara 2023
	Bantuan kurang tepat sasaran	Bantuan kurang tepat sasaran	Tidak tepat sasaran ... sesuai sasaran	Kajian 2022 Wawancara 2023
	Bantuan bersifat insidental	Bantuan Insidental	Insidental... rutin	Kajian 2022



Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Pembahasan	Kode	Ukuran/ Keterangan	Sumber
				Wawancara 2023
	Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas	Bantuan Terbatas	Terbatas ... tidak terbatas	Kajian 2022
	Bantuan Tidak Tepat Waktu	Bantuan Tidak Tepat Waktu	terlambat diberikan Tepat waktu/ sesuai jadwal	Wawancara 2023
Pelatihan Kerja	Program pelatihan kerja yang sudah dilakukan	Pelatihan Kerja	Nama/ jenis pelatihan kerja yang sudah dilakukan	Wawancara 2023
	Keterbatasan program pelatihan kerja	Keterbatasan Program Pelatihan	Terbatas ... tidak terbatas	Kajian 2022
Kapasitas Masyarakat	Pendapatan rendah dan tidak tetap	Produktivitas Masy Rendah	Rendah ... tinggi	Wawancara 2023
	Produktifitas masyarakat yang rendah	Produktivitas Masy Rendah	Kemampuan rendah ... tinggi/sesuai kualifikasi yg dibutuhkan	Kajian 2022
	Rendahnya tingkat pendidikan	Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah ... Perguruan Tinggi	Wawancara 2023
	Rendahnya edukasi finansial warga dan pengelolaan keuangan	Edukasi Finansial	Tidak mengerti ... mengerti	Wawancara 2023
	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	Tidak tahu ... tahu	Kajian 2022
Kultur	Terdapat kultur/ kebiasaan masyarakat yang kurang baik: Konsumtif/ Boros, Malas, Pasrah, Mudah iri/cemburu	Kultur	Konsumtif ... tidak konsumtif	Interpretasi 2023
			Malas ... tidak malas	Wawancara 2023
			Pasrah ... bersemangat	
			Mudah iri/cemburu Tidak mudah iri/ cemburu	
			Boros ... tidak boros	
Pekerjaan	Akses Pekerjaan Rendah	Akses Pekerjaan	Rendah ... selalu tersedia	Kajian 2022
	Pekerjaan tidak tetap	Pekerjaan tidak tetap	Tidak tetap ... tetap	Wawancara 2023
	Ketimpangan pendapatan	Ketimpangan pendapatan	Miskin ... tidak miskin	Kajian 2022
				Wawancara 2023



Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Pembahasan	Kode	Ukuran/ Keterangan	Sumber
Pendanaan	Investasi Terhambat	Hambatan investasi	terhambat ... tidak terhambat	Kajian 2022
	Pemanfaatan industri dibatasi	Hambatan investasi	industri terbatas ... tidak terbatas	Wawancara 2023
	Alokasi Dana Kurang Memenuhi	Alokasi Dana	Kurang, terbatas ... cukup	Interpretasi 2023
	Modal Usaha Terbatas	Modal Usaha Terbatas	Terbatas ... tidak terbatas	Wawancara 2023
Bencana/ Kejadian luar biasa	Pengangguran karena pandemi	Pandemi Covid-19	Pengangguran ... tidak terpengaruh pandemi	Interpretasi 2023
Kelembagaan dan Regulasi	Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan	Monitoring	Tidak ada ... ada	Kajian 2022
	Program tidak sinkron dan sinergis	Kelembagaan dan Regulasi	Tidak ada... ada	Wawancara 2023
	Batasan Regulasi Perizinan dan UMR	Kelembagaan dan Regulasi	Tidak ada... ada	Kajian 2022
	Kolaborasi/ Koordinasi dengan bidang lain	Kelembagaan dan Regulasi	Bentuk kolaborasi/ koordinasi dengan bidang lain	Wawancara 2023
Pendataan	Kriteria penerima bantuan	Kriteria Penerima	Syarat dan kriteria penerima bantuan/ kategori miskin	Interpretasi 2023
	Penetapan kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan kultur dan standar dari pusat	Kriteria rancu	Berbeda ... Sama	Wawancara 2023
	Pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda	Data, Pelaporan, Kajian	Data tidak baik ... data baik	Wawancara 2023
Fisik Wilayah	Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	Guna Lahan	Tidak ada perlakuan khusus ... ada	Wawancara 2023
Sarana Prasarana	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	Sarana Prasarana	Tidak tersedia.... Tersedia	Interpretasi 2023
	Kualitas Rumah Buruk	Sarana Prasarana	Buruk... baik	Wawancara 2023
Kualitas Kesehatan	Terdapat Disabilitas dan Lansia	Disabilitas dan Lansia	Terdapat disabilitas/lansia ... tidak ada disabilitas/lansia	Wawancara 2023
	Terdapat anak yang terindikasi stunting	Stunting	Terdapat anak stunting ... tidak ada anak stunting	Wawancara 2023



Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Pembahasan	Kode	Ukuran/ Keterangan	Sumber
	Kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan	Edukasi Kesehatan	kurang sadar ... sadar	Wawancara 2023
	Program Kesehatan Kurang terjangkau seluruh masyarakat	Program Kesehatan	Kurang terjangkau ... terjangkau	Wawancara 2023

Sumber: Analisis, 2023.

Dari hasil proses coding tersebut, maka akan diseleksi Kembali permasalahan yang menyebabkan kemiskinan masih terjadi di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2023. Berikut adalah hasil penyaringan kode yang terfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan tersebut.

Tabel 4. 28 Daftar Permasalahan Kemiskinan Kab Mojokerto.

Fenomena/ Tema Besar	Permasalahan/ Penyebab	Kode
Bantuan Sosial	Bantuan kurang tepat sasaran	Bantuan kurang tepat sasaran
	Bantuan bersifat insidental	Bantuan Insidental
	Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas	Bantuan Terbatas
	Bantuan Tidak Tepat Waktu	Bantuan Tidak Tepat Waktu
Pelatihan Kerja	Keterbatasan program pelatihan kerja	Keterbatasan Program Pelatihan
Kapasitas Masyarakat	Pendapatan rendah dan tidak tetap	Produktivitas Masy Rendah
	Produktifitas masyarakat yang rendah	Produktivitas Masy Rendah
	Rendahnya tingkat pendidikan	Tingkat Pendidikan
	Rendahnya edukasi finansial warga & pengelolaan keuangan	Edukasi Finansial
	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja
Kultur	Terdapat kultur/ kebiasaan masyarakat yang kurang baik: Konsumtif/ Boros, Malas, Pasrah, Mudah iri/cemburu	Kultur
Pekerjaan	Akses Pekerjaan Rendah	Akses Pekerjaan
	Pekerjaan tidak tetap	Pekerjaan tidak tetap
	Ketimpangan pendapatan	Ketimpangan pendapatan
Pendanaan	Investasi Terhambat	Hambatan investasi
	Pemanfaatan industri dibatasi	Hambatan investasi
	Alokasi Dana Kurang Memenuhi	Alokasi Dana
	Modal Usaha Terbatas	Modal Usaha Terbatas
Bencana/ Kejadian luar biasa	Pengangguran karena pandemi	Pandemi Covid-19
Kelembagaan dan Regulasi	Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan	Monitoring
	Program tidak sinkron dan sinergis	Kelembagaan dan Regulasi
	Batasan Regulasi Perizinan dan UMR	Kelembagaan dan Regulasi
Pendataan	Penetapan kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan kultur dan standar dari pusat	Kriteria rancu
	Pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda	Data, Pelaporan, Kajian
Fisik Wilayah	Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	Guna Lahan
Sarana Prasarana	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	Sarana Prasarana
	Kualitas Rumah Buruk	Sarana Prasarana
Kualitas Kesehatan	Terdapat Disabilitas dan Lansia	Disabilitas dan Lansia
	Terdapat anak yang terindikasi stunting	Stunting
	Kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan	Edukasi Kesehatan
	Program Kesehatan Kurang terjangkau seluruh masyarakat	Program Kesehatan

Sumber: Analisis, 2023.

Keterangan:

: Kajian 2022 dan Wawancara 2023

: Wawancara 2023



Berikut adalah uraian dan penjelasan dari masing-masing masalah sesuai dengan tema besarnya.

A. Bantuan Sosial

A.1 Bantuan kurang tepat sasaran

Bantuan kurang tepat sasaran banyak terjadi di beberapa desa. Pemerintah desa diharapkan dapat terjun langsung dalam penilaian masyarakat dengan kriteria miskin untuk penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Dengan ditambah dengan menyamakan kriteria penentuan keluarga miskin dengan harapan bantuan lebih tepat sasaran.

“ kendala si pasti ada, yang menjadi penyebab adalah LSM yang mengkritik kalau bantuan tidak tepat sasaran”

“ Harapan saya setidaknya bantuan itu harus jelas sasaran, karena terkadang dari pemerintah desa hanya mengikuti permintaan dan selama ini telah tersalurkan”

“ terus begini Mbak terkadang sudahlah usia, sudahlah rumahnya kurang layak, tetapi di dalamnya asetnya juga ada, di situ loh nggak bisa mengelola atau tidak bisa memanfaatkan aset ada yang rumahnya bagus, tapi hanya itu saja yang dipunya, kalau kita kriteria sampai detail itu kita agak sulit, rumahnya jelek, orangnya sudah tua, pendidikannya rendah, tapi asetnya ratusan juta, asetnya itu tapi tidak bisa mengelola, nah kita kan sulit kalau melihat indikator orang miskin di beberapa item, nggak ada semuanya “

“ kalau dilihat sepintas sih di sini itu banyak yang rumahnya bagus-bagus, masih muda, Rumahnya bagus tapi ekonominya pas-pasan nggak kerja nggak dapat apa-apa, itu banyak. Ada yang rumahnya jelek, orangnya tua, tapi asetnya masih punya sawah punya apa itu masih ada, bantuan kan diberikan ke yang tua tadi, ya kan nggak mungkin yang muda, itu kendalanya di situ, agak sulit kalau kita mengikuti kriteria, kita sendiri yang tahu kesehariannya, repot, nggak dikasih itu nggak pantes, dikasih itu asetnya dihitung-hitung sama yang bagus hanya rumahnya saja tapi kalau tidak bekerja ya susah, yang tua itu nggak kerja setahun masih bisa makan karena punya aset. kita hanya perbandingan sebagai bahan nanti di pimpinan ini loh permasalahannya tidak semudah yang kita lihat di lapangan, belum tentu, Harapan kita pihak surveyor kan sering ikut survei-survei, harapannya jawabannya yang cocok kalau nggak ya udah nggak, Iya ya Iya, cuman yang di lapangan sendiri kan tidak bisa makanya aku kalau terlanjur Gimana mau dimasukin Ya gimana Rumahnya bagus, gak dimasukin Ya dia nggak bisa makan, pas-pasan kemarin kan posisinya kadang kalau dimasukan yang yang sini iri. harus analisa sendiri itu repot”

A.2 Bantuan bersifat insidental



Pemerintah memberikan bantuan yang bersifat insidentil kepada warga yang terdampak di masa pandemi. Bantuan yang diberikan dapat berupa jaminan kesehatan bagi korban yang terdampak pandemi, pemberian sembako, bantuan dalam bentuk tunai. Terdapat pula bantuan insidentil seperti ketika terjadi kenaikan BBM diberikan bantuan berupa uang dan juga barang.

“ Di era covid kemarin terkait bantuan bantuan sosial. Apalagi masa masa kelamnya kita itu ya covid.”

“ Jadi ada bantuan pada waktu covid waktu itu ada padat karya itu anggaran itu dari Kementerian yang harus di diberdayakan.”

“ tergantung kegiatannya, kalau masker kan sudah tidak”

“ sesuai dengan event-event tertentu. Misalnya kemarin saat kenaikan BBM bantuannya kemarin kita berupa uang, berupa barang. “

“ bantuan sosial tunai juga ada sejak covid masih berjalan hanya saja belum ada penyaluran lagi untuk tahun ini kalo dulu tiap bulan frekuensinya tapi sekali keluar biasanya dirapel, misal BPNT itu untuk sekian bulan”

“ ada juga bantuan BLT DD dimulai dari tahun 2020 untuk keluarga terdampak covid. “

“ BST yang provinsi itu lama sudah tidak keluar tapi kalau Desa masih tetap jalan cuma dikurangi kan kemarin covid covid sekarang kan covid sudah tidak seberapa terus Dikurangi jumlahnya. “

A.3 Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas

Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas masih sering terjadi ketika bantuan yang bersifat insidentil. Desa telah melakukan updating data tetapi jumlah bantuan datang sesuai dengan jumlah dan data lama. Hal ini menimbulkan permasalahan dengan warga karena warga mau mendapatkan semua bentuk bantuan padahal setiap bantuan memiliki kriteria tersendiri untuk penerimanya.

“ nah kebetulan Kalau di kami itu tanpa melihat status mbak Ya, mungkin kalau misalnya anggaran saya cukup 100 orang dan di situ ada balita kurang Gizi sebanyak 100 orang atau 120 orang, berarti kan kurang 20 ya mungkin itu nanti prioritas yang diberikan. Mungkin itu yang kurang mampu dulu gitu ya gitu.”

“sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan permohonannya.”

“ Cuma itu kan berdasarkan pengajuan. Hanya saja yang turun siapa sajakan kita tidak tahu “



“ Satu harus tergabung di kelompok tani, lalu setiap anggota memiliki kuota seberapa besar lahan pekerjaannya dan pupuk itu terbatas artinya harus dapat sekian harus setor KTP di toko-toko yang bertanda khusus”

“ Kendalanya paling bantuan kan sifatnya mendadak, kita sudah oerbarui data tetapi yang turun datanya masih data lama. Sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan warga. Apalagi kadang orang maunya dapat semua bantuan. Lalu kita kan mengaplikasikan bantuan dari atas tidak bisa saklek sesuai dengan dari atas. “

“ kemarin kita telah menganggarkan BLT untuk keluarga ekstream 10% dari dana desa dan sudah tersalurkan bantuannya dari januari hingga Maret,”

“ kalau untuk bidang kesehatan ada fogging, pmt untuk balita dan ibu hamil untuk mnecegah stunting dan pmt untuk balita stunting, dan pemerian bantuan untuk posyandu lansia hanya saja masih minim”

“ Ada Cuma kecil dan masih berjalan, tidak semua hanya Sebagian “

A.4 Bantuan Tidak Tepat Waktu

Bantuan tidak tepat waktu merupakan salah satu kendala yang terjadi, hal ini disebabkan karena bisa jadi data dari desa yang kurang cepat dalam updating data. Sehingga bantuan tidak tepat waktu karena menunggu updating data dari desa.

“ kendala tentu ada, terkadang bantuan tersebut tidak cair tepat waktu tetapi akan ada operator desa yang membantu mengenai hal tersebut.”

B. Pelatihan Kerja

B.1 Keterbatasan program pelatihan kerja

Keterbatasan program pelatihan kerja terjadi di Kabupaten Mojokerto karena minimnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat sehingga tuntutan untuk menjalankan pelatihan 30hari sesuai dengan standar harus dipangkas waktunya.

“ Jadi kita pangkas waktu.Dan ini yang kita sering dapat komplain dari LSP harusnya jalankan pelatihan 30 hari sesuai dengan standar. Pemberian kompetensi ini yang kita dapat sering dapat dikurangi karena itu.”

“ Pelatihan itu dibuka terus setiap waktu atau ada di ada waktunya pak.”

“ mohon dibantu dalam pebciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Karena banyak yang telah lulus tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bisa juga bantuan workshop dan pembinaan yang lain.”

C. Kapasitas Masyarakat

C.1 Pendapatan rendah dan tidak tetap



Pendapatan rendah dan tidak tetap merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan yang tidak tetap membuat pendapatan setiap kepala keluarga menjadi rendah dan tidak tetap. Fenomena rumah yang layak huni dan dapat terbilang cukup bagus namun pemilik rumah tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang rendah menjadikan mereka masuk dalam data keluarga miskin.

“tapi dia kategorinya itu harusnya memang dia enggak punya dia, misalnya tukang becak. Tapi karena anaknya mampu jadi itu rumahnya dibangun. Padahal aslinya enggak ada apa apa ya rumah tok yang diperbaiki. Pemilik rumah pendapatannya masih dibawah rata-rata begitu. nah Itu kan juga termasuk untuk mendukung. Itu kan orang Miskin.”

C.2 Produktifitas masyarakat yang rendah

Penggalian potensi yang dimiliki masyarakat desa yang cenderung kurang membuat produktifitas masyarakat pun rendah. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang bervariasi karena mayoritas petani juga merupakan penyebab produktifitas masyarakat rendah.

“kan perusahaan juga enggak mau rugi dong, ambil sembarang orang. Iya kalau bisa kerja bisa kerja, kan kaya beli kucing dalam karung.”

“Karena kebanyakan memang yang tidak berpenghasilan.”

“ya dan juga dari data disnaker, kita lihat dari data HRD pabrik dan di cocokan apakah masuk DTKS atau tidak. Dan hanya yang bekerja sebagai buruh, bukan manajer dan sebagainya.”

“Untuk pekerjaan mayoritas itu buruh tani”

“Kalau bisa desa ini digali potensinya “

“Masyarakat temon dulu rata2 penncetak batu bata merah tapi sejak ada perubahan ke bata putih atau bata ringan sehingga mereka kehilangan pekerjaan karena kalah saing. Karena pemasarannya agak lambat sehingga karyawannya dibatasi atau dikurangi yang dulunya mencapai 100 tenaga kerja sekarang mungkin hanya 30an tenaga kerja.”

C.3 Rendahnya tingkat pendidikan

Pola pikir masyarakat apabila pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan formal. Saat ini dinas pendidikan selalu melakukan pendataan apabila terlihat ada yang tidak melanjutkan bangku sekolah maka akan dicari datanya kemana mereka melanjutkan pendidikannya. Kondisi saat ini khususnya di Kabupaten Mojokerto, siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan formal ke SMP kebanyakan akan melanjutkan pendidikan dengan pesantren



(mondok). Rendahnya tingkat pendidikan ini dapat menyebabkan kemiskinan karena semakin sedikit lapangan pekerjaan apabila semakin rendah tingkat pendidikannya.

“ Masyarakat yang tidak proaktif, atau justru pola pikir masyarakat yang mengabaikan pendidikan misalnya ? kalau kita bicara data, data siswa SD yang melanjutkan SMP itu, ternyata ada beberapa mungkin sampai ratusan, itu kita gali kemana mereka yang tidak melanjutkan ke SMP. Ternyata kebanyakan mondok. intinya kalau nggak sekolah ya mondok. Kalau terkait pola pikir yang lama itu saya rasa sudah hampir tidak ada. Justru kebanyakan orang tua atau anak sekarang kalau tidak sekolah itu malah malu.”

“ Terus tidak dapat bekerja, kita arahkan untuk bersekolah lagi sampai kuliah. Jangan sampai dia menjadi faktor sumbangsih terbesar tingkat penganggur terbuka. Jangan sampai mereka penganggur.”

“ Kalau yang menghambat itu biasanya orang kekurangtahuan orang orang. Ya kan orang orang desa kan. Kadang kadang ada yang dia itu Pendidikannya memang sudah sudah ngerti lah”

“ Kalau Pendidikan diupayakan ya sampai SMA, paling satu dua saja yang SMP karena dirinya sendiri yang tidak mau melanjutkan, ada juga yang setelah lulus langsung menikah.”

C.4 Rendahnya edukasi finansial warga dan pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Apabila di lihat lebih lanjut masyarakat memiliki beberapa aset yang apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan bagi kehidupan mereka. Rendahnya edukasi finansial warga menjadikan aset yang mereka miliki lama kelamaan akan habis tanpa adanya perputaran keuangan. Sehingga apabila aset terserbut habis maka mereka akan tergolong keluarga miskin kembali karena pendapatan yang rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.

“ Desa sudah maksimal mengupayakan masyarakat, masyarakatnya saja yang kurang paham itu kalau bagi saya. “

C.5 Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja

Beberapa desa yang terdapat industri dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa setempat. Tidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja membuat mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan setelah melakukan pekerjaan, yang mereka tahu hanya bekerja untuk mendapat upah saja. Mereka tidak pernah menuntut hak lainnya yang dapat menunjang gaji dan kehidupan mereka.



D. Kultur

D.1 Konsumtif/ Boros

Kebiasaan untuk membeli barang (konsumtif/boros) menjadi salah satu kebiasaan buruk masyarakat. Bantuan tunai yang didapatkan ternyata masih ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak yang dibelanjakan hal-hal yang habis pakai dan tidak terlalu diperlukan. Harapan dari pemerintah tentunya bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tertata untuk ekonomi keluarga mereka dapat mandiri.

“ Ya kalau setelah adanya bantuan-bantuan ya pasti ada perubahan. Namun balik lagi ke individu masing-masing. Kalau pemikirannya kedepan agar ekonominya bisa tertata ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau individu yang salah pasti pemanfaatannya ada yang langsung dibelikan yang tidak perlu. Sehingga memang kita harus memilih dengan baik agar tepat sasaran. Serta memberikan pengertian dan bekal bahwa bantuan ini bukan bantuan seumur hidup bahwa jika kalian sudah merasa mampu wajib melepaskan atau mengundurkan diri dari bantuan itu. Seharusnya memang dari pihak pemerintah ada peran untuk memberi pendampingan kepada masyarakat terkait hal tersebut, jadi kalo sudah mampu bantuan non tunainya dikurangi tinggal KIS (jaminan Kesehatan) nya saja.”

D.2 Malas

Sifat malas yang masih menjadi mindset masyarakat dapat membunuh karakter masyarakat. Harapan pemerintah dengan adanya bantuan mereka dapat memperbaiki taraf hidup dan menjadi keluarga mandiri untuk memenuhi kebutuhan.

“makanya kita berupaya untuk mengubah mindset masyarakat kita, karena bantuan itu membunuh karakter masyarakat kita juga, artinya kalau dibiarkan masyarakat itu menggantung pada adanya bantuan, pola pikir untuk memberdayakan dirinya sendiri itu mati, dia menggantung, ujung-ujungnya semisal pemerintah menghilangkan bantuan apa yang terjadi”

“ di desa diberi keterampilan kadang pelatihan-pelatihan itu ada tapi ya gitu aslinya itu tergantung orangnya kadang dikasih pelatihan Iya Iya Iya Iya ternyata terus Kurang semangat atau kurang apa ya kurang paham”

“ Merasa terbantu. Namun masyarakat masih merasa kurang.”

“ aslinya kaya tapi mengaku tidak mampu itu banyak di sini”

D.3 Pasrah

Sifat pasrah yang dimiliki masyarakat membuat mereka menyerah dengan keadaan hidup mereka. Mereka mulai tidak mau memperbaiki perekonomian dan akan selamanya menjadi warga miskin. Ketidakmauan untuk bekerja membuat mereka bergantung pada bantuan dari pemerintah dan orang lain saja.



“ untuk itu pasti akan berangsur-angsur membaik tetapi lebih baik tidak menerima bantuan karena jika selama 20 tahun pun diberikan bantuan ya tetap akan ketergantungan”

D.4 Mudah iri/cemburu

Pendataan keluarga miskin diharapkan dapat membuat bantuan tepat sasaran. Sifat iri dan cemburu apabila orang terdekatnya mendapat bantuan merupakan salah satu sifat buruk untuk orang akan ikut bergantung pada bantuan meskipun sebenarnya mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Untuk bantuan itu rawan sekali, jika satu dapat yang lain bisa iri.”

“ banyak yang iri mbak, karena seluruhnya ingin dapat. Harusnya ada pembaruan mbak tetapi kadang datanya masih yang lama walau sudah diperbaharui”

“ Iya itu pasti ada yang iri-irian terkait siapa yang menjadi penerima bantuan. Kadang ada yang ekonominya terbilang masih mampu tapi malah dianggap tidak mampu agar mendapat bantuan.”

“ Ya ada yang senang kalau dapat, tapi juga banyak yang iri juga krena dia tidak tercantum Namanya dalam program bantuan sosial. Tapi ya bagaimana lagi, kita hanya bisa mengusulkan sesuai siapa saja yang berhak menerima bantuan. “

“ Iya makanya kadang timbul gejolak dari situ, “ dia kok dapat? dia loh sama seperti aku”
begini begitu.. menghadapi orang banyak itu sulit”

E. Pekerjaan

E.1 Akses Pekerjaan Rendah

Akses pekerjaan rendah menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Lapangan pekerjaan yang kurang beragam dan serta ketersediaan lapangan yang masih minim mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“penyebab kemiskinan paling banyak adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit. Kami membutuhkan lapangan pekerjaan yang baru”

“Biasanya tu kebanyakan mayoritas petani ya, jadi otomatis orang yang membutuhkan pekerjaan untuk bertani itu berkurang, jadi lowongan pekerjaan lah intinya”

E.2 Pekerjaan tidak tetap

Pekerjaan masyarakat yang tidak tetap menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Salah satu contohnya adalah pekerjaan masyarakat sebagai buruh tani. Pekerjaan seperti buruh tani yang hanya bekerja disaat musim tanam dan panen menyebabkan pendapatan yang tidak menentu.

“Mayoritasnya buruh atau serabutan material, ada pengrajin patung juga. Tapi mayoritas memang petani”



“Untuk pekerjaan mayoritas itu petani dan buruh tani”

“mayoritas pekerjaan masyarakat di sini itu petani, petani palawija, bercocok tanam, padi, jagung, terus rongsokan, daur ulang”

E.3 Ketimpangan pendapatan

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dapat terlihat oleh ketimpangan pendapatan diantara warganya. Beberapa warga yang walaupun baik istri dan suaminya telah bekerja masih belum bisa memenuhi kebutuhannya akibat pendapatan yang masih belum mencukupi. Selain itu terdapat masyarakat yang tetap membutuhkan bantuan walau memiliki tempat tinggal yang layak disebabkan rumah yang ditempati merupakan pemberian

“Kalau di desa kami kan keduanya suami istri bekerja ya mbak, jadi pendapatannya bisa 8orb perhari. Dan untuk kebutuhan pasti tidak cukup”

“tapi dia kategorinya itu harusnya memang dia enggak punya dia, misalnya tukang becak. Tapi karena anaknya bisa jadi itu rumahnya dibangun karena anaknya itu seperti itu. Padahal aslinya nggak ada apa apa ya rumah tok yang menempati”

F. Pendanaan

F.1 Investasi Terhambat

Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih terjadi karena terhambatnya investasi di Kabupaten Mojokerto akibat pelarangan pendirian pabrik di daerah situs Majapahit. Dengan pembatasan pendirian pabrik tersebut menyebabkan terhambatnya investasi yang diterima oleh Kabupaten Mojokerto.

“60% petani, entah buruh tani entah petani di bidang pertanian, karena di Trowulan gak boleh ada pabrik”

F.2 Pemanfaatan industri dibatasi

Salah satu hal yang menyebabkan keadaan masyarakat miskin tidak dapat berkembang adalah masih adanya pembatasan pemanfaatan industri di Kabupaten Mojokerto khususnya di Trowulan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya regulasi yang membatasi keberadaan pabrik di Kecamatan Trowulan yang mengakibatkan mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai buruh tani.

“60% petani, entah buruh tani entah petani di bidang pertanian, karena di Trowulan gak boleh ada pabrik”



F.3 Alokasi Dana Kurang Memenuhi

Alokasi dana untuk beberapa program bantuan di Kabupaten Mojokerto masih belum memenuhi kebutuhannya. Pada beberapa dinas, alokasi dana yang kurang memenuhi ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan beberapa program bantuan. Tidak terpenuhinya alokasi dana ini juga menyebabkan beberapa operator desa terkadang tidak mendapat gajinya, disebabkan oleh gaji pegawai yang berasal dari PAD.

“kita misalnya penyusunan diawal itu masalahnya kekurangan anggaran, setelahnya tidak ada. Misal kita butuh anggaran untuk apa sekian tapi tidak direalisasikan gitu aja”

“Tapi terkadang karena anggaran kita press banget. Kadang kadang kita dapat teguran dari LSP. Kalau dari sisi peserta bener sih, minimal kita sudah 16. Tapi dari sisi waktu pelaksanaannya kadang kadang kita terhambat karena anggaran ini kecil”

F.4 Modal Usaha Terbatas

Salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto adalah terbatasnya modal usaha bagi beberapa warga. Contoh dari modal usaha yang terbatas ini dapat terlihat dari para petani yang kesulitan untuk mengelola sawahnya karena harga pupuk yang mahal.

“padahal kalau bidang tanah sawah tidak ada yang dikelola juga sama betul asetnya ada tapi untuk kebutuhan sehari-harinya sama saja begitu”

“Kalau dibilang cukup, dengan kondisi pupuk mahal membuat para petani risau. Kakau tidak bertani bagaimana mendapatkan pendapatan”

G. Bencana/ Kejadian luar biasa

Pengangguran karena pandemi

Pandemi Covid-19 yang sempat melanda menjadi salah satu hal yang mengakibatkan kemiskinan di kabupaten Mojokerto. Covid-19 menyebabkan adanya PHK karena pembatasan kegiatan yang dapat mengakibatkan perusahaan/usaha gulung tikar.

“... tapi setelah covid banyak yang di PHK”

H. Kelembagaan dan Regulasi

H.1 Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan

Untuk melihat keberhasilan program yang direncanakan diperlukan adanya pengawasan terhadap program bantuan. Pada Kabupaten Mojokerto sendiri pengawasan terhadap bantuan sosial masih perlu di tingkatkan sebab monitoring masih



belum dilakukan di seluruh desa dan jarang waktu untuk monitoring relatif lama. Untuk pengawasan program bantuan pada Disperindag sendiri terdapat survei mengenai peningkatan IKM untuk melihat apakah bantuan yang diberikan apakah membantu atau tidak.

“kalau monitoring itu dinkes kan punya kepanjangan tangan di puskesmas puskesmas kita punya 27 sanitarian kemudian setelah di desa desa kita punya juga kader kesehatan setiap desa. Dari situ nanti kita bekerja sama, katanya. Kemarin ketika kita mendata STBM untuk STBM 5 pilar, meskipun baru terdata beberapa desa, tapi kita tetap kerja sama sama kader”
“kalo gak 3 bulan sekali atau persemester kita monitoring”

H.2 Program tidak sinkron dan sinergis

Program bantuan terhadap masyarakat seringkali masih belum sinkron dan sinergis sehingga manfaat yang diberikan masih kurang maksimal bagi masyarakat miskin. Pada Disperindag sendiri belum ada program bantuan sosial bagi masyarakat miskin karena OPD fokus memfasilitasi IKM dan Dinas Ketenagakerjaan sendiri belum bisa memberikan bantuan sosial karena anggaran yang terbatas.

“Tapi mohon maaf untuk di disnaker karena memang anggaran kita tidak signifikan gede banget jadi dalam bentuk bantuan bantuan sosial itu kita enggak bisa memberikan”
“Tapi dari sisi waktu pelaksanaannya kadang-kadang kita terhambat karena anggaran ini kecil. Jadi kita pangkas waktu. Dan ini yang kita sering dapat komplain dari LSP harusnya jalankan pelatihan 30 hari sesuai dengan standar. Pemberian kompetensi ini yang kita dapat sering dapat dikurangi karena itu”

H.3 Batasan Regulasi Perizinan dan UMR

Batasan regulasi perizinan perusahaan yang belum mengatur penyerapan tenaga kerja lokal yang harus diserap mengakibatkan masih banyaknya pengangguran di Kabupaten Mojokerto. Tidak adanya regulasi yang mengatur hal tersebut mengakibatkan perusahaan seringkali menerima pendatang sehingga masyarakat sekitar bisa saja tidak mendapatkan pekerjaan.

“Jadi tidak pernah ada peraturan secara khusus yang mengatakan bahwa setiap perusahaan yang berdiri di wilayah Kabupaten Mojokerto harus menyerap tenaga kerja lokal. Tapi ada kebiasaan yang tidak tertulis. Biasanya dilakukan oleh perangkat desa”

I. Pendataan

I.1 Penetapan kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan kultur dan standar dari pusat



Salah satu penyebab kemiskinan masih terjadi Kabupaten Mojokerto adalah masih tidak sesuainya kriteria penerima bantuan dengan kultur dan standar dari pusat. Ketidaksesuaian kriteria ini menyebabkan adanya celah bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan bantuan walaupun memiliki kehidupan yang berkecukupan. Ketidaksesuaian kriteria ini juga seringkali menghambat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan karena tidak dipenuhinya kebutuhan administrasi yang diperlukan. Untuk mengurangi kejadian seperti ini, dinas terkait telah menyediakan pendamping bagi setiap bantuan sosial yang merangkap menjadi operator dan juga dilakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk melihat kesesuaian data.

“Kan kita juga sudah punya data P3KE itu. Secara pendapatan itu kan kemiskinan ekstrem sudah di sandingkan dengan data DTKS. Saya rasa data PK3E itu sudah valid. Kemarin temen-temen tznk sudah ke lapangan rumahnya seperti apa. Ternyata setelah di cek dilapangan itu kok nggak sesuai. Rumahnya bangunannya bagus kemudian pekerjaan nya ada yang PNS dan TNI tapo kok ttp dapet. Tapi di DTKS itu di saring lagi”

“kemarin juga saya berupaya membantu masyarakat, dimasukkan ke BLT juga rancu, yang iri tetangganya, sawahnya luas tapi dapat BLT juga”

1.2 Pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda

Pendataan penerima bantuan yang tidak baik mengakibatkan bantuan tidak dapat tersalurkan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendataan yang kurang baik ini disebabkan oleh kurangnya Sinkronisasi data dari sumber (yaitu desa). Kurangnya Sinkronisasi data pada desa ini menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan sehingga terjadi kesalahan sasaran bantuan. Di tingkatan dinas sendiri, data mengenai bantuan sosial akan terus diperbarui setiap bulannya melalui web SIKS-NG, dimana web tersebut juga melakukan pengecekan atas kesesuaian data.

“Untuk data mengenai kesehatan karena dari desa sendiri tidak dapat update data setiap bulan, terkadang yang membutuhkan lolos dan tidak dapat bantuan dan terlewat”

“untuk penurunan itu biasanya kalau kita dari data yang disini, itu biasanya selama 6 bulan terakhir ada penurunan, penurunannya karena disini banyak data identitas yang ganda, jadi yang dukcapilnya itu ganda, jadi harus memverifikasi ulang terhadap orang yang dapat (bantuan)”

“kendalanya gini kalau kita ada bantuan itu NIKnya sama yang kita usulkan double sama di dinas sosial itu, itu kan gini Mbak masyarakat itu kita jelaskan tapi beliaunya itu nggak paham, setelah dapat bantuan diminta lagi”



J. Fisik Wilayah

Keterbatasan Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trowulan disebabkan oleh adanya beberapa lokasi situs kebudayaan majapahit yang harus dijaga kelestariannya.

“... karena di Trowulan gak boleh ada pabrik”

K. Sarana Prasarana

K.1 Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana

Pada Kabupaten Mojokerto masih terdapat sarana dan prasarana yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah masih adanya rumah yang belum memenuhi kebutuhan jamban karena kondisinya yang masih berada di satu rumah walaupun memiliki KK yang berbeda.

“Ada pembangunan jalan rabat beton dan drainase lingkungan karena ada 40% belum tersentuh”

“Kadang setelah menikah tidak langsung pecah KK atau sudah pecah KK tapi masih 1 rumah.

Jadi kemarin waktu kami data harusnya dapat 4 jamban tapi kan masak di satu rumah ada 4 jamban kan nggak mungkin jadi ya kita buat 1 untuk 1 rumah”

K.2 Kualitas Rumah Buruk

Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH menjadi salah satu bukti masih terdapatnya masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto. Kualitas rumah yang buruk dapat menimbulkan penurunan kualitas kehidupan pada masyarakat miskin. Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki bantuan untuk memperbaiki RTLH, namun frekuensi bantuan jarang dan kuantitas bantuan masih kurang.

“Cuma ada bantuan yang dari koramil. Itupun hanya bantuan untuk memperbaiki fasad depan rumah saja Cuma ada material namun kuantitasnya hanya sedikit. Kalau bedah rumah ada sekitar 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada lagi”

L. Kualitas Kesehatan

L.1 Terdapat Disabilitas dan Lansia

Pada Kabupaten Mojokerto masih terdapat masyarakat difabel dan lansia. Masyarakat disabilitas dan lansia sendiri memiliki program bantuan tersendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Namun bantuan untuk



disabilitas dan lansia sendiri masih minim dan belum ada rencana lebih lanjut untuk tahun ini.

“Sebagian penerima bantuan ada yang sakit, cacat fisik, cacat mental”

“... pemberian bantuan untuk posyandu lansia hanya saja masih minim”

“Tahun kemarin ada (bantuan) stunting, disabilitas dan lansia. Tahun ini masih belum ada rencana lebih lanjut”

L.2 Terdapat anak yang terindikasi stunting

Salah satu yang menjadi indikator kemiskinan di Kabupaten Mojokerto adalah masih adanya anak yang terindikasi stunting. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya program yang memiliki sasaran utama anak yang terindikasi stunting.

“Tahun kemarin ada (bantuan) stunting, disabilitas dan lansia. Tahun ini masih belum ada rencana lebih lanjut”

“kalau untuk bidang kesehatan ada fogging, pmt untuk balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting dan pmt untuk balita stunting, dan pemerian bantuan untuk posyandu lansia hanya saja masih minim”

L.3 Kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan

Minimnya edukasi mengenai kesehatan diri mengakibatkan kurangnya kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan pada masyarakat miskin. Hal tersebut memperburuk keadaan dari masyarakat miskin karena hidup dengan kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan yang rendah.

“Kalau yang menghambat (program Kesehatan) itu biasanya orang kekurangtahuan orang orang.”

L.4 Program Kesehatan Kurang terjangkau seluruh masyarakat

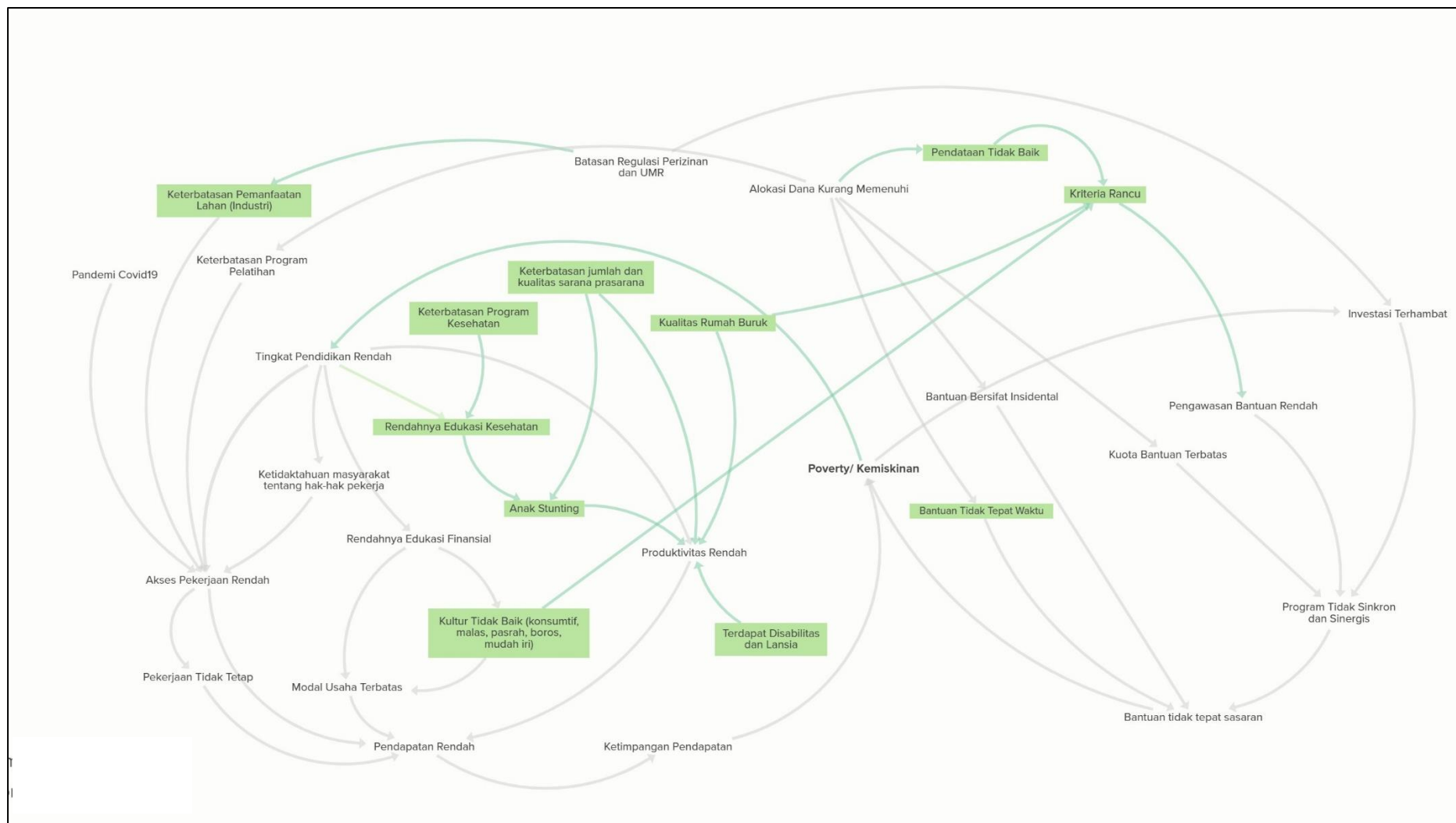
Permasalahan dalam pelaksanaan program kesehatan disebabkan oleh masih kurang terjangkaunya informasi mengenai program kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin berdasarkan dinas kesehatan. Masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi kesehatan ini merupakan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan kesehatan, sehingga program kesehatan kurang terjangkau seluruh masyarakat.

“Kalau yang menghambat (program Kesehatan) itu biasanya orang kekurangtahuan orang orang.”

“... dan pembserian bantuan untuk posyandu lansia hanya saja masih minim”



Dari hasil uraian permasalahan tersebut, terdapat benang merah tiap penyebab dan permasalahan kemiskinan. Untuk mempermudah penggambaran hubungan antar masalah tersebut, maka selanjutnya hasil temuan divisualisasikan dalam bentuk skema Poverty Trap/ Jebakan Kemiskinan yang dilengkapi dengan garis hubungan kausal (sebab-akibat) untuk menyimpulkan hasil penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah tambahan skema hubungan tersebut berdasarkan hasil transkrip wawancara yang telah dilakukan.



Gambar 4. 15 Poverty Traps Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
Sumber : Analisis, 2023.

4.3 Identifikasi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto

Tujuan SDGs pertama adalah pengentasan kemiskinan, untuk tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan program serta kebijakan untuk menunjang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Upaya penanganan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dapat diwujudkan dengan menjalankan program-program yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat miskin berupa bantuan insidental pada saat Covid-19 berupa bantuan tunai dan BLT DD untuk keluarga terdampak Covid. Bantuan KE dan Sosial berupa BPNT, BPUM namun berhenti di tahun 2020, bantuan modal untuk bekerja bagi masyarakat kemiskinan ekstrim. Bantuan kesehatan dalam bentuk PBI yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak dapat membayar iuran BPJS selama 3-6 bulan berturut-turut. Berikut merupakan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto sesuai OPD pelaksana utamanya.

Tabel 4. 29 Tabel Daftar Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto

No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
1	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2017	Masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar di DTKS	Jiwa	Kementerian Sosial	RPJMD Wawancara, 2023
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	2007	Rumah tangga yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Kementerian Sosial	RPJMD Wawancara, 2023
3	Program Indonesia Pintar (PIP)	2014	Siswa SD dan SMP memiliki KIP	Jiwa	Kemendikbud	RPJMD Wawancara, 2023
4	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS)	2005	Seluruh Murid SD dan SMP Negeri serta Swasta	Jiwa	Kemendikbud	RPJMD Wawancara, 2023
5	Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	2015	Permukiman kumuh	Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	RPJMD Wawancara, 2023
6	BOSDA PAUD	2005	Tenaga Pendidik	Jiwa	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023
7	BOSDA SD	2005	Tenaga Pendidik	Jiwa	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023
8	BOSDA SMP	2005	Tenaga Pendidik	Jiwa	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023
9	BOS SDN se Kab. Mojokerto	2005	Tenaga Pendidik	Jiwa	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023
10	BOS SMPN se Kab. Mojokerto	2005	Tenaga Pendidik	Jiwa	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
11	Peningkatan Imunisasi	2020	Balita usia imunisasi	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
12	Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	2020	Semua masyarakat	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
13	Peningkatan ASI Eksklusif Kabupaten Layak Anak	2020	Seluruh Ibu dan Bayi	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
14	Pembina dan Pengembangan Desa Siaga	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
15	Penyediaan Obat Gizi Penguatan Intervensi Stunting (DAK)	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
16	Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	2020	Ibu Hamil	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023, RAT 2023
17	Pelayanan Kesehatan Lansia	2020	Lansia	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023, RAT 2023
18	Penurunan Stunting	2020	Remaja dan Ibu Hamil	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
19	Revitalisasi Posyandu dan UKBM	2020	Balita	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023, RAT 2023
20	Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Daerah	2022	Masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS 3 bulan atau lebih	Jiwa	Dinas Kesehatan	LP2KD
21	Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BOP) PBI Daerah	2022	Masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS 3 bulan atau lebih	Jiwa	Dinas Kesehatan	LP2KD
22	Pelayanan JKN FKTP UPT Puskesmas se Kab, Mojokerto	2020	Masyarakat pemilik kartu JKN	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
23	Pelayanan kesehatan Baik Kegiatan Promotif/ preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif dalam rangka penanganan COvid-19 melalui pengadaan alat kesehatan habis pakai (DBHCHT)	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
24	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dalam rangka penanganan covid-19 melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
25	Pelayanan Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Dinas Kesehatan	LP2KD
26	BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2020	Seluruh Masyarakat		Dinas Sosial	LP2KD
27	BOP Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	2020	Rumah tangga	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
	(PAMSIMAS)		dengan sumber air minum tak terlindungi			
28	BOP Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	2020	Rumah dengan kondisi RTLH	Unit	Dinas Sosial	RKPD 2023
29	Fasilitasi dan Pendampingan PKH	2020	Rumah tangga yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Dinas Sosial	LP2KD
30	Fasilitasi dan Pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) Jasa dan E. Warung	2020	Rumah tangga yang memiliki usaha	Jiwa	Dinas Sosial	LP2KD
31	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)	2020	Masyarakat tidak mampu yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Dinas Sosial	LP2KD
32	Verifikasi dan Validasi data BPJS Daerah (Kisda)	2020	Masyarakat yang terdaftar BPJS	Jiwa	Dinas Sosial	LP2KD
33	Pendampingan lanjut usia terlanter	2020	Masyarakat lansia yang tidak memiliki keluarga	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
34	Penanggulangan dan pemberdayaan pengemis dan gelandangan	2020	Masyarakat dengan pendapatan utama berasal dari mengemis serta gelandangan	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
35	Penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan	2020	Anak jalanan	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
36	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	2020	Rumah dengan kondisi RTLH	Unit	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023
37	Pembinaan Para penyandang disabilitas	2020	Masyarakat penyandang disabilitas	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
38	Pemberdayaan dan bimbingan keterampilan bagi pemulung	2020	Masyarakat dengan pendapatan utama dari memulung	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
39	Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna	2020	Pemuda-pemudi desa	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
40	Pemberian bantuan LKSA	2022	Anak-anak terlanter yang masih dapat di asuh oleh keluarga	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
41	Bimbingan ketrampilan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi(WRSE)	2020	Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
42	Pemberdayaan fakir miskin	2020	Fakir miskin	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
43	Penanganan balita, anak terlanter dan adopsi	2020	Balita dan anak terlanter	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
44	Pelatihan ketrampilan tata boga bagi eks trauma korban tindak kekerasan/human trafficking	2020	Seluruh masyarakat dengan riwayat trauma tindak kekerasan	Jiwa	Dinas Sosial	RKPD 2023
45	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP	2020	Masyarakat dengan keahlian	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023, RAT 2023
46	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebaran informasi bursa tenaga kerja	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023, RAT 2023
47	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraan pameran kesempata kerja (job fair)	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
48	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023, RAT 2023
49	Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
50	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM)	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
						LP2KD
51	Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial	2020	Managemen industri	Unit	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023, RAT 2023
52	Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, terna bagi masyarakat melalui bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
53	Pengembangan desa mandiri pangan	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023, RAT 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
54	Pemberdayaan usaha kelompok lahan kering	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
55	Pemantauan dan penanganan daerah rawan pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023, RAT 2023
56	Pemantauan dan updating harga pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
57	Penguatan cadangan pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
58	Pemberdayaan KWT dalam rangka peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
59	Fasilitas produk pangan olahan unggulan	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
60	Pengembangan usaha budidaya kolam terpal	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
61	Penyediaan sarana produksi kelompok usaha bersama bidang perikanan	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
62	Peningkatan perekonomian keluarga melalui pengembangan pekarangan pangan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
63	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan organik	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
64	Peningkatan konsumsi pangan sehat dan diversifikasi pangan melalui pekarangan pangan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
65	Penyediaan sarana produksi perikanan budidaya	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
66	Pemberdayaan unit pembenihan rakyat	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
67	Pemberdayaan pelaku usaha poklalsar	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
68	Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan pengembangan alat pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan untuk masyarakat/kelompok masyarakat	2020	Kelompok tani, budidaya, dan peternak	Kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
69	Pembinaan desa/kelurahan bersih dan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Lingkungan Hidup	RKPD 2023
71	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah industri melalui penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan	2020	Industri	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
72	Peningkatan kapasitas TAPI-PKK Kab. Mojokerto	2020	Kepala keluarga	Unit	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD 2023
73	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD 2023
74	Pembinaan dan fasilitas BUMDesa	2020	Kecamatan	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD 2023
75	Pembinaan pasar desa	2020	Pedagang pasar desa	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD 2023
76	Pembinaan dan pelestarian aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan	2020	Pedagang pasar desa	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
77	Pembinaan & pengelolaan keuangan UPK PPK Mandiri	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
78	Pelestarian & Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
79	Pendampingan penguatan desa binaan kabupaten mojokerto	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
						RKPD 2023
80	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil kurang mampu	2020	Ibu hamil kurang mampu	Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RKPD 2023
81	Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RKPD 2023
82	Pembinaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
83	Pendataan dan pengolahan data keluarga	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RKPD 2023
84	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pembedayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	2020	Perempuan dan anak	Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RKPD 2023
85	Kegiatan fasilitas klinik bisnis koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
86	Kegiatan fasilitas penumbuhan wira usaha baru	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
87	Kegiatan fasilitas peningkatan produktivitas usaha mikro dan koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD, RAT 2023
88	Kegiatan pembinaan kinerja usaha simpan pinjam	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	RKPD 2023
89	Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
90	Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM)	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD, RAT 2023
91	Kegiatan fasilitas kerjasama antar koperasi, usaha mikro dan pelaku usaha	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
92	Kegiatan fasilitas pemasaran produk koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
93	Kegiatan penilaian kesehatan manajemen koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
94	Kegiatan fasilitas pembentukan koperasi baru	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
95	Kegiatan workshop peningkatan kapasitas pengelola koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	LP2KD
96	Kegiatan pembinaan koperasi berprestasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha mikro	RKPD 2023
97	Kegiatan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan RAT	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas koperasi dan usaha	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
					mikro	
98	Pembinaan usaha pariwisata	2020	Pemilik usaha pariwisata	Jiwa	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	RKPD 2023, LP2KD, RAT 2023
99	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	RKPD 2023, RAT 2023
100	Pelatihan kewirausahaan pemuda	2020	Anak muda Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	RKPD 2023
101	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	2020	Kelompok tani tembakau	kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
102	Peningkatan produksi tanaman padi melalui pelatihan tanam sistem jajar legowo	2020	Kelompok tani padi	Kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
103	Pengembangan kawasan tanaman jeruk	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
104	Peningkatan produksi tanaman cabai melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
105	Pengembangan pemberdayaan agensi hayati (P2AH)	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
106	Promosi atas hasil produksi pertanian	2020	Kelompok tani	kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023
107	Peningkatan kelembagaan petani	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	RKPD 2023 LP2KD
108	Peningkatan sumber daya penyuluhan pertanian lapangan	2020	Kelompok tani	kelompok	Dinas Pertanian	LP2KD
109	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	LP2KD
110	Penerapan budidaya tembakau yang baik	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	LP2KD
111	Pengembangan kawasan peternakan organik	2020	Kelompok tani	Kelompok	Dinas Pertanian	LP2KD
112	Fasilitas dan pembinaan pasar sehat	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
113	Operasionalisasi UPT Pasar	2020	UPT	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
114	Operasi pasar	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Pelaksana Utama	Ket Sumber
115	Pelatihan desain kemasan produk bagi IKM	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
116	Pembinaan dan pengawasan industri	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
117	Bimbingan dan fasilitas industri kecil menengah berwawasan lingkungan	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
118	Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha IHT skala kecil	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
119	Optimalisasi pedagang pasar tradisional	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
120	Peningkatan industri kecil pengrajin cor kuningan	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
121	Peningkatan industri kecil tekstil di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
122	Peningkatan produksi pengrajin alas kaki dan dompet di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
123	Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil kuliner di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
124	Peningkatan mutu dan kualitas tekstil dan tas di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
125	Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil bakery di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD
126	Peningkatan mutu dan kualitas jasa pertukangan dan service kendaraan di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	LP2KD

4.4 Analisis Capaian Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto

Analisis dan review capaian program membahas mengenai indikator yang tercapai, belum tercapai, dan indikator tidak ada pada berbagai program pengentasan kemiskinan yang disusun dalam beberapa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Masing-masing program kemudian akan disandingkan dengan hasil rumusan penyebab kemiskinan untuk mengetahui apakah penyebab tersebut sudah terakomodir oleh program yang telah dilaksanakan. Dampak serta manfaat yang dirasakan masyarakat miskin setelah mendapat bantuan dari pemerintah merasa sangat terbantu sekali. Perekonomian itu pasti akan berangsur-angsur membaik namun tetap harus dilakukan monitoring karena menyelesaikan masalah kemiskinan harus dari akarnya agar tidak terjadi ketergantungan. Berikut merupakan Tabel Capaian Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 30 Tabel Capaian Program Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto

No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
1	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2017	Masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar di DTKS	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Kementerian Sosial	RPJMD Wawancara, 2023
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	2007	Rumah tangga yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Kementerian Sosial	RPJMD Wawancara, 2023
3	Program Indonesia Pintar (PIP)	2014	Siswa SD dan SMP memiliki KIP	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	NA	NA	Kemendikbud	RPJMD Wawancara, 2023
4	Program Biaya Operasional Sekolah (BOS)	2005	Seluruh Murid SD dan SMP Negeri serta Swasta	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	NA	NA	Kemendikbud	RPJMD Wawancara, 2023
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				RPJMD Wawancara, 2023
5	Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	2015	Permukiman kumuh	Permukiman	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Kementerian Pekerjaan Umum	RKPD 2023, RAT 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023, RAT 2023
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				RKPD 2023, RAT 2023
					Kualitas Rumah Buruk				RKPD 2023, RAT 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
6	BOSDA PAUD	2005	Seluruh Murid PAUD	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan	RKPD 2023, RAT 2023
7	BOSDA SD	2005	Seluruh Murid SD Negeri serta Swasta	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan	RKPD 2023
8	BOSDA SMP	2005	Seluruh Murid SMP Negeri serta Swasta	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan	RKPD 2023
9	BOS SDN se Kab. Mojokerto	2005	Seluruh Murid SD Negeri serta Swasta	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan	RKPD 2023
10	BOS SMPN se Kab. Mojokerto	2005	Seluruh Murid SMP Negeri serta Swasta	Jiwa	Rendahnya taraf Pendidikan	100%	100%	Dinas Pendidikan	RKPD 2023
11	Peningkatan Imunisasi	2020	Balita usia imunisasi	Jiwa	Terdapat angka stunting	100%	100%	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
12	Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	2020	Semua masyarakat	Jiwa	Terdapat angka stunting	NA	89%	Dinas Kesehatan	RKPD 2023, RAT 2023
					Terdapat Disabilitas dan Lansia				RKPD 2023, RAT 2023
13	Peningkatan ASI Eksklusif Kabupaten Layak Anak	2020	Seluruh Ibu dan Bayi	Jiwa	Terdapat angka stunting	7819 bayi	6560 Bayi	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
14	Pembina dan Pengembangan Desa Siaga	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Terdapat angka stunting	NA	NA	Dinas Kesehatan	RKPD 2023, RAT 2023
					Terdapat Disabilitas dan Lansia				LP2KD
15	Penyediaan Obat Gizi Penguatan Intervensi Stunting (DAK)	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Terdapat angka stunting	NA	100%	Dinas Kesehatan	LP2KD
16	Pelayanan Jaminan Persalinan	2020	Ibu Hamil	Jiwa	Terdapat angka	NA	82%	Dinas	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
	(Jampersal) (DAK)				stunting			Kesehatan	
17	Pelayanan Kesehatan Lansia	2020	Lansia	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	84%	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
					Terdapat Disabilitas dan Lansia				RKPD 2023
18	Penurunan Stunting	2020	Remaja dan Ibu Hamil	Jiwa	Terdapat angka stunting	NA	100%	Dinas Kesehatan	LP2KD
19	Revitalisasi Posyandu dan UKBM	2020	Balita	Jiwa	Terdapat angka stunting	NA	100%	Dinas Kesehatan	LP2KD
					Terdapat Disabilitas dan Lansia				RKPD 2023, RAT 2023
20	Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Daerah	2022	Masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS 3 bulan atau lebih	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
21	Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BOP) PBI Daerah	2022	Masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS 3 bulan atau lebih	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Kesehatan	LP2KD
					Terdapat Disabilitas dan Lansia				LP2KD
					Terdapat angka stunting				LP2KD
22	Pelayanan JKN FKTP UPT Puskesmas se Kab, Mojokerto	2020	Masyarakat pemilik kartu JKN	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	100%	Dinas Kesehatan	LP2KD



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
23	Pelayanan kesehatan Baik Kegiatan Promotif/ preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif dalam rangka penanganan COvid-19 melalui pengadaan alat kesehatan habis pakai (DBHCHT)	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Pandemi Covid-19	100%	100%	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
24	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dalam rangka penanganan covid-19 melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Pandemi Covid-19	62 unit	62 uit	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
25	Pelayanan Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19	2020	Seluruh Masyarakat di masa Covid-19	Jiwa	Pandemi Covid-19	NA	NA	Dinas Kesehatan	RKPD 2023
26	BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2020	Seluruh Masyarakat		Kualitas Rumah Buruk	NA	NA	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023
27	BOP Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	2020	Rumah tangga dengan sumber air minum tak terlindungi	Jiwa	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	NA	90,74%	Dinas Sosial	RKPD 2023
28	BOP Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	2020	Rumah dengan kondisi RTLH	Unit	Produktivitas masyarakat rendah	NA	90,74%	Dinas Sosial	RKPD 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				RKPD 2023
					Kualitas Rumah Buruk				RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
29	Fasilitasi dan Pendampingan PKH	2020	Rumah tangga yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Sosial	RKPD 2023
30	Fasilitasi dan Pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) Jasa dan E. Warung	2020	Rumah tangga yang memiliki usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Sosial	RKPD 2023
31	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)	2020	Masyarakat tidak mampu yang terdaftar di DTKS	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Sosial	RKPD 2023
32	Verifikasi dan Validasi data BPJS Daerah (Kisda)	2020	Masyarakat yang terdaftar BPJS	Jiwa	Bantuan Kurang Tepat Sasaran	NA	NA	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023
					Kriteria Rancu				RKPD 2023, RAT 2023
33	Pendampingan lanjut usia terlanter	2020	Masyarakat lansia yang tidak memiliki keluarga	Jiwa	Terdapat Disabilitas dan Lansia	NA	163 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023
34	Penanggulangan dan pemberdayaan pengemis dan gelandangan	2020	Masyarakat dengan pendapatan utama berasal dari mengemis serta gelandangan	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	19 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023
					Rendahnya akses pekerjaan				RKPD 2023
					Pekerjaan tidak tetap				RKPD 2023
					Ketimpangan pendapatan				LP2KD
					Rendahnya taraf Pendidikan				RKPD 2023, RAT 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
35	Penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan	2020	Anak jalanan	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	19 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023, RAT 2023
					Pekerjaan tidak tetap				RKPD 2023
					Rendahnya taraf Pendidikan				RKPD 2023, RAT 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023
36	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	2020	Rumah dengan kondisi RTLH	Unit	Kualitas Rumah Buruk	100%	99,65%	Dinas Sosial	RKPD 2023
37	Pembinaan Para penyandang disabilitas	2020	Masyarakat penyandang disabilitas	Jiwa	Terdapat Disabilitas dan Lansia	NA	82 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023
					Produktivitas masyarakat rendah				LP2KD
38	Pemberdayaan dan bimbingan keterampilan bagi pemulung	2020	Masyarakat dengan pendapatan utama dari memulung	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	5 orang	Dinas Sosial	LP2KD
					Ketimpangan pendapatan				LP2KD
39	Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna	2020	Pemuda-pemudi desa	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	2 orang	Dinas Sosial	LP2KD
					Kultur tidak baik				LP2KD
40	Pemberian bantuan LKSA	2022	Anak-anak terlantar yang masih dapat di asuh oleh keluarga	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	353 org	283 org	Dinas Sosial	LP2KD
41	Bimbingan ketrampilan usaha bagi wanita rawan sosial	2020	Penyandang masalah	Jiwa	Produktivitas masyarakat	NA	7861 orang	Dinas Sosial	LP2KD



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
	ekonomi(WRSE)		kesejahteraan sosial		rendah				
					Rendahnya akses pekerjaan				LP2KD
					Pekerjaan tidak tetap				LP2KD
					Ketimpangan pendapatan				LP2KD
					Rendahnya taraf Pendidikan				RKPD 2023
42	Pemberdayaan fakir miskin	2020	Fakir miskin	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	114.948 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023
					Pekerjaan tidak tetap				RKPD 2023
					Rendahnya taraf Pendidikan				RKPD 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023
43	Penanganan balita, anak terlantar dan adopsi	2020	Balita dan anak terlantar	Jiwa	Terdapat Stunting	NA	5946 orang	Dinas Sosial	RKPD 2023
44	Pelatihan ketrampilan tata boga bagi eks trauma korban tindak kekerasan/human trafficking	2020	Seluruh masyarakat dengan riwayat trauma tindak kekerasan	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	15 orang	Dinas Sosial	LP2KD
					Rendahnya akses pekerjaan				LP2KD
					Pekerjaan tidak tetap				LP2KD
45	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP	2020	Masyarakat dengan keahlian	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	25%	Dinas Tenaga Kerja	LP2KD
					Rendahnya akses pekerjaan				RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
46	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	72%	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
					Rendahnya akses pekerjaan				RKPD 2023
47	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraan pameran kesempata kerja (job fair)	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Rendahnya akses pekerjaan	NA	72%	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
48	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	32 org	32 orang	Dinas Tenaga Kerja	RKPD 2023
					Rendahnya akses pekerjaan				RKPD 2023
49	Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	25%	Dinas Tenaga Kerja	LP2KD
					Rendahnya taraf Pendidikan				LP2KD
50	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM)	2020	Masyarakat usia kerja	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	LP2KD, RAT 2023
					Rendahnya taraf Pendidikan				RKPD 2023
51	Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial	2020	Managemen industri	Unit	Rendahnya akses pekerjaan	50 Kasus	30 Kasus	Dinas Tenaga Kerja	LP2KD
52	Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, terna bagi masyarakat melalui bantuan peralatan untuk usaha mandiri	2020	Kelompok tani	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD, RAT 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
	bagi masyarakat								
53	Pengembangan desa mandiri pangan	2020	Kelompok tani	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	100%	50%	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Produktivitas masyarakat rendah				LP2KD
54	Pemberdayaan usaha kelompok lahan kering	2020	Kelompok tani	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Produktivitas masyarakat rendah				LP2KD
55	Pemantauan dan penanganan daerah rawan pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	19 Desa	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Terdapat Stunting				RKPD 2023
56	Pemantauan dan updating harga pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	52 kegiatan	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
					Produktivitas masyarakat rendah				RKPD 2023, LP2KD, RAT 2023
57	Penguatan cadangan pangan	2020	Seluruh Masyarakat	Jiwa		300 ton / 8 kelompok	100 ton / 4 kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023, RAT 2023
58	Pemberdayaan KWT dalam rangka peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil	2020	Kelompok tani	Kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	10 kelompok	6 kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
					Rendahnya edukasi finansial				RKPD 2023
					Kultur tidak baik				RKPD 2023
59	Fasilitas produk pangan olahan unggulan	2020	Kelompok tani	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	28 kelompok 100 orang	13 kelompok	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana		50 orang		RKPD 2023
60	Pengembangan usaha budidaya kolam terpal	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				RKPD 2023
61	Penyediaan sarana produksi kelompok usaha bersama bidang perikanan	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	RKPD 2023
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				LP2KD
62	Peningkatan perekonomian keluarga melalui pengembangan pekarangan pangan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Modal Usaha Terbatas				LP2KD
63	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan organik	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Modal Usaha Terbatas				LP2KD
64	Peningkatan konsumsi pangan sehat dan diversifikasi pangan melalui pekarangan pangan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Modal Usaha Terbatas				LP2KD



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
65	Penyediaan sarana produksi perikanan budidaya	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
66	Pemberdayaan unit pembenihan rakyat	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Modal Usaha Terbatas	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
67	Pemberdayaan pelaku usaha poklahsar	2020	Kelompok budidaya	Kelompok	Rendahnya akses pekerjaan	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
68	Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan pengembangan alat pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan untuk masyarakat/kelompok masyarakat	2020	Kelompok tani, budidaya, dan peternak	Kelompok	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	NA	NA	Dinas Pangan dan Perikanan	LP2KD
					Modal Usaha Terbatas				LP2KD
69	Pembinaan desa/kelurahan bersih dan lestari	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	LP2KD
71	Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah industri melalui penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan	2020	Industri	Unit	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	LP2KD
72	Peningkatan kapasitas TAPI-PKK Kab. Mojokerto	2020	Kepala keluarga	Unit	Produktivitas masyarakat rendah	18 kecamatan	18 kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
73	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	12 kegiatan	12 kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
74	Pembinaan dan fasilitas BUMDesa	2020	Kecamatan	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	18 kecamatan	18 kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
75	Pembinaan pasar desa	2020	Pedagang pasar desa	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	15 Pasar	15 Pasar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
76	Pembinaan dan pelestarian aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan	2020	Pedagang pasar desa	Jiwa	Modal Usaha Terbatas	13 kegiatan	13 kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LP2KD
					Rendahnya edukasi finansial				LP2KD
77	Pembinaan & pengelolaan keuangan UPK PPK Mandiri	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Rendahnya edukasi finansial				
78	Pelestarian & Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Kultur tidak baik	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
79	Pendampingan penguatan desa binaan kabupaten mojokerto	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Kultur tidak baik	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Produktivitas masyarakat rendah				
80	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil kurang mampu	2020	Ibu hamil kurang mampu	Jiwa	Terdapat Stunting	NA	NA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
								Perempuan	
81	Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Kultur tidak baik	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
82	Pembinaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	378 kelompok	126 kelompok	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
					Rendahnya edukasi finansial				
83	Pendataan dan pengolahan data keluarga	2020	Seluruh masyarakat	Jiwa	Kriteria Rancu	495 orang	297 orang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
					Pendataan Tidak Baik				
84	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	2020	Perempuan dan anak	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	300 org	100 org	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
					Rendahnya				



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
					edukasi finansial			Perempuan	
					Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja				
85	Kegiatan fasilitas klinik bisnis koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	540 orang	420 orang	Dinas koperasi dan usaha mikro	
					Rendahnya edukasi finansial				
86	Kegiatan fasilitas penumbuhan wira usaha baru	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
					Rendahnya edukasi finansial				
87	Kegiatan fasilitas peningkatan produktivitas usaha mikro dan koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
					Rendahnya edukasi finansial				
88	Kegiatan pembinaan kinerja usaha simpan pinjam	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
89	Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
90	Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM)	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	350 orang	280 orang	Dinas koperasi dan usaha mikro	
91	Kegiatan fasilitas kerjasama antar koperasi, usaha mikro dan pelaku usaha	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
92	Kegiatan fasilitas pemasaran produk koperasi dan usaha mikro	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
93	Kegiatan penilaian kesehatan manajemen koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
94	Kegiatan fasilitas pembentukan koperasi baru	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
95	Kegiatan workshop peningkatan kapasitas pengelola koperasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
96	Kegiatan pembinaan koperasi berprestasi	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
97	Kegiatan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan RAT	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas koperasi dan usaha mikro	
98	Pembinaan usaha pariwisata	2020	Pemilik usaha pariwisata	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	40 peserta	40 peserta	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
					Rendahnya edukasi finansial				
					Rendahnya akses pekerjaan				
99	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Rendahnya edukasi finansial	NA	NA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
					Rendahnya akses pekerjaan				



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
100	Pelatihan kewirausahaan pemuda	2020	Anak muda Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	50 orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	
					Rendahnya edukasi finansial				
101	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	2020	Kelompok tani tembakau	kelompok	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	160 unit	25 unit	Dinas Pertanian	
					Modal Usaha Terbatas				
102	Peningkatan produksi tanaman padi melalui pelatihan tanam sistem jajar legowo	2020	Kelompok tani padi	Kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	320 orang	120 orang	Dinas Pertanian	
103	Pengembangan kawasan tanaman jeruk	2020	Kelompok tani	Kelompok	Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	5 Ha	3 Ha	Dinas Pertanian	
104	Peningkatan produksi tanaman cabai melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi	2020	Kelompok tani	Kelompok	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	4 Ha	2 Ha	Dinas Pertanian	
105	Pengembangan pemberdayaan agensi hayati (P2AH)	2020	Kelompok tani	Kelompok	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	8 Poktan	4 Poktan	Dinas Pertanian	
106	Promosi atas hasil produksi pertanian	2020	Kelompok tani	kelompok	Modal Usaha Terbatas	13 kali	6 Kali	Dinas Pertanian	
107	Peningkatan kelembagaan petani	2020	Kelompok tani	Kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	990 kelompok	360 kelompok	Dinas Pertanian	
					Rendahnya edukasi finansial				



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
					Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana				
108	Peningkatan sumber daya penyuluhan pertanian lapangan	2020	Kelompok tani	kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pertanian	
109	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau	2020	Kelompok tani	Kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pertanian	
					Rendahnya edukasi finansial				
110	Penerapan budidaya tembakau yang baik	2020	Kelompok tani	Kelompok	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Pertanian	
111	Pengembangan kawasan peternakan organik	2020	Kelompok tani	Kelompok	Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	NA	NA	Dinas Pertanian	
112	Fasilitas dan pembinaan pasar sehat	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
113	Operasionalisasi UPT Pasar	2020	UPT	Unit	Kurangnya Kolaborasi/ Koordinasi dengan bidang lain	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
114	Operasi pasar	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Kurangnya Kolaborasi/ Koordinasi dengan bidang lain	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
115	Pelatihan desain kemasan produk bagi IKM	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
116	Pembinaan dan pengawasan industri	2020	Pemilik usaha	Jiwa		NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
117	Bimbingan dan fasilitas industri kecil menengah berwawasan lingkungan	2020	Pemilik usaha	Jiwa		NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
118	Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha IHT skala kecil	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
119	Optimalisasi pedagang pasar tradisional	2020	Pedagang pasar	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
120	Peningkatan industri kecil pengrajin cor kuningan	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
121	Peningkatan industri kecil tekstil di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
122	Peningkatan produksi pengrajin alas kaki dan dompet di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



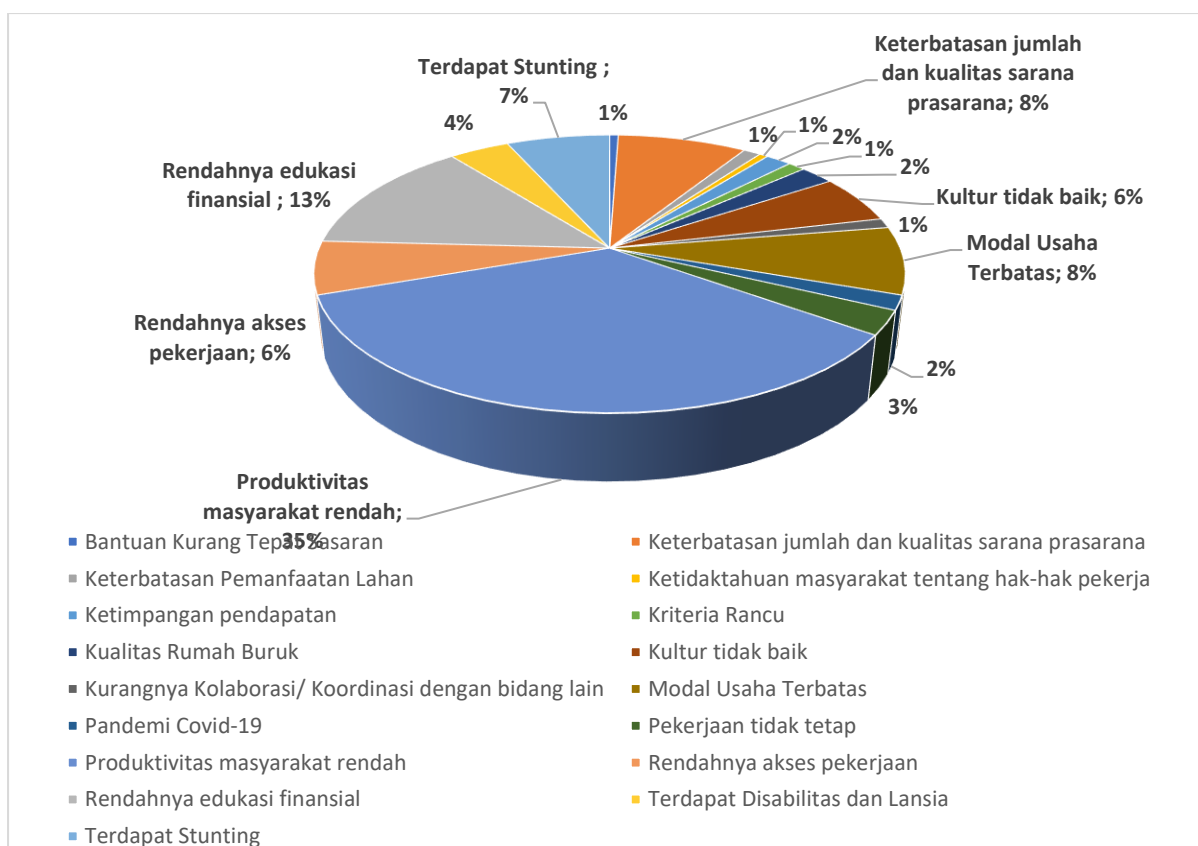
No	Kebijakan/program	Tahun	Baseline	Satuan	Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Target Program	Realisasi	Pelaksana Utama	Ket Sumber
123	Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil kuliner di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
124	Peningkatan mutu dan kualitas tekstil dan tas di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
125	Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil bakery di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
126	Peningkatan mutu dan kualitas jasa pertukangan dan service kendaraan di wilayah kabupaten mojokerto	2020	Pemilik usaha	Jiwa	Produktivitas masyarakat rendah	NA	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Tabel 4. 31 Persentase Sasaran/Penyebab Kemiskinan

Sasaran/ Penyebab Kemiskinan	Jumlah	%
Bantuan Kurang Tepat Sasaran	1	0,56
Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	15	8,43
Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	2	1,12
Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	1	0,56
Ketimpangan pendapatan	3	1,69
Kriteria Rancu	2	1,12
Kualitas Rumah Buruk	4	2,25
Kultur tidak baik	10	5,62
Kurangnya Kolaborasi/ Koordinasi dengan bidang lain	2	1,12
Modal Usaha Terbatas	14	7,87
Pandemi Covid-19	3	1,69
Pekerjaan tidak tetap	5	2,81
Produktivitas masyarakat rendah	62	34,83
Rendahnya akses pekerjaan	11	6,18
Rendahnya edukasi finansial	24	13,48
Terdapat Disabilitas dan Lansia	7	3,93
Terdapat Stunting	12	6,74
Total	178	100,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 16 Persentase Penyebab Kemiskinan

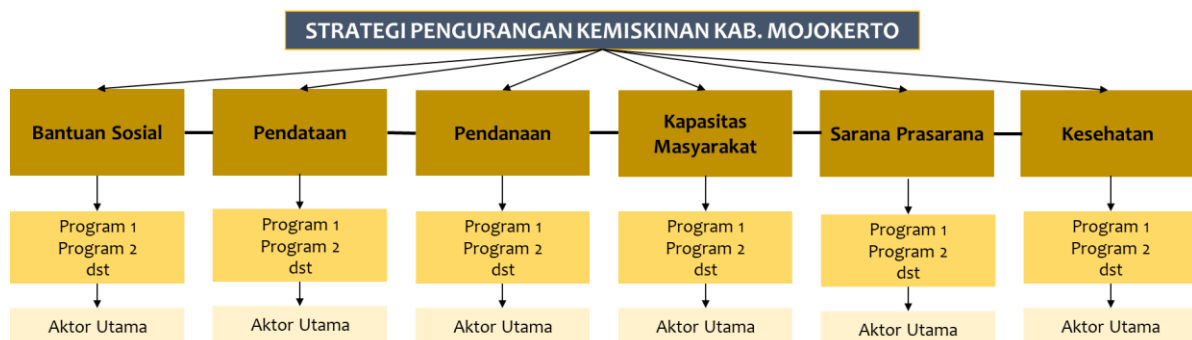
Sumber : Hasil Analisis, 2023



4.5 Rekomendasi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto

Prioritas kebijakan dan program diperlukan mengingat urgensi permasalahan kemiskinan yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan dan kemajuan daerah. Prioritas disusun berdasarkan review kebijakan yang telah disusun, dimana kebijakan yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dapat dipertimbangkan dijadwalkan pada awal timeline.

Berikut adalah skematik proses penyusunan rekomendasi strategi yang digunakan dalam analisis ini. Pada baris pertama menjelaskan tentang tema besar dari permasalahan yang belum tertangani melalui program eksisting yang sudah dilakukan. Lalu baris kedua merupakan usulan program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, masing-masing program akan diarahkan kepada aktor utama yang memiliki kewenangan utama sesuai tugas pokok dan fungsinya.

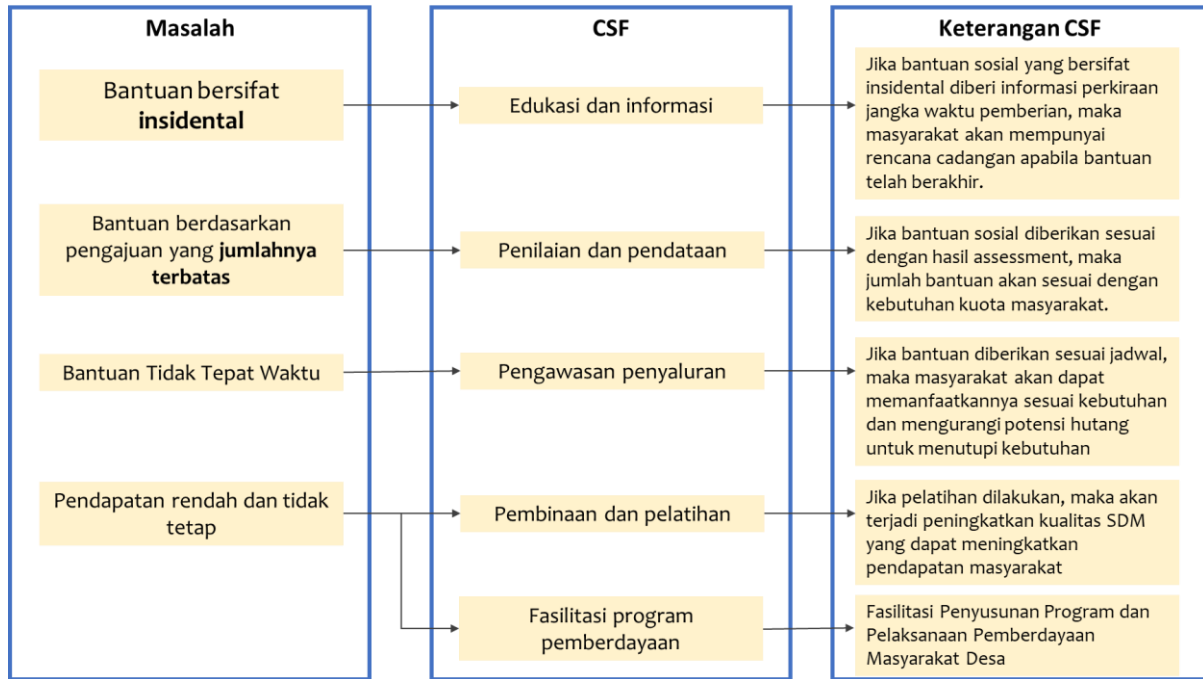


Gambar 4. 17 Proses Sintesa Strategi Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Sumber : Analisis, 2023

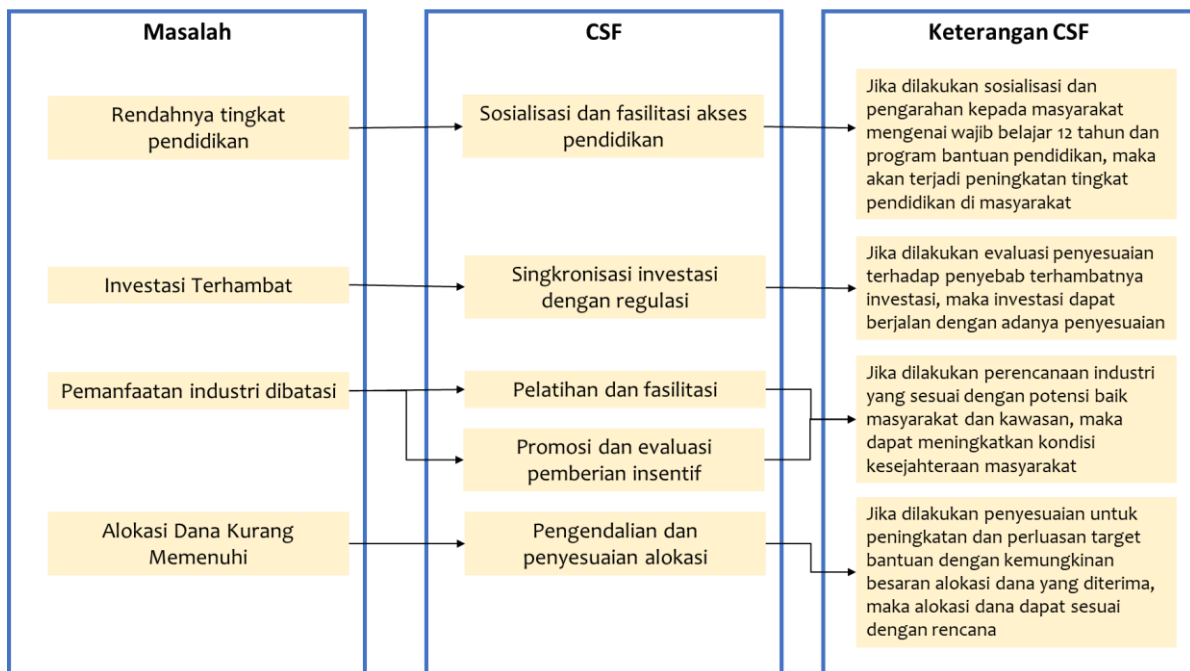
Pada tahap pertama, permasalahan akan dianalisis CSF-nya. Critical Success Factor (CSF) memberikan gambaran tentang aspek-aspek kritis apa saja di setiap aktivitas dan proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan (dalam hal ini adalah pemecahan masalah kemiskinan) dalam mencapai visi dan misi serta keberhasilan bisnisnya. Prioritas kebijakan dilakukan dengan identifikasi faktor-faktor vital yang dapat menyebabkan suatu perubahan atau perkembangan dalam suatu kegiatan yang sedang direncanakan.

Berikut adalah proses perumusan CSF untuk masing-masing permasalahan.



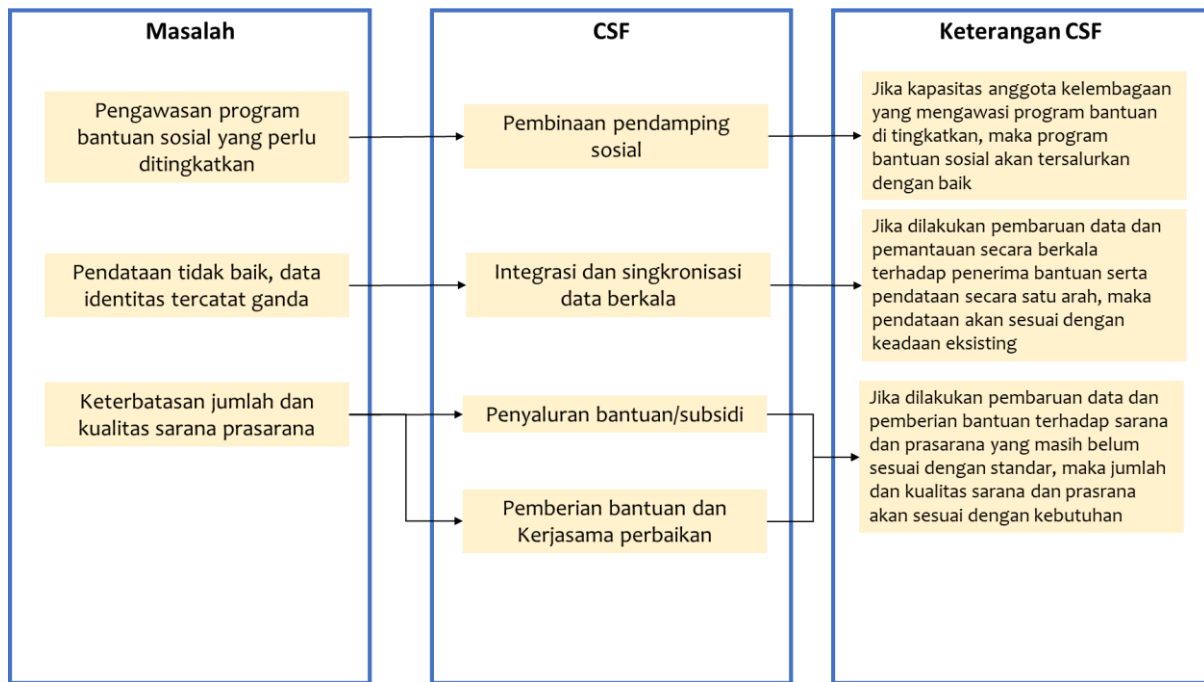
Gambar 4. 18 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 1)

Sumber : Analisis, 2023



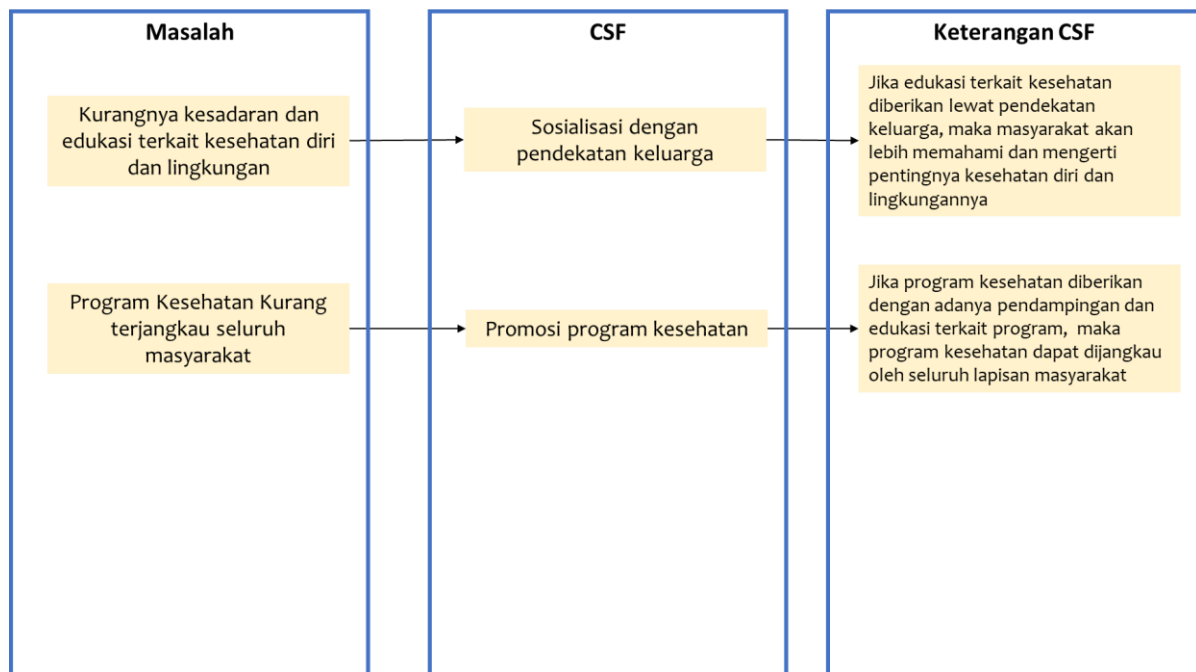
Gambar 4. 19 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 2)

Sumber : Analisis, 2023



Gambar 4. 20 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 3)

Sumber : Analisis, 2023



Gambar 4. 21 Perumusan CSF Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (bagian 4)

Sumber : Analisis, 2023

Dari proses sintesa dan telaah tersebut, selanjutnya disusun rekomendasi dalam bentuk program yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah penyebab kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, khususnya yang belum tertangani oleh program-program yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Masing-masing dari rekomendasi program diberi keterangan tingkat urgensi yang diturunkan ke dalam



jangka waktu pelaksanaan program. Perumusan program berdasarkan besaran jangka waktu ini bertujuan agar dapat menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan, serta dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Adapun tingkat kepentingan/urgensi terbagi menjadi klasifikasi berikut.

i. Program Jangka Pendek

Program adalah program tambahan/pelengkap dari program yang sudah ada, bersifat segera dan/atau program yang diasumsikan dapat terealisasi dalam kurun waktu 5 tahun tanpa menambah anggaran yang besar/signifikan.

ii. Program Jangka Menengah

Program yang diasumsikan dapat terealisasi dalam kurun waktu 10 tahun, dengan tingkat intensitas kegiatan dan anggaran yang lebih besar daripada program jangka pendek.

iii. Program Jangka Panjang

Program merupakan program baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang antara 10-20 tahun untuk mempersiapkan dan merencanakan, sampai dengan realisasi programnya.



Tabel 4. 32 Rekomendasi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Fenomena/ Tema Besar	CSF	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Rekomendasi Bentuk Program	Nama Program	Aktor	Kode	Jenis Periode Program
Bantuan Sosial	Jika bantuan sosial yang bersifat insidental diberi informasi perkiraan jangka waktu pemberian, maka masyarakat akan mempunyai rencana cadangan apabila bantuan telah berakhir.	Bantuan bersifat insidental	Edukasi pada warga agar tidak bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.	Pendampingan Sosial dan Sosialisasi mengenai efektivitas pemberian bantuan	Dinas Sosial (Pendamping Sosial)	2.8.2.201.3	Jangka Pendek
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kementerian PPPA, Dinas Sosial		Jangka Pendek
	Jika bantuan sosial diberikan sesuai dengan hasil assessment, maka jumlah bantuan akan sesuai dengan kebutuhan kuota masyarakat.	Bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas	Assessment kemiskinan menggunakan standar yang disinkronkan dengan kriteria dari perangkat Desa sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi kemiskinan sehari-hari dari KPM.	Penyusunan Survey Kemiskinan dan Intergrasi Data Terpadu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.6.5.202.2	Jangka Pendek
	Jika bantuan diberikan sesuai jadwal, maka masyarakat akan dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan mengurangi potensi hutang untuk menutupi kebutuhan.	Bantuan Tidak Tepat Waktu	Pengawasan pemberian bantuan dilakukan untuk memastikan pemberian bantuan dapat tepat waktu dan tepat sasaran	Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dinas Sosial	5.2.2.204.8	Jangka Pendek
Pendataan	Jika dilakukan pembaruan data dan pemantauan secara berkala terhadap penerima bantuan serta pendataan secara	Pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda	Pembaruan data kondisi penerima secara berkala sehingga data penerima bantuan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya	Pemutakhiran dan integrasi data DTKS secara berkala dan terpadu	Dinas Sosial	1.6.5.202 (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jangka Pendek



Fenomena/ Tema Besar	CSF	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Rekomendasi Bentuk Program	Nama Program	Aktor	Kode	Jenis Periode Program
	satu arah, maka pendataan akan sesuai dengan keadaan eksisting		Penyediaan fasilitas untuk melaporkan masalah terkait data	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial	Kabupaten/ Kota) 1.6.4.201.9	Jangka Menengah
Pendanaan	Jika dilakukan penyesuaian untuk peningkatan dan perluasan target bantuan dengan kemungkinan besaran alokasi dana yang diterima, maka alokasi dana dapat sesuai dengan rencana	Alokasi Dana Kurang Memenuhi	Peningkatan serta perluasan target bantuan sosial dengan dilakukan penyesuaian dengan kemungkinan alokasi dana yang didapatkan untuk mengantisipasi pemenuhan alokasi dana	Perluasan target bantuan dengan dilakukan pengendalian dan penyesuaian dengan alokasi dana	Dinas Sosial		Jangka Pendek
Pendanaan	Jika kapasitas anggota kelembagaan yang mengawasi program bantuan di tingkatkan, maka program bantuan sosial akan tersalurkan dengan baik	Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan	Pembinaan pendamping sosial bagi program bantuan sosial perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengawasan program bantuan sosial	Pembinaan pendamping sosial bagi program bantuan sosial secara berkala	Dinas Sosial (pendamping Sosial)		Jangka Pendek
Kapasitas Masyarakat	Jika pelatihan dilakukan, maka akan terjadi peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendapatan rendah dan tidak tetap	Pembinaan dan pelatihan dengan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan standar yang dibutuhkan dari dunia kerja	Pembinaan dan pelatihan dengan berbasis kompetensi	Disnaker	2.7.3.201 (Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi)	Jangka Pendek
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial	7.1.6.201.16 (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jangka Pendek



Fenomena/ Tema Besar	CSF	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Rekomendasi Bentuk Program	Nama Program	Aktor	Kode	Jenis Periode Program
	Masyarakat Desa					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	
	Jika dilakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai wajib belajar 12 tahun dan program bantuan pendidikan, maka akan terjadi peningkatan tingkat pendidikan di masyarakat	Rendahnya tingkat pendidikan	Sosialisasi dan pengarahan mengenai kewajiban belajar serta bantuan pendidikan yang telah tersedia	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Sosial	7.1.3.206.6 (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan)	Jangka Pendek
			Penyediaan akses pendidikan dasar dan kesehatan dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		1.6.4.202.10	Jangka Menengah
Pendanaan	Jika dilakukan evaluasi penyesuaian terhadap penyebab terhambatnya investasi, maka investasi dapat berjalan dengan adanya penyesuaian	Investasi Terhambat	Evaluasi terhadap jenis investasi yang terhambat dan penyesuaian terhadap isu yang menghambat	Sinkronisasi dan penyesuaian investasi dengan regulasi dan potensi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.6.201 (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jangka Pendek
Pendanaan	Jika dilakukan perencanaan industri yang sesuai dengan potensi baik	Pemanfaatan industri dibatasi	Perencanaan pengembangan industri kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi Kabupaten Mojokerto	Pengembangan IKM pertanian baru dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pemberian bantuan fasilitas kepada Industri kecil dan	Dinas Pertanian, , Dinas perindustrian dan perdagangan	(Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Jangka Menengah



Fenomena/ Tema Besar	CSF	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Rekomendasi Bentuk Program	Nama Program	Aktor	Kode	Jenis Periode Program
	masyarakat dan kawasan, maka dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat		(pertanian) dengan dilakukan peningkatan dan penguatan kapasitas SDM	industri menengah		Kabupaten/Kota)	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.3.201.1	Jangka Menengah
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.2.201.2 (Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal)	Jangka Menengah
Pendanaan	Jika batasan umr dan regulasi dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat	Batasan Regulasi Perizinan dan UMR	Pengkajian ulang dan penyesuaian regulasi perizinan dan penetapan UMR dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan keadaan masyarakat	Pengkajian penyesuaian UMR dan regulasi perizinan	Dewan Pengupahan		Jangka Menengah
				Peninjauan kembali dasar penentuan perhitungan upah minimum	Pemerintah Provinsi (SK Gubernur)		Jangka Menengah
Sarana Prasarana	Jika dilakukan pembaruan data dan pemberian bantuan terhadap sarana dan prasarana yang masih belum sesuai dengan standar, maka jumlah dan kualitas sarana dan prasarana akan sesuai dengan kebutuhan	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	Pemberian bantuan terhadap pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKP2	1.4.3.203.3	Jangka Pendek
			Pemberian bantuan uang sewa kepada warga penerima perumahan permukiman kumuh	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Permukiman Kumuh	DPRKP2	1.4.3.203.5	Jangka Pendek
			Pemberian dan penyaluran subsidi/ bantuan pupuk kepada KPM di sektor agropolitan.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperindag	3.30.4.203.3	Jangka Pendek



Fenomena/ Tema Besar	CSF	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Rekomendasi Bentuk Program	Nama Program	Aktor	Kode	Jenis Periode Program
Kualitas Kesehatan	Jika edukasi terkait kesehatan diberikan lewat pendekatan keluarga, maka masyarakat akan lebih memahami dan mengerti pentingnya kesehatan diri dan lingkungannya	Kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan	Pemberian sosialisasi dengan praktik perilaku hidup bersih dan sehat yang sesuai dengan indikator PHBS kepada masyarakat lewat pemberdayaan keluarga	Peningkatan kesadaran masyarakat atas perilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan	1.2.5.202.2 (Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Jangka Pendek
Kualitas Kesehatan	Jika program kesehatan diberikan dengan adanya pendampingan dan edukasi terkait program, maka program kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	Program Kesehatan Kurang terjangkau seluruh masyarakat	Pemberian edukasi dan pendampingan dari tingkat desa dalam pendaftaran program kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan awareness dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran program	Peningkatan upaya promosi program kesehatan melalui sosialisasi dan pendampingan pendaftaran	Dinas Kesehatan	1.2.5.201.1 (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Jangka Pendek

Sumber : Hasil Analisa, 2023



Dari keseluruhan rekomendasi program, maka beberapa program yang perlu diprioritaskan adalah program yang terkait hal berikut:

1. Pendanaan
2. Pendataan
3. Peningkatan Koordinasi antar stakeholder.

4.6 Analisis Pemetaan Aktor Dalam Pengentasan Kemiskinan Kab Mojokerto

OPD yang berperan terdiri dari beberapa OPD, yaitu Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dprkp2, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dan Dinas Pertanian. Dikarenakan kemiskinan mencakup banyak aspek, semua OPD bisa memasukkan program-program pengentasan kemiskinan. Aktor juga dapat berasal dari pihak diluar OPD seperti di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 direncanakan akan melakukan kerjasama dengan UNICEF untuk menurunkan angka putus sekolah. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto juga tidak bisa terselesaikan tanpa adanya masyarakat yang berperan aktif. Koordinasi antar OPD yang sangat diperlukan guna mengurangi *miss* komunikasi dalam menjalankan program dengan tujuan yang sama yaitu pengentasan kemiskinan. Data DTKS yang setiap tahun digunakan sebagai acuan untuk menentukan masyarakat miskin perlu dilakukan updating. Perlu dilakukan konfirmasi dengan perangkat desa mengenai hasil pendataan DTKS karena pernakgkat desa yang lebih paham warga sehingga tidak terdapat kriteria yang rancu dalam penentuan jumlah masyarakat miskin dengan variabel yang sama. Setelah dilakukan program pengentasan kemiskinan maka perlu dilakukan monitoring dengan harapan rantai kemiskinan dapat terputus dan masyarakat tidak menjadi ketergantungan dengan program yang diberikan.

Berikut adalah matriks hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan Kabupaten Mojokerto.



Tabel 4. 33 Daftar Identifikasi Aktor

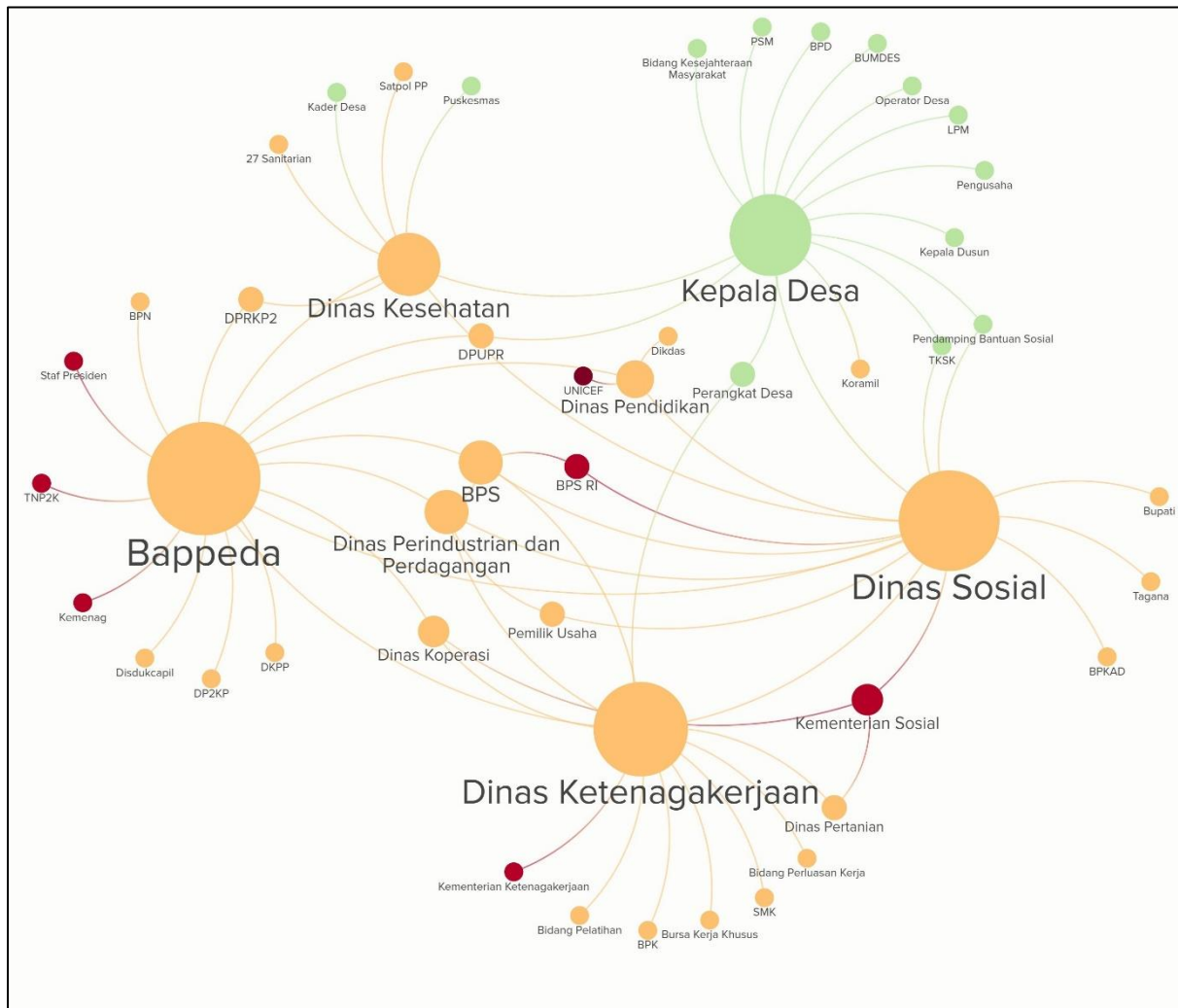
Aktor	Dinas Sosial	Bappeda	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Disnaker	Disperindag	BPS	UNICEF	Bursa Kerja Khusus (BKK)	SMK	Dinas Koperasi	Kemensos	Dinas Pertanian	TNP2K dan Staf Presiden	BPN	DPRK P2	BPS RI	27 Sanitarian, Puskesmas, Kader Desa	Satpol PP, Puskesmas	Pemilik Usaha	Kepala Desa
Buati	persetujuan dan penerbitan SK Bantuan Sosial																				
Dinas Sosial	V (kadin dan antar bidang) PPKS SDMPK, tagana, TKST	v (Bappeda sbg koordinator)	v (penyaluran JKN)		v (sinkronisasi data kemiskinan)							v (sinkronisasi data kemiskinan dan penyaluran bantuan)					v (sinkronisasi data kemiskinan)			v (sinkronisasi data kemiskinan)	v (penyaluran bantuan sosial)
Bappeda	v (Bappeda sbg koordinator)	v					v (sinkronisasi data kemiskinan)							v (peninjauan kemiskinan ekstrem)	v (terkait lahan untuk RTLH)	v (terkait penilaian dan pemberian bantuan RTLH)					
Dinas Kesehatan	v	v	v (kadin dan antar bidang)													v (edukasi bangunan sehat)		v (Pendataan STBM)	v (penerbitan BABS)		
Dinas Pendidikan	v (KIP)			v (Bidang Dikdas, pendidikan dasar)				v													
Disnaker		v (Bappeda sebagai koordinator utama/			V (kadin dan antar bidang) bidang pelatihan dan				v (penyaluran tenaga kerja)	v (penyaluran tenaga kerja)											



Aktor	Dinas Sosial	Bappeda	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Disnaker	Disperindag	BPS	UNICEF	Bursa Kerja Khusus (BKK)	SMK	Dinas Koperasi	Kemensos	Dinas Pertanian	TNP2K dan Staf Presiden	BPN	DPRK P2	BPS RI	27 Sanitarian, Puskesmas, Kader Desa	Satpol PP, Puskesmas	Pemilik Usaha	Kepala Desa
		pengarah)			bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja																
Disperindag	V (kadin dan antar bidang) V (kadin dan antar bidang)																			v	
BPS	v (sinkronisasi data kemiskinan)	v (sinkronisasi data kemiskinan)			v (sinkronisasi data kemiskinan)	v (kadin dan antar bidang)											v (sinkronisasi data kemiskinan SUSNAS) Bu Hesti dan Pak Fathkur				
Dinas Koperasi												v (Bantuan UMKM)	Bantuan insidental covid untuk petani								

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Analisis pemetaan aktor penting pada penanganan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto kemudian divisualisasikan menggunakan Diagram Pemetaan Aktor menggunakan pendekatan Social Degree Centrality untuk mengetahui jumlah koneksi antar aktor. Semakin besar ukuran lingkaran satu aktor menandakan bahwa semakin banyak stakeholder/aktor lain yang terkoneksi dan berkolaborasi dengan aktor tersebut.



Gambar 4. 22 Pemetaan Koordinasi Stakeholder Terkait Penanganan Kemiskinan Kab Mojokerto

Sumber : Hasil Analisis, 2023

- Keterangan:
- : Aktor Tingkat Nasional
 - : Aktor Tingkat Kabupaten
 - : Aktor Tingkat Desa

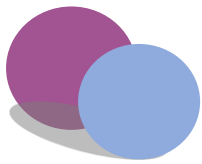
Berdasarkan hasil analisis faktor didapatkan 3 aktor dalam tingkatan yang berbeda. Pertama terdapat aktor nasional yang memiliki kewenangan dalam penentu standar (SNI) penerima bantuan dan kriteria masyarakat miskin serta pemilik alokasi data



utama untuk pengentasan kemiskinan. Aktor kedua tingkat Kabupaten dengan tugas membuat dan merencanakan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan berdasarkan SNI pusat, penyalur dana bantuan dari pusat ke desa-desa/masyarakat, serta mengawasi proses penyaluran bantuan. Aktor ketiga pada tingkat desa dengan tugas dan fungsi untuk mendata masyarakat miskin serta mendampingi masyarakat dalam penggunaan aplikasi. Namun meskipun aktor telah ditetapkan berdasarkan tingkatannya namun masih terdapat perbedaan kriteria penduduk miskin/yang berhak menerima bantuan.

Permasalahan yang terjadi terkait hubungan antar aktor ini, yaitu adanya perbedaan kriteria penduduk miskin/ yang berhak menerima bantuan, yaitu

- Pusat dan Daerah memiliki kriteria penerima bantuan hanya dilihat dari fisik rumah (bahan bangunan rumah) dan juga lingkungan calon penerima bantuan
- Perangkat Desa memiliki kriteria berdasarkan kultur, kebiasaan, serta lingkungan serta kehidupan keluarga tidak hanya dari fisik rumah saja karena bisa jadi fisik rumah bagus namun tidak memiliki penghasilan tetap/ yang tinggal adalah orang tua/ janda sehingga tidak memiliki penghasilan dan rumah diberi oleh anaknya atau kebalikan bila dilihat dari rumahnya terlihat tidak mampu tapi ternyata memiliki aset yang cukup untuk kehidupannya. Hal ini yang dihindari oleh aktor tingkat desa bila hanya melihat kriteria dari fisik saja tanpa tahu kehidupan sebenarnya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan informasi mengenai data penduduk miskin tahun 2022 di tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data DTKS didapatkan 2 kecamatan dengan jumlah Desil 1 dan Desil 2 terbanyak yaitu Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Trowulan yang selanjutnya dijadikan sebagai wilayah studi pada kajian ini. Gambaran umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat berdasarkan 3 bagian yaitu kualitas SDM. IPM digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dengan komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Berdasarkan data BPS angka IPM Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mencapai 74,89, IPG digunakan sebagai indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan manusia namun dengan memperhatikan gender, jika angka IPG mendekati 100 maka IPG hampir rata antara perempuan dan laki-laki. Angka IPG di Kabupaten Mojokerto mencapai 91,37. IDG menunjukkan seberapa besar keikutsertaan perempuan dalam kehidupan berekonomi dan politik dengan komponen pengukuran keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Angka IDG Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebesar 80,2. Kondisi kemiskinan konsumsi di Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui garis kemiskinan sebesar 445.608 pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 9,71%, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,37% dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,29%.

Kondisi kemiskinan non konsumsi di kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari bidang ketenagakerjaan dengan kesimpulan terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang tidak bekerja, penurunan pekerja di sektor informal, peningkatan jumlah pekerja di sektor formal dan penduduk miskin yang tidak bekerja hal ini mengindikasikan bahwa ada pekerja sektor informal yang pindah bekerja ke sektor formal. Dalam bidang Pendidikan dapat disimpulkan terjadi peningkatan tamatan SLTA ke atas dan terjadi penurunan penduduk miskin yang tidak tamat SD. Bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten



Mojokerto berhasil menurunkan angka stunting sebesar 15,8% dari tahun 2021 hingga 2022. Dalam bidang infrastruktur permukiman dapat diindikasikan bahwa kualitas rumah huni dan fasilitas sanitasi semakin baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2022 didapatkan jumlah RTLH di Kabupaten Mojokerto hanya tinggal 2% dari 100% kondisi rumah keluarga miskin.

Berdasarkan hasil analisis dan kompilasi data yang telah didapatkan, maka ditemukan 31 jenis permasalahan terdapat 17 masalah tercover program dan 14 masalah kemiskinan yang belum tercover program yaitu bantuan bersifat insidental, bantuan berdasarkan pengajuan yang jumlahnya terbatas, bantuan tidak tepat waktu, pendapatan rendah dan tidak tetap, rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja, investasi terhambat, alokasi dana kurang memenuhi, pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan, pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda, keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana, kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan serta program kesehatan kurang terjangkau seluruh masyarakat.

Dari keseluruhan rekomendasi program, maka beberapa program yang perlu diprioritaskan adalah program yang terkait Pendanaan, Pendataan dan Peningkatan Koordinasi antar stakeholder.

Dalam pelaksanaan program juga terdapat aktor-aktor yang berperan penting dalam berjalannya program. Berdasarkan hasil analisis didapatkan 3 aktor menurut tingkatan masing-masing yaitu aktor tingkat nasional, tingkat kabupaten, dan tingkat desa dengan aktor yang memiliki peran paling penting adalah Bappeda sebagai inisiasi, Dinas Sosial sebagai peyelenggara program untuk pengentasan kemiskinan dan Dinas-dinas lain yang berkontribusi dalam menjalankan program. Permasalahan yang dihadapi oleh aktor-aktor ini adalah adanya perbedaan kriteria penduduk miskin/ yang berhak menerima bantuan.



5.2 Saran

Penyusunan Dokumen Analisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dalam upaya untuk mengetahui rekomendasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Saran dalam penyusunan dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan dokumen analisis kondisi kemiskinan di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat tetap melaksanakan program eksisting yang saat ini sudah berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil temuan dari hasil analisis yang dilakukan terdapat 31 jenis permasalahan yang ditemukan namun masih terdapat 14 permasalahan yang belum tercover oleh program yang ada sehingga disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dapat mengcover permasalahan yang ada dengan membuat program-program baru untuk pengentasan masalah kemiskinan.

Kemudian perlu dilakukan penggalan informasi mengenai permasalahan kemiskinan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto untuk pendataan sehingga nantinya program yang akan dibuat dan diselenggarakan bisa lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi para penerima bantuan dan manfaat lainnya dan program dapat dilakukan secara merata di Seluruh Kabupaten Mojokerto dengan harapan akhir dapat menyelesaikan tujuan SDGs yang pertama yaitu megakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030.

Lampiran Informasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sejak tahun 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Indonesia. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.

4. Program Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Adapun biaya operasional sekolah yang termasuk dalam biaya tetap adalah daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan

ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, penyusunan data dan laporan. Biaya yang termasuk dalam biaya variabel adalah alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, pembinaan siswa.

5. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

6. BOSDA PAUD

BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pemberian dana hibah BOSDA bagi guru TK dan PAUD ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan PAUD.

7. BOSDA SD

BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pemberian dana hibah BOSDA bagi guru SD dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SD.

8. BOSDA SMP

BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pemberian dana hibah BOSDA bagi guru SMP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SMP.

9. BOS SDN se Kab. Mojokerto

BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil. Pemberian dana hibah BOSDA bagi guru SDN dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SDN.

10. BOS SMPN se Kab. Mojokerto

BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil. Pemberian dana hibah BOSDA bagi guru SMPN dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SMPN.

11. Peningkatan Imunisasi

Semua program imunisasi yang menjadi bagian dari program imunisasi rutin wajib akan dibebaskan dari tanggungan biaya, dalam kondisi dan persyaratan tertentu.

12. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan.

13. Peningkatan ASI Eksklusif Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Peningkatan ASI Eksklusif merupakan salah satu program untuk mencapai KLA.

14. Pembina dan Pengembangan Desa Siaga

Tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Ciri-ciri Desa Siaga antara lain:

- a. Minimal Memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberi pelayanan dasar (dengan sumberdaya minimal 1 tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan & peralatan alat komunikasi ke masyarakat & ke puskesmas)
- b. Memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat

c. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri

d. Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

15. Penyediaan Obat Gizi Penguatan Intervensi Stunting (DAK)

intervensi penurunan stunting dilakukan melalui 2 intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, di antaranya seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi gizi sensitif adalah strategi atau program yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar bidang kesehatan atau Kementerian Kesehatan.

16. Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)

Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

17. Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lanjut usia adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia.

18. Penurunan Stunting

Program Percepatan Pencegahan Stunting memfokuskan 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting. Kesebelas program tersebut diarahkan pada 2 fase pertumbuhan. Yaitu, fase ibu hamil atau sebelum melahirkan dan fase sesudah melahirkan yang utamanya pada bayi usia 0-24 bulan.

19. Revitalisasi Posyandu dan UKBM

Revitalisasi posyandu ini adalah upaya meningkatkan strata posyandu secara bertahap menuju posyandu keluarga, pusat pelayanan terintegrasi, penanganan stunting, serta mendeteksi hal lainnya, dan juga konsultasi untuk edukasi bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.

20. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Daerah

Program PBI merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BOP) PBI Daerah

Program PBI merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Program JKN-KIS nyatanya tidak mengurangi manfaat dari penggunaan kartu JKN-KIS saat berobat. Semua pelayanan dan manfaat yang didapatkan tetap sama saja alias tidak ada perbedaan layanan dengan segmen peserta lain bahkan dengan kelas yang lebih tinggi. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah tempat tidur saat rawat inap saja.

22. Pelayanan JKN FKTP UPT Puskesmas se Kab, Mojokerto

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS FKTP).

Semua penduduk Indonesia WAJIB menjadi peserta JKN- KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan sebagai berikut:

a. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau sering disebut faskes, menjadi garda terdepan sejak program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan tahun 2014. Piramida pelayanan kesehatan Program JKN-KIS menempatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pondasi pelayanan kesehatan. Artinya, sebagai kontak pertama individu dan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan, FKTP harus siap memberikan pelayanan komprehensif sesuai kompetensinya untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS.

23. Pelayanan kesehatan Baik Kegiatan Promotif/ preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif dalam rangka penanganan Covid-19 melalui pengadaan alat kesehatan habis pakai (DBHCHT)

Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) termasuk juga sisa DBH CHT, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT yang digunakan minimal 50% untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

24. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dalam rangka penanganan covid-19 melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. Sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020, DBH CHT dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19.

25. Pelayanan Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 dilakukan pelayanan kesehatan berupa,

1. Pengadaan disinfektan, alkohol, APO, dan lain sebagainya
2. Pengadaan obat-obatan untuk Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
3. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya
4. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

26. BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Program BSPS merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan program padat karya tunai. Program BSPS dinilai merupakan salah satu program pro rakyat di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dana stimulan dari pemerintah.

27. BOP Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang

berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) dan Universal Akses 2030 melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

28. BOP Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

29. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, merupakan sebuah platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.

30. BOP Program Bantuan stimulan perumahan swadaya

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya

31. Fasilitas dan Pendampingan PKH

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.

32. Fasilitas dan Pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) Jasa dan E. Warung

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. E-Warung KUBE merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera. Dengan e-Warung, diharapkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif akan meningkat. Selain itu juga menghilangkan penyalahgunaan bantuan, sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran

33. Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai juga biasa disebut Kartu Sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

34. Verifikasi dan Validasi data BPJS Daerah (Kisda)

Kartu Indonesia Sehat merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Validasi dan verifikasi dilakukan untuk pengecekan aktif tidaknya kartu KIS warga sebelum digunakan.

35. Pendampingan lanjut usia terlanter

Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) merupakan kebijakan Kementerian Sosial yang dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial bagi lanjut usia terlanter

36. Penganggulan dan pemberdayaan pengemis dan gelandangan

Penanggulan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali

kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

37. Penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan

Program pemberdayaan anak jalanan dijalankan untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan sehingga dapat mandiri dan tidak beraktivitas di jalan lagi.

38. Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program dari Dinas Sosial yang bertujuan untuk memberi bantuan dana pembangunan rumah bagi rakyat miskin. Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat

39. Pembinaan Para penyandang disabilitas

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan aksesibilitas yang memudahkan mereka serta ditujukan untuk meningkatkan SDM, keterampilan, serta pola pikirnya.

40. Pemberdayaan dan bimbingan keterampilan bagi pemulung

Program pemberdayaan pemulung ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemulung untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

41. Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna

Pembinaan Pemberdayaan Karang Taruna Bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kualitas kelembagaan karang taruna sebagai organisasi kepemudaan ditingkat desa/kelurahan, sehingga dapat berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

42. Pemberian bantuan LKSA

Bantuan tersebut ditujukan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di bawah binaan Dinsos.

43. Bimbingan ketrampilan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi(WRSE)

WRSE adalah wanita baik gadis maupun janda yang merupakan kepala keluarga.

44. Pemberdayaan fakir miskin

Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

45. Penanganan balita, anak terlantar dan adopsi

Kegiatan Penanganan balita, anak terlantar dan adopsi ditujukan untuk memberikan kebaikan dan kebermanfaatan yang maksimal dalam hal perlindungan kepada perempuan dan anak di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Mojokerto.

46. Pelatihan ketrampilan tata boga bagi eks trauma korban tindak kekerasan/human trafficking

Pelatihan keterampilan yang digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan agar korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

47. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP

Pelatihan kerja berbasis kompetensi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto dengan meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan punya kompetensi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

48. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi digunakan untuk memperoleh Informasi Pasar Kerja, prosedur, syarat kerja serta gambaran dan situasi dunia kerja baik sehingga Pencari Kerja dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.

49. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair)

Dalam rangka menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Mojokerto menggelar Job Fair. Pada Job fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dilaksanakan juga seminar mengenai teori yang harus dipersiapkan untuk mengikuti perekrutan tenaga kerja dan materi pengantar kerja.

50. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer

Pelatihan Teknisi Jaringan Komputer dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, sampai dengan mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system.

51. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi

Pelatihan dan uji keterampilan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan dapat diberikan pengakuan kompeten oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

52. Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM)

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri merupakan salah satu program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini merupakan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru dengan memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang ada. Sasaran peserta Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri adalah tenaga kerja penganggur (penganggur terbuka dan setengah penganggur) yang berminat berwirausaha dengan pendidikan minimal SMA.

53. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial

Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial terdiri dari 3 yaitu perundingan bipartit, tripartit dan melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

54. Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, terna bagi masyarakat melalui bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat

Bantuan Pemerintah sifatnya hanya stimulan dan hanya sebagian kecil dari kebutuhan biaya produksi dan pengolahan. Arah kedepan, Pemerintah secara bertahap mulai mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, dan lebih difokuskan pada aspek kebijakan, regulasi, pembinaan dan perbaikan sistem. Kedepannya masyarakat diharapkan lebih mandiri dalam produksi.

55. Pengembangan desa mandiri pangan

Desa Mandiri Pangan adalah Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem

ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan.

56. Pemberdayaan usaha kelompok lahan kering

Kelompok tani membutuhkan pemberdayaan sejak awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kelembagaan dan jaringan pemasaran. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan upaya pemberdayaan di berbagai aspek berupa menambah pengetahuan dan skill, memperkuat kelembagaan, dan memberikan pendampingan dalam rangka ekspansi jaringan pasar

57. Pemantauan dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

58. Pemantauan dan updating harga pangan

Pemantauan dan updating harga pangan dilakukan untuk mengetahui tingkat stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

59. Penguatan cadangan pangan

Penguatan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga untuk memperkuat ketahanan pangan

60. Pemberdayaan KWT dalam rangka peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan petani yang mana para anggotanya terdiri atas wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian

61. Fasilitas produk pangan olahan unggulan

Produk pangan olahan merupakan makanan atau minuman yang berasal dari hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Fasilitas produk pangan olahan unggulan dilakukan untuk meningkatkan produksi produk pangan unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.

62. Pengembangan usaha budidaya kolam terpal

Usaha budidaya kolam terpal yaitu kolam ikan yang dibuat dengan memanfaatkan bahan terpal. Terpal yang diletakkan pada kolam untuk dijadikan alas sekaligus dinding kolamnya. Untuk penerapan terpalnya, bahan dan bentuknya bisa dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan

63. Penyediaan sarana produksi kelompok usaha bersama bidang perikanan

Penyediaan sarana produksi bagi kelompok usaha dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya perikanan guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

64. Peningkatan perekonomian keluarga melalui pengembangan pekarangan pangan lestari

Pekarangan pangan lestari (P2L) adalah kegiatan yang di laksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan serta pendapatan

65. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan organik

Pertanian organik (Organic Farming) adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input, dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan

66. Peningkatan konsumsi pangan sehat dan diversifikasi pangan melalui pekarangan pangan lestari

Diversifikasi pangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu bahan pangan yakni beras. Pekarangan pangan lestari dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

67. Penyediaan sarana produksi perikanan budidaya

68. Pemberdayaan unit pembenihan rakyat

Unit pembenihan rakyat merupakan unit usaha dari Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memproduksi benih ikan secara mandiri

69. Pemberdayaan pelaku usaha poklahsar

Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

70. Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan pengembangan alat pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan untuk masyarakat/ kelompok masyarakat

Bantuan pengembangan alat ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk serta secara tidak langsung juga mensejahterakan masyarakat

71. Pembinaan desa/kelurahan bersih dan lestari

Kelurahan/desa BERSERI (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dan aparatur Desa/Kelurahan untuk menumbuhkan kembangkan potensi desa/ kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan

72. Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah industri melalui penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan

penyediaan prasarana dan sarana pengolahan limbah industri dilakukan untuk menunjang jalannya kegiatan industri dengan tetap memperhatikan kelangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat

73. Peningkatan kapasitas TAPI-PKK Kab. Mojokerto

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu upaya penurunan stunting. TP PKK tingkat Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam hal upaya penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto dan TP PKK Desa masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

74. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

Pelatihan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas pendamping sebagai Kader Pendampingan Masyarakat (KPM) Desa, sebagai ujung tombak pelaksana Pemberdayaan Masyarakat

75. Pembinaan dan fasilitas BUMDesa

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki tujuan untuk dapat memperluas wawasan para pelaku BUMDESA sehingga lebih maju dan berkembang sehingga dapat bersinergi dengan berbagai mitra usaha.

76. Pembinaan pasar desa

Pembinaan pasar desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

77. Pembinaan dan pelestarian aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Perlindungan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pestaarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan. Pembinaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.

78. Pembinaan & pengelolaan keuangan UPK PPK Mandiri

Kegiatan UPK PPK diharapkan untuk merubah tingkat ekonomi keluarga dengan meningkatkan pendapatan keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup yang berkecukupan bagi masyarakat

79. Pestaarian & Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

Pestaarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

80. Pendampingan penguatan desa binaan kabupaten Mojokerto

Pendampingan penguatan desa binaan kabupaten Mojokerto dalam rangka pembinaan dan pendampingan untuk penguatan ekonomi dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan gerakan ekonomi dari tingkatan Desa

81. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil kurang mampu

Penyuluhan dilakukan dengan pendataan ibu hamil dan pemberian edukasi tentang menu gizi seimbang dan cara memberi makan anak yang benar kepada ibu-ibu maupun bumil di setiap desa. Selain itu mereka juga diajak untuk melakukan demo memasak sekaligus dijelaskan cara memasak yang baik dan benar sesuai menu gizinya, ada kalori berupa karbohidrat, protein, sayur dan buah. Serta pemantauan gizi ibu hamil.

82. Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Merupakan satu proses penyampaian pesan, informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program KB dengan menggunakan media Mobil Penerangan BKKBN dengan tujuan meningkatkan program KB .

83. Pembinaan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

UPPKS adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur khususnya keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS I).

84. Pendataan dan pengolahan data keluarga

Pendataan dan pengolahan data keluarga merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mendukung Program satu data. Dengan data tersebut, seluruh opd yang memiliki kepentingan dapat memanfaatkan data tersebut untuk merencanakan kebijakan dan pengambilan keputusan.

85. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dengan fasilitas dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

86. Kegiatan fasilitas klinik bisnis koperasi dan usaha mikro

program ini dilakukan untuk meningkatkan kiprah koperasi di bidang perekonomian. Sehingga kedepannya koperasi mampu berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan mampu membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

87. Kegiatan fasilitas penumbuhan wirausaha baru

Penumbuhan wirausaha baru khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM) memiliki peranan yang penting dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam perluasan kesempatan berusaha dan bekerja hingga ke pelosok daerah.

88. Kegiatan fasilitas peningkatan produktivitas usaha mikro dan koperasi

Peningkatan produktivitas usaha mikro dan koperasi diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

89. Kegiatan pembinaan kinerja usaha simpan pinjam

Pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam menganalisa dan mengevaluasi agar dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota

90. Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi koperasi dan usaha mikro

Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak dan menambah wawasan atas mekanisme pembayaran pajak bagi usahanya.

91. Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM)

Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki dana alokasi khusus yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan urusan daerah

92. Kegiatan fasilitas kerjasama antar koperasi, usaha mikro dan pelaku usaha

Kerjasama antara koperasi, usaha mikro dan pelaku usaha diperlukan untuk pengembangan usaha dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi

93. Kegiatan fasilitas pemasaran produk koperasi dan usaha mikro

Optimalisasi pemasaran Produk Usaha Mikro melalui pendampingan dan pelatihan dapat diperbaharui dengan terus melakukan pengembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta memadukannya dengan teknologi digital.

94. Kegiatan penilaian kesehatan manajemen koperasi

Kegiatan penilaian kesehatan manajemen koperasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas koperasi, dimana manajemen koperasi dituntut harus profesional, harus punya visi dan misi serta memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) serta sumber daya manusianya yang berkualitas.

95. Kegiatan fasilitas pembentukan koperasi baru

Kegiatan pembentukan koperasi baru untuk membangun lebih banyak potensi dari masyarakat sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

96. Kegiatan workshop peningkatan kapasitas pengelola koperasi

Peningkatan kapasitas pengelola koperasi menambah pemahaman pengetahuan dan meningkatkan semangat petugas Koperasi untuk meningkatkan unit usaha sektor riil koperasi lewat peningkatan kapasitas pengurus dalam hal pengelolaan koperasi.

97. Kegiatan pembinaan koperasi berprestasi

Kegiatan Pembinaan Koperasi Berprestasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengapresiasi koperasi berprestasi. Hal tersebut penting karena koperasi memiliki peran dalam perekonomian masyarakat. Harapannya dengan adanya kegiatan Pembinaan Koperasi Berprestasi, pengurus koperasi tersebut bisa meningkatkan kinerja koperasinya dan dapat memajukan Koperasi secara keseluruhan.

98. Kegiatan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan RAT

Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib yang harus dilakukan koperasi untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun kepada anggota.

99. Pembinaan usaha pariwisata

Pembinaan kapasitas pada pelaku pariwisata dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mendorong percepatan pertumbuhan pariwisata yang baik.

100. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan

Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan

101. Pelatihan kewirausahaan pemuda

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda merupakan pelatihan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi berwirausaha dan membantu pemuda menemukan ide-ide usaha dan merancang sebuah rencana usaha.

102. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau

Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau merupakan salah satu bentuk penggunaan DBCHT bagi petani tembakau. Kegiatan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau adalah bantuan benih unggul, bantuan pupuk, bantuan pestisida, bantuan tenaga kerja, dan sebagainya.

103. Peningkatan produksi tanaman padi melalui pelatihan tanam sistem jajar legowo

Sistem tanam jajar legowo merupakan pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau lebih baris tanaman padi dan satu baris kosong. Sistem ini ditujukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pertanian.

104. Pengembangan kawasan tanaman jeruk

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

105. Peningkatan produksi tanaman cabai melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi

Penyediaan sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi cabai

106. Pengembangan pemberdayaan agensi hayati (P2AH)

Untuk mengoptimalkan kegiatan dan pengembangan diperlukan lembaga yang mewadahi petani alumni SLPHT yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip – prinsip PHT. Kelembagaan tersebut mulai berkembang di masyarakat dengan bentuk dan nama yang masih bervariasi antar daerah. Di tingkat nasional, kelembagaan ini disebut dengan Pos Pelayanan Agensi Hayati (PPAH).

107. Promosi atas hasil produksi pertanian

Promosi atas hasil produksi pertanian dilakukan dengan pengadaan pameran untuk produk unggulan daerah yang bertujuan memperkenalkan produk unggulan kepada konsumen

108. Peningkatan kelembagaan petani

Peningkatan kelembagaan petani dilakukan dengan melakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari kelembagaan petani yang ada

109. Peningkatan sumber daya penyuluhan pertanian lapangan

Peningkatan sumber daya penyuluhan pertanian lapangan dilakukan dengan pengadaan workshop yang ditujukan pada petani yang berada di lapangan dimana dalam kegiatan tersebut petani akan diberikan pelatihan dan pemahaman yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan hasil produksinya

110. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau

Penumbuhan dan penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tembakau.

111. Penerapan budidaya tembakau yang baik

Guna meningkatkan kualitas tembakau hasil panen petani tembakau, Kabupaten Mojokerto memiliki pelatihan bagi petani tembakau. Dengan harapan kapasitas para petani tembakau di Kabupaten Mojokerto bisa meningkat setelah mendapatkan pelatihan. Tentunya dengan pengetahuan para petani yang semakin luas, hasil panen juga bisa ditingkatkan kualitasnya.

112. Pengembangan kawasan peternakan organik

Pengembangan kawasan peternakan organik didasari oleh peningkatan kesadaran pentingnya makanan sehat dan masih terbatasnya supplier produk organik khususnya produk peternakan.

113. Fasilitas dan pembinaan pasar sehat

Fasilitas dan pembinaan pasar sehat berupa penataan lapak pasar, pembenahan IPAL dan penataan tempat pembuangan sementara (TPS) pasar agar kedepannya pasar menjadi bersih dan terbebas dari kesan kumuh serta bau.

114. Operasionalisasi UPT Pasar

Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang perdagangan

115. Operasi pasar

Operasi pasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau

116. Pelatihan desain kemasan produk bagi IKM

Pelatihan ini ditujukan pada IKM yang ingin meningkatkan nilai produk lewat kemasan. Peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya kemasan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan dibekali dengan berbagai materi tentang cara membedakan kemasan berdasarkan fungsi jenis dan bahannya dan kemasan standar yang sesuai dengan produk mereka hingga pengetahuan tentang label.

117. Pembinaan dan pengawasan industri

Pembinaan dan pengawasan industri dilakukan untuk pembangunan dan pemberdayaan industri dengan menaikkan pangsa pasar produk daerah, daya saing perdagangan, dan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

118. Bimbingan dan fasilitas industri kecil menengah berwawasan lingkungan

Tujuannya diadakannya Bimbingan dan fasilitas industri kecil menengah berwawasan lingkungan agar IKM lebih memahami dan menerapkan proses pengolahan limbah di industri serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

119. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha IHT skala kecil

Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada usaha IHT skala kecil ditujukan untuk meningkatkan skill dari sdm sehingga proses produksi akan lebih efisien dan dapat meningkatkan hasil produksi

120. Optimalisasi pedagang pasar tradisional

Optimalisasi dilakukan dengan mengembangkan potensi lokal dari pasar tradisional dengan tetap mengikuti pergerakan pasar dan tren. Optimalisasi dilakukan untuk memajukan pedagang yang berada di pasar tradisional

121. Peningkatan industri kecil pengrajin cor kuningan

Industri kecil pengrajin cor kuningan di Kabupaten Mojokerto menjadi daerah wisata sentra industri kerajinan cor kuningan yang menjadi produk unggulan cinderamata khas mojokerto.

122. Peningkatan industri kecil tekstil di wilayah kabupaten mojokerto

Peningkatan industri kecil tekstil ditujukan menaikkan pangsa pasar produk daerah, daya saing perdagangan, dan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

123. Peningkatan produksi pengrajin alas kaki dan dompet di wilayah kabupaten mojokerto

Produksi pengrajin alas kaki dan dompet di Kabupaten mojokerto berada di Kecamatan Trowulan dengan bentuk industri kecil yang bertambah menjadi 5 kelompok untuk meningkatkan produksi.

124. Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil kuliner di wilayah kabupaten mojokerto

Peningkatan mutu dan kualitas pada industri kecil kuliner yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing IKM kuliner di Kabupaten Mojokerto

125. Peningkatan mutu dan kualitas tekstil dan tas di wilayah kabupaten mojokerto

Peningkatan mutu pada industri kecil tekstil bertujuan untuk menaikkan daya saing produk daerah, dan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

126. Peningkatan mutu dan kualitas industri kecil bakery di wilayah kabupaten mojokerto

Peningkatan mutu pada industri kecil bakery memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing produk, dan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lewat perbaikan mutu dan kualitas yang disesuaikan dengan standar

127. Peningkatan mutu dan kualitas jasa pertukangan dan service kendaraan di wilayah kabupaten mojokerto

Peningkatan mutu bertujuan untuk meningkatkan daya saing lewat perbaikan mutu dan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku

LAMPIRAN 2 HASIL ANALISIS CODING

A. Dokumentasi Wawancara



B. Daftar Kode/ Code List

No	Kode	Jumlah	No	Kode	Jumlah
1	Akses Pekerjaan	15	24	Kriteria Penerima	26
2	Aktor	147	25	Kriteria Rancu	17
3	Alokasi Dana	11	26	Kultur	33
4	Bantuan Insidental	7	27	Masalah	115
5	Bantuan KE	3	28	Modal Terbatas	3
6	Bantuan Kurang Tepat Sasaran	6	29	monitoring	10
7	Bantuan Sosial	45	30	Pandemi Covid-19	5
8	Bantuan Stunting	7	31	Pekerjaan Tidak Tetap	9
9	Bantuan Terbatas	8	32	Pelatihan Kerja	18
10	Bantuan Tidak Tepat Waktu	1	33	Penyebab	11
11	Dampak Manfaat Program	13	34	Produktivitas Masy Rendah	18
12	Data, Pelaporan, Kajian	24	35	Program Kesehatan	9
13	Disabilitas dan Lansia	13	36	Prosedur	24
14	Edukasi Finansial	1	37	Rekomendasi Informan	8
15	Edukasi Kesehatan	7	38	Rencana	8
16	Guna Lahan	5	39	Respon	148
17	Hambatan Investasi	2	40	Sarana Prasarana	38
18	Hambatan Program	7	41	Stunting	6
19	Harapan dan Usulan	11	42	Tingkat Pendidikan	12
20	Kelembagaan dan Regulasi	52	43	Respon	147
21	Keterbatasan Program Pelatihan	3	44	Sarana Prasarana	38
22	Ketimpangan Pendapatan	4	45	Stunting	6
23	Kondisi Kemiskinan	10	46	Tingkat Pendidikan	11
				TOTAL	402

C. Ukuran Kode

Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Kode	Ukuran/ Keterangan
Masalah	Seluruh permasalahan	Masalah	Seluruh fenomena yang menyebabkan atau memperparah kondisi kemiskinan, termasuk fenomena yang tidak mengubah kondisi menjadi lebih baik.
	Hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan penyaluran program pengentasan kemiskinan.	Hambatan Program	Hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan penyaluran program pengentasan kemiskinan.
Rekayasa/ Respon	Seluruh upaya/ tanggapan/ respon terhadap masalah	Respon	Seluruh respon/ tanggapan/ reaksi/ program/ langkah yang telah dilakukan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik, termasuk untuk mengurangi/ menghapus hal-hal yang menjadi masalah.
	Rencana pengentasan kemiskinan mendatang	Rencana	Seluruh respon/ tanggapan/ reaksi/ program/ langkah yang diharapkan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik, termasuk untuk mengurangi/ menghapus hal-hal yang menjadi masalah.
Kondisi Kemiskinan	Kondisi Kemiskinan masih tetap atau menurun sedikit dari tahun sebelumnya	Kondisi Kemiskinan	kemiskinan berkurang ... kemiskinan bertambah
	Penyebab Kemiskinan menurut asumsi informan	Penyebab	faktor/ isu penyebab kemiskinan
	Dampak Manfaat/ perubahan setelah dilakukan program pengentasan kemiskinan	Dampak Manfaat Program	tetap miskin ... sedikit berkurang ... signifikan
Bantuan Sosial	Jenis Bantuan	Bantuan Sosial	nama bantuan sosial
	Prosedur penyaluran bantuan	Prosedur	tahap pelaksanaan dan penyaluran bantuan
	Bantuan terkait Stunting	Bantuan Stunting	nama bantuan terkait pencegahan dan pengurangan stunting
	Bantuan terkait Kemiskinan Ekstrem	Bantuan KE	nama bantuan terkait pencegahan dan penanganan Kemiskinan Ekstrem
	Bantuan kurang tepat sasaran	Bantuan kurang tepat sasaran	Tidak tepat sasaran ... sesuai sasaran
	Bantuan bersifat insidental	Bantuan Insidental	Insidental... rutin
	Bantuan berdasarkan pengajuan yang	Bantuan Terbatas	Terbatas ... tidak terbatas

Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Kode	Ukuran/ Keterangan
	jumlahnya terbatas		
	Bantuan Tidak Tepat Waktu	Bantuan Tidak Tepat Waktu	terlambat diberikan Tepat waktu/ sesuai jadwal
Pelatihan Kerja	Program pelatihan kerja yang sudah dilakukan	Pelatihan Kerja	Nama/ jenis pelatihan kerja yang sudah dilakukan
	Keterbatasan program pelatihan kerja	Keterbatasan Program Pelatihan	Terbatas ... tidak terbatas
Kapasitas Masyarakat	Pendapatan rendah dan tidak tetap	Produktivitas Masy Rendah	Rendah ... tinggi
	Produktifitas masyarakat yang rendah	Produktivitas Masy Rendah	Kemampuan rendah ... tinggi/sesuai kualifikasi yg dibutuhkan
	Rendahnya tingkat endidikan	Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah ... Perguruan Tinggi
	Rendahnya edukasi finansial warga dan pengelolaan keuangan	Edukasi Finansial	Tidak mengerti ... mengerti
	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	Ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja	Tidak tahu ... tahu
Kultur	Terdapat kultur/ kebiasaan masyarakat yang kurang baik	Kultur	Konsumtif ... tidak konsumtif
			Malas ... tidak malas
			Pasrah ... bersemangat
			Mudah iri/cemburu Tidak mudah iri/ cemburu
			Boros ... tidak boros
Pekerjaan	Akses Pekerjaan Rendah	Akses Pekerjaan	Rendah ... selalu tersedia
	Pekerjaan tidak tetap	Pekerjaan tidak tetap	Tidak tetap ... tetap
	Ketimpangan pendapatan	Ketimpangan pendapatan	Miskin ... tidak miskin
Pendanaan	Investasi Terhambat	Hambatan investasi	terhambat ... tidak terhambat
	Pemanfaatan industri dibatasi	Hambatan investasi	industri terbatas ... tidak terbatas
	Alokasi Dana Kurang Memenuhi	Alokasi Dana	Kurang, terbatas ... cukup
	Modal Usaha Terbatas	Modal Usaha Terbatas	Terbatas ... tidak terbatas
Bencana/ Kejadian luar biasa	Pengangguran karena pandemi	Pandemi Covid-19	Pengangguran ... tidak terpengaruh pandemi
Kelembagaan dan Regulasi	Pengawasan program bantuan sosial yang perlu ditingkatkan	Monitoring	Tidak ada ... ada

Fenomena/ Tema Besar	Isu/ Konteks Permasalahan/ Penyebab	Kode	Ukuran/ Keterangan
	Program tidak sinkron dan sinergis	Kelembagaan dan Regulasi	Tidak ada... ada
	Batasan Regulasi Perizinan dan UMR	Kelembagaan dan Regulasi	Tidak ada... ada
	Kolaborasi/ Koordinasi dengan bidang lain	Kelembagaan dan Regulasi	Bentuk kolaborasi/ koordinasi dengan bidang lain
Pendataan	Kriteria penerima bantuan	Kriteria Penerima	Syarat dan kriteria penerima bantuan/ kategori miskin
	Penetapan kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan kultur dan standar dari pusat	Kriteria rancu	Berbeda ... Sama
	Pendataan tidak baik, data identitas tercatat ganda	Data, Pelaporan, Kajian	Data tidak baik ... data baik
Fisik Wilayah	Keterbatasan Pemanfaatan Lahan	Guna Lahan	Tidak ada perlakuan khusus ... ada
Sarana Prasarana	Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana	Sarana Prasarana	Tidak tersedia.... Tersedia
	Kualitas Rumah Buruk	Sarana Prasarana	Buruk... baik
Kualitas Kesehatan	Terdapat Disabilitas dan Lansia	Disabilitas dan Lansia	Terdapat disabilitas/lansia ... tidak ada disabilitas/lansia
	Terdapat anak yang terindikasi stunting	Stunting	Terdapat anak stunting ... tidak ada anak stunting
	Kurangnya kesadaran dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan	Edukasi Kesehatan	kurang sadar ... sadar
	Program Kesehatan Kurang terjangkau seluruh masyarakat	Program Kesehatan	Kurang terjangkau ... terjangkau

D. Daftar Kutipan/ Quote

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
1	DISNAKER	Di luar disnaker ya? Tentunya kita ada kerja sama dengan BKK. Bursa kerja khusus. Makanya kemarin saya sampaikan, jangan sampai loker atau kesempatan kerja itu diambil oleh masyarakat luar kita. Tetap prioritaskan wilayah Kabupaten. Bagaimana cara untuk mengotakkan? Jangan sampai terlalu banyak orang luar yang masuk. Makanya kita kerja sama dengan BKK, SMK atau segala macam. Kamu punya lulusan jurusan apa? Tolong informasikan. Dengan pihak perusahaan yang ada pemagangan pelatihan magang. Kerja sama dengan sektor usaha. Akademisi juga. Jangan sampai ada anak yang misalkan putus sekolah.	Akses Pekerjaan Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	4
2	Rekap Wawancara Desa Trowulan	d : Terus yang tadi kata bapak ada yang untuk pelatihan padat karya, itu dari perangkat desa sendiri? P : enggak itu Padat Karya itu warga : kalau dulu itu kerja bakti tapi diberi upah, itu sistemnya Padat Karya kalau kita cuma-cuma kan kurang efektif itu dipekerjakannya pekerja bebas yang dulunya enggak ada pekerjaan langsung diadakan pembersihan saluran tapi digaji Desa itu sistemnya padat karya itu bagi orang yang memang enggak punya biasanya kerja tapi enggak ada pekerjaan itu yang dilibatkan tapi enggak boleh orang luar desa harus dalam Desa sendiri	Akses Pekerjaan Aktor Pelatihan Kerja Respon	4
3	Rekap Wawancara Desa Trowulan	usaha seperti catering, seperti Dod itu kan lingkungan sekitarnya yang tidak bekerja di tampung, kadang toko-toko yang besar-besar itu mengutamakan yang sekitar	Akses Pekerjaan Aktor Respon	3
4	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	banyak kayak yang di Kelopo, sukari, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, banyak di sini UMKM, mulai dari keripik, kerupuk, terus pemilahan daur ulang juga banyak	Akses Pekerjaan Aktor Respon	3
5	Rekap Wawancara Desa Trowulan	petani, 60% petani, entah buruh tani entah petani di bidang pertanian, karena di Trowulan gak boleh ada pabrik	Akses Pekerjaan Guna Lahan Hambatan Investasi Kelembagaan dan Regulasi Masalah	5
6	Rekap Wawancara Japanan	apa penyebab kemiskinan tersebut? Pak Lukman :berdampak dari adanya pengurangan tenaga kerja di sektor industri yang menimbulkan pengangguran	Akses Pekerjaan Guna Lahan Masalah Penyebab	4
7	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Untuk penerimaan tenaga kerja lokal tersebut berapa banyak ya pak kalo boleh saya tahu? Pak Lukman : Kalo bisa 60/70% karena tujuannya masuk ke desa ini ya mengurangi penagguran di desa	Akses Pekerjaan Harapan dan Usulan Kelembagaan dan Regulasi	3
8	Rekap Wawancara Kedungsari	, mohon dibantu dalam pebciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Karena banyak yang telah lulus tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bisa juga bantuan workshop dan pembinaan yang	Akses Pekerjaan Harapan dan Usulan Keterbatasan Program Pelatihan	4

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		lain ^{[P]_{SEP}}	Masalah	
9	Rekap Wawancara Desa Trowulan	e : gimana ya harapannya.. kalau harapannya yang terbaik untuk desa untuk warga ^{[P]_{SEP}} : kita selalu memberikan yang pertama kita selalu ada di program Desa itu program padat karya di situ kan juga ada unsur pementasan kemiskinan, kemudian kita buat pengajuan lapak-lapak untuk UMKM, untuk masyarakat, yang tetap kembali lagi kalau individu-individu mau berubah atau bergantung sudah aku sudah dijaga pemerintah.. ada yang seperti itu jadi kita tidak bisa terlalu menekan tapi tetap berusaha mencari jalan keluar.. PKH dapat Kis dapat tapi tetap seperti itu tidak ada perubahan ya kan? Terus kita masak maksa? nggak bisa ^{[P]_{SEP}}	Akses Pekerjaan Harapan dan Usulan Pelatihan Kerja Respon	4
10	Rekap Wawancara Dinsos	ya dan juga dari data disnaker, kita lihat dari data HRD pabrik dan di cocokan apakah masuk DTKS atau tidak. Dan hanya yang bekerja sebagai buruh, bukan manajer dan sebagainya.	Akses Pekerjaan Kriteria Penerima Produktivitas Masy Rendah	3
11	Rekap Wawancara Kedungsari	penyebab kemiskinan paling banyak adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit. Kami membutuhkan lapangan pekerjaan yang baru ^{[P]_{SEP}}	Akses Pekerjaan Masalah Penyebab	3
12	Rekap Wawancara Desa Pakis	Biasanya tu kebanyakan mayoritas petani ya, jadi otomatis orang yang membutuhkan pekerjaan untuk bertani itu berkurang, jadi lowongan pekerjaan lah intinya ^{[P]_{SEP}}	Akses Pekerjaan Masalah Penyebab Produktivitas Masy Rendah	4
13	Rekap Wawancara Beratkulon	butuh lapangan kerja, karena kalo tidak ada lapangan kerja dari pelajar yang lulus tadi akan menganggur.	Akses Pekerjaan Rencana	2
14	DISNAKER	Jadi gini kita punya data nih. Perusahaan perusahaan mana yang punya lembaga pemagangan kan harus ada rekom dari kita. Contoh ini perusahaan memberikan informasi bahwa tahun ini kita ada pemagangan untuk. 100 orang misalnya, Dari 100 orang ini kan kita informasikan ke masyarakat. Siapa yang mau? Kita berikan kesempatan mendaftar. Jadi seperti itu. ^{[P]_{SEP}}	Akses Pekerjaan Respon	2
15	DISNAKER	Terus tidak dapat bekerja, kita arahkan untuk bersekolah lagi sampai kuliah. Jangan sampai dia menjadi faktor sumbangsih terbesar tingkat nganggur terbuka. Jangan sampai mereka nganggur. ^{[P]_{SEP}}	Akses Pekerjaan Respon Tingkat Pendidikan	3
16	Dinas Pendidikan	dinas pendidikan	Aktor	1
17	Dinas Pendidikan	Dikdas	Aktor	1
18	Dinas Pendidikan	UNICEF	Aktor	1
19	Dinas Pendidikan	Nama – Usia : Pak Didik Suharto ^{[P]_{SEP}} Instansi : Dinas Pendidikan ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
20	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial	Aktor	1
21	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Aktor	1
22	Dinas Pendidikan	masyarakat	Aktor	1
23	Dinas Pendidikan	Orang tuanya	Aktor	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
24	Dinas Pendidikan	bidang dikmas	Aktor	1
25	Dinas Pendidikan	masyarakat yang harus berperan aktif	Aktor	1
26	Dinas Pendidikan	dinas sosial	Aktor	1
27	Dinas Pendidikan	peran sekolah	Aktor	1
28	Dinas Pendidikan	dinas sosial	Aktor	1
29	Dinas Pendidikan	sekolah	Aktor	1
30	DISNAKER	Jadi Kepala Dinas dan seluruh jajarannya terutama di bidang itu 2 itu pentingnya.	Aktor	1
31	DISNAKER	Dengan pihak perusahaan yang ada pemagangan pelatihan magang. Kerja sama dengan sektor usaha. Akademisi juga.	Aktor	1
32	DISNAKER	dinas koperasi	Aktor	1
33	DISNAKER	Nama – Usia : Pak Ade ^{[P]_{SEP}} Instansi : Dinas Ketenagakerjaan ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
34	DISNAKER	perangkat desa	Aktor	1
35	DISNAKER	Kementerian	Aktor	1
36	DISNAKER	BPK	Aktor	1
37	DISNAKER	Perusahaan perusahaan mana yang punya lembaga pemagangan	Aktor	1
38	Rekap Bapedda	staff presiden untuk melihat kemiskinan ekstremnya di trowulan	Aktor	1
39	Rekap Bapedda	tn2k	Aktor	1
40	Rekap Bapedda	kalau OPD ada sekitar 12 OPD, dinkes, dp2kp, dprkp2, pendidikan, tenaga kerja, PU, dinsos, koperasi, disperindag, disdukcapil, PUPR, dpr2kp, ketahanan pangan dan perikanan, pemberdayaan dpmd, pertanian. Sebenarnya sih kalau ngomong kemiskinan tu bisa kemana aja si karna luas yaa. Semua OPD bisa memasukkan program-program pengentasan kemiskinan. ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
41	Rekap Bapedda	kemenag, BPN ini terkait perluasan lahan untuk RTLH.	Aktor	1
42	Rekap Bapedda	Nama – Usia : AGUNG ^{[P]_{SEP}} Instansi : BAPEDDA ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
43	REKAP BPS	BPS RI	Aktor	1
44	REKAP BPS	Sebetulnya kita tidak ada aktornya, tapi lebih tepatnya team (anggota BPS) ada ketua tim dan anggota, ataupun melibatkan mitra dari luar yang telah kita pilih.	Aktor	1
45	REKAP BPS	di SUSNAS, yang actor didalamnya diketuai oleh Bu Hesti yang sedang cuti melahirkan dan sementara saya yang menjadi PJnya ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
46	REKAP BPS	Nama – Usia : YUNIAR/32 Tahun dan Fatkhur/53 ^{[P]_{SEP}} Instansi : BADAN PUSAT STATISTIC (BPS) ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
47	REKAP BPS	disnaker dengan kita ada Sakernas	Aktor	1
48	REKAP BPS	dinas sosial	Aktor	1
49	REKAP DINAS KESEHATAN	27 sanitarian	Aktor	1
50	REKAP DINAS KESEHATAN	kader kesehatan setiap desa	Aktor	1
51	REKAP DINAS KESEHATAN	Satpol PP	Aktor	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
52	REKAP DINAS KESEHATAN	pak camat	Aktor	1
53	REKAP DINAS KESEHATAN	puskesmas	Aktor	1
54	REKAP DINAS KESEHATAN	Aktor pentingnya mesti aja ya dari Kepala Dinas, Kepala Dinas kemudian turun ke kbid kemudian turun ke sub koordinator itu turun ke teman teman di sini saya bertugas di pusat.	Aktor	1
55	REKAP DINAS KESEHATAN	Nama – Usia : Bu Ismijati ^[P₁] Instansi : Dinas Kesehatan ^[SEP]	Aktor	1
56	REKAP DINAS KESEHATAN	ibu bupati	Aktor	1
57	REKAP DINAS KESEHATAN	dprkp2	Aktor	1
58	REKAP DINAS KESEHATAN	Dinas Sosial	Aktor	1
59	REKAP DINAS KESEHATAN	puskesmas	Aktor	1
60	REKAP DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Aktor	1
61	Rekap Wawancara Dinsos	HRD pabrik	Aktor	1
62	Rekap Wawancara Dinsos	disnaker	Aktor	1
63	Rekap Wawancara Dinsos	Kepala Desa	Aktor	1
64	Rekap Wawancara Dinsos	Bupati	Aktor	1
65	Rekap Wawancara Dinsos	BPKAD	Aktor	1
66	Rekap Wawancara Dinsos	PPKS	Aktor	1
67	Rekap Wawancara Dinsos	dimulai dari para dinas kepala dinas, sekertaris semua harus bersinergi.	Aktor	1
68	Rekap Wawancara Dinsos	SDMPK, tagana, TKST	Aktor	1
69	Rekap Wawancara Dinsos	semuanya buka karyawan tetapi unsur dari dinsos. ^[P₁]	Aktor	1
70	Rekap Wawancara Dinsos	ppks (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Aktor	1
71	Rekap Wawancara Dinsos	bappeda yang lebih paham	Aktor	1
72	Rekap Wawancara Dinsos	disnaker	Aktor	1
73	Rekap Wawancara Dinsos	Nama – Usia : Bapak Nugroho ^[P₁] Instansi : Dinas Sosial ^[SEP]	Aktor	1
74	Rekap Wawancara Dinsos	Saya Nugroho sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Aktor	1
75	Rekap Wawancara Dinsos	desa	Aktor	1
76	Rekap Wawancara Disperindag	Nisa :berati aktor yang terlibat disini itu seperti pengusaha seperti itu ya pak/bu ^[SEP] Bu Nunuk	Aktor	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		:iyaa ^[P1] _[SEP]		
77	Rekap Wawancara Disperindag	Nama – Usia : Bapak Edwin dan Ibu Nunuk ^[P1] _[SEP] Instansi : DISPERINDAG ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
78	Rekap Wawancara Disperindag	kepala dinas yang dibantu oleh staff ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
79	Rekap Wawancara Beratkulon	Bidang atau seksi mana ya pak kalau boleh tahu yang menjadi penanggung jawab utama dari program bantuan tersebut? ^[P1] _[SEP] Pak Mulyadi : Kalau kemiskinan itu kesejahteraan bidangnya ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
80	Rekap Wawancara Beratkulon	bantuan dari dinkes berupa jamban dari PUPR	Aktor	1
81	Rekap Wawancara Beratkulon	bantuan sembako dari bumdes ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
82	Rekap Wawancara Beratkulon	Nisa : Lalu siapa ya pak yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan program? ^[P1] _[SEP] Semua, khususnya kepala desa, dari bidang dua dan perangkat desa lainnya hingga kepala dusun ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
83	Rekap Wawancara Beratkulon	Nama – Usia : Bapak Mulyadi ^[P1] _[SEP] Instansi : Desa Beratkulon ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
84	Rekap Wawancara Japanan	Pak Lukman sebagai Kaur Umum	Aktor	1
85	Rekap Wawancara Japanan	dari dinas pendidikan langsung atau dari pemerintah ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
86	Rekap Wawancara Japanan	ada juga dari koramil tetapi hanya kadang-kadang saja ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
87	Rekap Wawancara Japanan	biasanya dari perusahaan kontruksi yang membuka lapangan pekerjaan dan tidak ada campur tangan dari pemerintah desa ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
88	Rekap Wawancara Japanan	untuk program pengentasan kemiskinan sendiri yang jadi penanggung jawab utama siapa ya pak kalo boleh tau? ^[P1] _[SEP] Pak Lukman : Kasi kesejahteraan ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
89	Rekap Wawancara Japanan	Untuk aktor mungkin seperti pengusaha konstruksi yang menyediakan lapangan kerja lalu ada pabrik vinilon yang selalu melakukan koordinasi khususnya untuk penerimaan tenaga kerja lokal sesuai peraturannya.	Aktor	1
90	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : lalu untuk penanggung jawab programpengentasan kemiskinan sendiri di desa ini siapa ya pak? ^[P1] _[SEP] Pak Hermawan : kepala desa dan operator juga staff ^[P1] _[SEP] Nisa : peran dari aktor-aktor tersebut bagaimana ya pak? ^[P1] _[SEP] Pak Hermawan : disini perannya adalah untuk memastikan keadaan penerima bantuan, jika sesuai akan dapat bantuan	Aktor	1
91	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : apakah ada aktor diluar pemerintahan ya pak yang membantu? ^[P1] _[SEP] Pak Hermawan : ada, dari PT PRIA, PT LAI bentuknya bantuan sembako di 1 januari dan sebelum idulfetri ^[P1] _[SEP]	Aktor	1
92	Rekap Wawancara Kedungsari	Nama – Usia : Bapak Hermawan ^[P1] _[SEP] Instansi : Desa Kedungsari ^[P1] _[SEP]	Aktor	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
93	Rekap Wawancara Mojojajar	dari PUPR	Aktor	1
94	Rekap Wawancara Mojojajar	yang menjadi penanggung jawab? ^[P] _[SEP] Bu Siti : pemberdayaan ^[P] _[SEP]	Aktor	1
95	Rekap Wawancara Mojojajar	aktor yang paling berpengaruh dan konsistendalam pengentasan kemiskinan di desa ini ya pak/bu? ^[P] _[SEP] Bu Siti : keseluruhan sesuai tupoksinya masing-masing ^[P] _[SEP]	Aktor	1
96	Rekap Wawancara Mojojajar	mungkin lembaga desa, RT/RW dan terkadang dari warga yang sebagai bagian dari LSM tapi kami anggap sebagai tokoh masyarakat ^[P] _[SEP]	Aktor	1
97	Rekap Wawancara Mojojajar	Nama – Usia : Bapak Saroni dan Bu Siti Muamalah ^[P] _[SEP] Instansi : Desa Mojojajar ^[P] _[SEP]	Aktor	1
98	Rekap Wawancara Mojopilang	Nama – Usia : Bapak Haryanto ^[P] _[SEP] Instansi : Kepala Desa Mojopilang ^[P] _[SEP]	Aktor	1
99	Rekap Wawancara Mojopilang	Kasi pelayanan, pembimbing, atau operator yang memasukkan data ke DTKS.	Aktor	1
100	REKAP DESA TEMON	Nama – Usia : YOSI/26 ^[P] _[SEP] Instansi : PEMERINTAH DESA TEMON	Aktor	1
101	REKAP DESA TEMON	pemerintah desa Kerjasama dengan RT/RT kepala dusun	Aktor	1
102	REKAP DESA TEMON	D : Kalau KESRA apa juga ada keterkaitan dengan bantuan-bantuan? ^[P] _[SEP] Y : Oiya itu ada Pak Ridwan. ^[P] _[SEP]	Aktor	1
103	REKAP DESA WATESUMPAK	Nama – Usia : HAKIM/22 tahun ^[P] _[SEP] Instansi : PEMERINTAH DESA WATESUMPAK ^[P] _[SEP]	Aktor	1
104	REKAP DESA WATESUMPAK	N : Jika di Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas bantuan-bantuan ini kira-kira bidang apa nggih pak? ^[P] _[SEP] H : Ada KESRA (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) ^[P] _[SEP] D : Kalau boleh tau yang menempati posisi di KESRA siapa ya pak? ^[P] _[SEP] H : Aris Widodo dibantu operator desa dengan kepala dusun dan BPD sehingga sinkron semua. ^[P] _[SEP]	Aktor	1
105	REKAP DESA WATESUMPAK	H : Kepala dusun Wates = Masrukan ^[P] _[SEP] Kepala dusun Jatisumber = Wawan A. ^[P] _[SEP] Kepala dusun Blendren = Fika O ^[P] _[SEP] Kepala dusun Kalitangi = Atok Suprianto ^[P] _[SEP] Kepala dusun Prayan = Abd. Munib ^[P] _[SEP]	Aktor	1
106	Rekap Wawancara Desa Pakis	Nama/ Usia : Nandha Rosi Adam/ 30 tahun ^[P] _[SEP] Instansi : Pemerintah Desa Pakis ^[P] _[SEP]	Aktor	1
107	Rekap Wawancara Desa Pakis	pihak sekola	Aktor	1
108	Rekap Wawancara Desa Pakis	Ini langsung dari pihak dinas sosialnya jadi pihak Desa	Aktor	1
109	Rekap Wawancara Desa Pakis	kalau untuk terkait yang menyalurkan bantuan itu langsung dari kepala dusun	Aktor	1
110	Rekap Wawancara Desa Pakis	perangkat desa, kan ada kasi pemerintahan, Kepala dusun	Aktor	1
111	Rekap Wawancara Desa Pakis	setiap desa itu dikasih pendamping PKH dari dinas sosial itu minimal 1 orang	Aktor	1
112	Rekap Wawancara Desa Pakis	yang pendamping itu Pak suntari	Aktor	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
113	Rekap Wawancara Desa Trowulan	Nama/ Usia : Eli/ 46 Tahun Solikin, 53 tahun ^{[P]_{SEP}} Instansi : Pemerintah Desa Trowulan	Aktor	1
114	Rekap Wawancara Desa Trowulan	kepala dusunnya itu lebih paham warganya	Aktor	1
115	Rekap Wawancara Desa Trowulan	bidang kasi kesejahteraan Atau kesra	Aktor	1
116	Rekap Wawancara Desa Trowulan	d :Kalau yang struktur di kesranya itu kalau boleh tahu namanya siapa? ^{[P]_{SEP}} S : itu saya Pak Solikin ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
117	Rekap Wawancara Desa Trowulan	Pak Johan	Aktor	1
118	Rekap Wawancara Desa Trowulan	Pak Hafid	Aktor	1
119	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Nama/ Usia : Supariati / 39 tahun Johana TKSK Kecamatan ^{[P]_{SEP}} Instansi : Pemerintah Desa Wonorejo	Aktor	1
120	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	TKSK Kecamatan Pak Johan	Aktor	1
121	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	PUPR, kalau dari dinsos provinsi juga ada, dari Kementerian	Aktor	1
122	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	ada yang menjalin hubungan khusus sama pihak dewan provinsi	Aktor	1
123	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Pak Johan	Aktor	1
124	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Kasi Kesmas.. PPKD penanggung jawab kepala Desa	Aktor	1
125	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	pendamping PKH dari masyarakat, dari kelompok, pendamping Kecamatan	Aktor	1
126	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	pendamping PKH itu Mbak, orang Kecamatan	Aktor	1
127	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	TKSK itu menaungi Kecamatan dalam pementasan kemiskinan terkait dengan data PPKS pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
128	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	PSM sama operator desa, pekerja sosial masyarakat dari unsur masyarakat, relawan itu ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
129	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	psm-nya sekaligus operator desa dan operator Desa ini yang punya peran penting terhadap bantuan bantuan yang ada karena apa mengolah datanya operator, cleansing Datanya juga operator, padu padannya juga dari operator, jantungnya data yang di operator, Operatornya atas nama permadita Oktavia Putri ^{[P]_{SEP}}	Aktor	1
130	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	bpnt itu kan dari Kementerian jadi dana Pusat	Aktor Alokasi Dana Bantuan Sosial	3
131	Rekap Wawancara Dinsos	untuk PBI JKN masih dinas sosial karena dari Kementerian sosial. Tapi untuk daerah oleh dinkes. PBI Jkn kan diusulkan lewat desa lewat aplikasi	Aktor Alokasi Dana Bantuan Sosial Respon	4

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
132	REKAP DESA WATESUMPAK	Ada seperti juragan patung cor, secara tidak langsung itu kan juga membantu perekonomian warga. Dan ada salah satu donator tetap yang rutin memberikan bantuan kepada anak yatim dan janda ² di dusun Jatisumber setiap bulannya. ^{[P]_{SEP}}	Aktor Bantuan Sosial	2
133	Rekap Wawancara Beratkulon	Apakah ada bantuan untuk rehabilitasi RTLH ya pak? ^{[P]_{SEP}} Pak Mulyadi : Ada tapi dari kabupaten atau dinsos. ^{[P]_{SEP}}	Aktor Bantuan Sosial Respon Sarana Prasarana	4
134	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Kepala dusun tersebut berkoordinasi dengan kepala desa biasanya bagaimana? Apakah ada musyawarah tertentu? ^{[P]_{SEP}} Pak Haryanto: Biasanya kepala dusun, bersama LPM, RT/RW menyeter datanya ke desa. ^{[P]_{SEP}} Nisa: Apakah ada koordinasi juga antara pemerintah desa dengan aktor-aktor di luar pemerintahan? Misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, atau ada dari perusahaan swasta yang membantu program pengentasan kemiskinan ini. ^{[P]_{SEP}}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi	2
135	DISNAKER	bidang pelatihan saja satu sama bidang yang kedua bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. ^{[P]_{SEP}}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Pelatihan Kerja	3
136	Dinas Pendidikan	Ini akan sedang ada pelatihan, terus teman teman juga sudah bergerak. ^{[P]_{SEP}} Nanti rencananya akan ada MOU antara UNICEF dengan Dinas Pendidikan sama apa gitu ya Nanti rencananya di peringatan Hardiknas itu akan ditandatangani. ^{[P]_{SEP}}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Rencana Respon	4
137	DISNAKER	koordinasi ini baru terlaksana dengan adanya arahan dari Bappeda.	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
138	Rekap Bapedda	kalau dri bapedda sendiri kalau monitoring itu tidak pernah, hanya sebatas menanyakan kepada OPD apakah programnya sudah masuk atau belum. Masalahnya memang untuk bantuan itu langsung semua ke dinsos. Jadi kalau bapeda itu kan hanya koordinnator saja. Kami hanya mengarahkan ketika ada program-program dari atas.	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
139	REKAP DINAS KESEHATAN	Teman teman puskesmas menggerakkan Itu meskipun kadang kadang bukan sanitarian aja kemarin pokoknya yang mau turun siapa saya kasih waktu paling lama 3 Minggu akhirnya selesainya satu bulan.	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
140	REKAP DINAS KESEHATAN	Ada makanya kemarin kita kan kerja sama dengan Dinas Sosial, kemudian kita kerja sama dengan dispendukcapil kita kerja sama dengan bapeda, kemudian kita kerjasama sama DPRKP2. Kemudian kita kerja sama dengan DPRD juga termasuk dengan PU itu masalah apa ya? Teknik bangunnya gimana?	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
141	Rekap Wawancara Japanan	Kita menjalankan sesuai dengantupoksi dan kerja sama dengan dinas terkait seperti dinsos, kesehatan bekerjasama dengan puskesmas	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
142	Rekap Wawancara Mojopilang	Kepala dusun masing-masing. Memetai yang perlu dimasukkan, yang perlu perhatian. Kepala dusun masing-masing yang lebih hapal. ^{[P] [SEP]}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
143	Rekap Wawancara Desa Pakis	D : berarti dari pihak Pemerintah desa ada koordinasi dengan RT RW atau kepala dusun. ^{[P] [SEP]} R : iya, ada musdes ^{[P] [SEP]}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
144	Rekap Wawancara Desa Trowulan	Iya RT RW, itu yang menjadi ujung tombak masukkan-masukan kita, koordinasinya dengan musyawarah tadi pertama musdes kemudian musdus, yang Kepala desa sama BPD kemudian evaluasi usulan-usulan ini lho yang layak ini loh yang kurang layak. ^{[P] [SEP]}	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
145	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	BLT itu kan ada rapat khusus Bapak RT, Bapak RW, dan tokoh masyarakat namanya rapat insidentil	Aktor Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
146	Rekap Wawancara Mojopilang	itu biasanya dari lembaga pendidikannya langsung, seperti pelatihan.	Aktor Pelatihan Kerja Respon	3
147	Rekap Wawancara Beratkulon	kalau ingin mengganti data, maka akan dilakukan musyawarah dengan aktor-aktor tadi terutama kepala desa, dan bidang kesejahteraan. ^{[P] [SEP]} Nisa : Berarti koordinasinya dilakukan lewat musyawarah ya pak? ^{[P] [SEP]} Iya mbak	Aktor Prosedur Respon	3
148	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : apakah program tersebut mudah untuk diakses oleh masyarakat? ^{[P] [SEP]} Bu Siti : mudah karena ada pendamping desa dari dinas sosial, dan sudah difasilitasi dan dibentuk kelompok, termasuk TKSK yang membantu penyaluran	Aktor Prosedur Respon	3
149	DISNAKER	dinas sosial, dinas koperasi, dinas perindustrian perdagangan	Aktor Rekomendasi Informan	2
150	DISNAKER	Dinas pertanian	Aktor Rekomendasi Informan	2
151	REKAP BPS	DINSOS atau DISNAKER itu yang lebih mengenai kasus ini. ^{[P] [SEP]}	Aktor Rekomendasi Informan	2
152	REKAP DINAS KESEHATAN	yankes dengan Bu Nurul. ^{[P] [SEP]}	Aktor Rekomendasi Informan	2
153	REKAP DESA WATESUMPAK	Pak Santoso terkait pemantauan BLT. ^{[P] [SEP]} dan TKSK (DINSOS) yaitu PAK JOHANA. ^{[P] [SEP]}	Aktor Rekomendasi Informan	2
154	Rekap Wawancara Dinsos	LSM yang mengkritik kalau bantuan tidak teoat sasaran	Aktor Respon	2
155	REKAP DESA TEMON	N : Kalau di kantor desa siapa yang bertanggung jawab menangani bantuan-bantuan tersebut? ^{[P] [SEP]} Y : Kan ada operatornya yang masukkan data, kalau PKH ada pendampingnya dari DINSOS. Ya kalau yang biasa ya saya atau kasi Pelayanan. ^{[P] [SEP]}	Aktor Respon	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
156	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kalau punya kenalan dewan kenalan sama siapapun yang terkait pembangunan desa, silahkan datang ke desa, Mari sama-sama kita membantu pembangunan desa kita	Aktor Respon	2
157	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	dari provinsi itu turun ke sini kan NPHDnya sudah ada di sana namanya Desa siwonorejo survei datang ke sini, bu mike itu yang dari provinsi	Aktor Respon	2
158	Rekap Wawancara Mojojajar	ada bantuan jamban, untuk ODF sekitar 20 rumah dari desa dan dari dinkes 28 ^{[P]_{SEP}}	Aktor Respon Sarana Prasarana	3
159	DISNAKER	Tapi terkadang karena anggaran kita press banget. Kadang kadang kita dapat teguran dari LSP. Kalau dari sisi peserta bener sih, minimal kita sudah 16. Tapi dari sisi waktu pelaksanaannya kadang kadang kita terhambat karena anggaran ini kecil.	Alokasi Dana Masalah	2
160	DISNAKER	Kalau dari sisi anggaran, kalau dari sisi anggaran kita, karena anggaran kita kecil, kita belum sampai ke level hibah. ^{[L]_{SEP}}	Alokasi Dana Masalah	2
161	Rekap Wawancara Disperindag	kira-kira dalam penyusunan rencana bantuan sosial tersebut apakah ada permasalahan yang dihadapi ya bu? ^{[P]_{SEP}} Bu Nunuk :kita misalnya penyusunan diawal itu masalahnya kekurangan anggaran, setelahnya tidak ada. Misal kita butuh anggaran untuk apa sekian tapi tidak direalisasikan gitu aja	Alokasi Dana Masalah	2
162	REKAP DESA WATESUMPAK	Cuma ada bantuan yang dari koramil. Itupun hanya bantuan untuk memperbaiki fasad depan rumah saja Cuma ada material namun kuantitasnya hanya sedikit. Kalau bedah rumah ada sekitar 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada lagi. ^{[P]_{SEP}}	Alokasi Dana Masalah Respon Sarana Prasarana	4
163	Rekap Wawancara Dinsos	Untuk tahun ini anggaran sekitar 9,4 Milyar. Itu rencananya kemungkinan akan disalurkan di semester 2 (juni-desember).	Alokasi Dana Respon	2
164	Rekap Wawancara Dinsos	Tahun kemarin ada stunting, disabilitas dan lansia. Tahun ini masih belum ada rencana lebih lanjut.	Alokasi Dana Respon	2
165	Rekap Wawancara Dinsos	untuk bantuannya sendiri diberikannya berapa kali ya pak dalam setahun? ^{[P]_{SEP}} Pak Nugroho : 7 kali dalam satu tahun, karena anggarannya 11 m ^{[P]_{SEP}}	Alokasi Dana Respon	2
166	Rekap Wawancara Desa Trowulan	ada sih cuma alokasi bantuan khusus, kalau dana desa itu tidak seberapa, difokuskan untuk ketahanan pangan dulu	Alokasi Dana Respon	2
167	Rekap Wawancara Desa Trowulan	rumah tidak layak huni itu desa mengadakan Mbak, setiap tahun itu.. tahun kemarin itu 5 rumah, tahun ini satu rumah ^{[P]_{SEP}} d : itu anggaran dari? ^{[P]_{SEP}} e : dana desa	Alokasi Dana Respon Sarana Prasarana	3
168	DISNAKER	Apa yang kita bisa berikan bantuan ya. ^{[L]_{SEP}} Di era covid kemarin terkait bantuan bantuan sosial. Apalagi masa masa kelamnya kita itu ya covid.	Bantuan Insidental	1
169	DISNAKER	Jadi ada bantuan pada waktu covid waktu itu ada padat karya itu anggaran itu dari	Bantuan Insidental	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		Kementerian yang harus di diberdayakan. ^[P1] ^[SEP]		
170	Rekap Wawancara Disperindag	sesuai dengan event-event tertentu. Misalnya kemarin saat kenaikan BBM bantuannya kemarin kita berupa uang, berupa barang. ^[P1] ^[SEP]	Bantuan Insidental	1
171	Rekap Wawancara Japanan	bantuan sosial tunai juga ada sejak covid masih berjalan hanya saja belum ada penyaluran lagi untuk tahun ini kalo dulu tiap bulan frekuensinya tapi sekali keluar biasanya dirapel, misal BPNT itu untuk sekian bulan. ^[P1] ^[SEP]	Bantuan Insidental	1
172	Rekap Wawancara Kedungsari	ada juga bantuan BLT DD dimulai dari tahun 2020 untuk keluarga terdampak covid.	Bantuan Insidental	1
173	Rekap Wawancara Disperindag	Nisa :dan untuk bantuan tersebut apakah tetap berjalan setelah covid selesai atau sudah selesai saat covid selesai? ^[P1] ^[SEP] Bu Nunuk :tergantung kegiatannya, kalau masker kan sudah tidak	Bantuan Insidental Masalah Pandemi Covid-19	3
174	Rekap Wawancara Desa Trowulan	BST yang provinsi itu lama sudah tidak keluar tapi kalau Desa masih tetap jalan cuma dikurangi kan kemarin covid covid sekarang kan covid sudah tidak seberapa terus Dikurangi jumlahnya,	Bantuan Insidental Pandemi Covid-19	2
175	Rekap Wawancara Kedungsari	da BPNT yang masih berjalan, BPUM berhenti di 2020, lalu ada BST dan PKH ada juga bantuan BLT DD dimulai dari tahun 2020 untuk keluarga terdampak covid. Sekarang ada tapi hanya untuk kemiskinan ekstrim.	Bantuan KE Bantuan Sosial	2
176	REKAP DESA TEMON	Tapi dari pemerintah desa sedang mengajukan proposal untuk modal masyarakat kemiskinan ekstrim. ^[P1] ^[SEP]	Bantuan KE Rencana Respon	3
177	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Kemiskinan Ekstrim juga ada, Pak? Bantuan berupa apa? ^[P1] ^[SEP] Pak Haryanto: Berupa modal untuk bekerja. ^[P1] ^[SEP]	Bantuan KE Respon	2
178	Rekap Wawancara Desa Trowulan	e : kalau dilihat sepiantas sih di sini itu banyak yang rumahnya bagus-bagus, masih muda, tapi ekonominya, Rumahnya bagus tapi ekonominya pas-pasan nggak kerja nggak dapat apa-apa, itu banyak. ^[P1] ^[SEP] S : Ada yang rumahnya jelek, orangnya tua, tapi asetnya masih punya sawah punya apa itu masih ada , bantuan kan diberikan ke yang tua tadi, ya kan nggak mungkin yang muda, itu kendalanya di situ, agak sulit kalau kita kriteria, kita sendiri yang tahu kesehariannya, repot, nggak dikasih itu nggak pantes, dikasih itu asetnya dihitung-hitung sama yang bagus hanya rumahnya saja tapi kalau tidak bekerja ya susah, yang tua itu nggak kerja setahun masih bisa makan karena punya aset. kita hanya perbandingan sebagai bahan nanti di pimpinan ini loh permasalahannya tidak semudah yang kita lihat di lapangan, belum tentu. ^[P1] ^[SEP] e : Harapan kita pihak surveyor kan sering ikut survei-survei, harapannya jawabannya yang cocok kalau nggak ya udah nggak, Iya ya Iya, cuman yang di lapangan sendiri kan tidak bisa makanya aku kalau terlanjur Gimana mau dimasukin Ya gimana Rumahnya bagus, gak dimasukin Ya dia nggak	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Hambatan Program Kultur Masalah	4

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		bisa makan, pas-pasan kemarin kan posisinya kadang kalau dimasukan yang yang sini iri. harus analisa sendiri itu repot		
179	Rekap Wawancara Desa Trowulan	terus begini Mbak terkadang sudahlah usia, sudahlah rumahnya kurang layak, tetapi di dalamnya asetnya juga ada, di situ loh nggak bisa mengelola atau tidak bisa memanfaatkan aset ada yang rumahnya bagus, tapi hanya itu saja yang dipunya, kalau kita kriteria sampai detail itu kita agak sulit, rumahnya jelek, orangnya sudah tua, pendidikannya rendah, tapi asetnya ratusan juta, asetnya itu tapi tidak bisa mengelola, nah kita kan sulit kalau melihat indikator orang miskin di beberapa item, nggak ada semuanya	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Kriteria Penerima Masalah Modal Terbatas	4
180	Rekap Wawancara Dinsos	Nisa : lalu kira-kira apakah ada kendala ya pak dalam menyusun program bantuan sosial tadi. Pak Nugroho :kendala si pasti ada, yang menjadi penyebab adalah LSM yang mengkritik kalau bantuan tidak teoat sasaran,	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Masalah	2
181	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa :Lalu penyebab utama dari kemiskinan di wilayah bapak sendiri apa ya pak. Pak Saroni : karena bantuan tadi mbak, karena terkadang bantuan masih tidak tepat sasaran. Kalau misalkan tidak ada pemberian bantuan, hanya kebutuhan masyarakat seperti pupuk. Misal pupuk murah harganya, tidak butuh ada bantuan.	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Masalah Penyebab	3
182	Rekap Wawancara Japanan	Harapan saya setidaknya bantuan itu harus jelas sasaran, karena terkadang dari pemerintah desa hanya mengikuti permintaan dan selama ini telah tersalurkan.	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Masalah Rencana	3
183	REKAP DESA TEMON	N : Dari desa sendiri pemantauan terkait bantuan yang tersalur apakah sudah tepat sasaran apa belum gitu bagaimana? Y : Sudah tepat sasaran kok, kita sangat ketat terkait pemantauan. Karena sempat ada kasus yang bukan warga asli Desa Temon mengaku2 dan meminta daftar namun kami sangat ketat dalam melakukan pemantauan sehingga akan tepat sasaran bantuannya.	Bantuan Kurang Tepat Sasaran Respon	2
184	Dinas Pendidikan	Jadi yang jelas itu kemarin kita koordinasi sama bidang terkait. Di sini itu ada program PIP atau KIP, kartu indonesia pintar. Kalau pengampunya pengampu sebagai kegiatan itu sampai mengeluarkan kartu KIP Dinas Sosial, tapi sasarannya itu di kita Dinas Pendidikan anak anak yang kurang mampu. Orang tuanya itu mengurus surat dari desa ke Dinas Sosial. Jadi kita itu menerima data terkait KIP Tolong ini ada berapa anak itu hasilnya. Tapi prosesnya orang tua itu yang mendaftar, artinya kita dikasih informasi bahwa sekolah ini akan dapat KIP berapa orang, namanya siapa aja gitu, itu yang jelas itu dukungan untuk kemiskinan paling tidak	Bantuan Sosial	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		itu sangat membantu sekali. Dan orang tua orang tua kemarin. ^{[P1] [SEP]}		
185	Rekap Bapedda	PBI BNPT	Bantuan Sosial	1
186	Rekap Wawancara Dinsos	PBI	Bantuan Sosial	1
187	Rekap Wawancara Dinsos	Pbi ini ada 2, dulu emang keduanya dibawah dinas sosial baik PBI JKN dari iuran kemensos atau dari daerah kerja sama dengan daerah, sekarang UHC dari dinas kesehatan yang kerja sama dengan bpjs. Karena uhc semua dipengang oleh bpjs oleh dikes. Dulu yang bayar juga dinkes dengan sasaran orang miskin. ^{[P1] [SEP]}	Bantuan Sosial	1
188	Rekap Wawancara Dinsos	satu ada Bpnt, untuk sembako 200rb 1kk, bansos pkh,	Bantuan Sosial	1
189	Rekap Wawancara Beratkulon	kadang ada bantuan dari lembaga pendidikan di desa. Jadi yang butuh bantuan akan dicari dan dibantu untuk sekolah hingga SMA mungkin sppnya gratis atau ada bantuan disamping itu juga ada PKH	Bantuan Sosial	1
190	Rekap Wawancara Beratkulon	Lalu untuk program-program seperti BPNT, Sembako, PKH dll masih berjalan ya pak? ^{[P1] [SEP]} Pak Mulyadi : Masih mbak, dan kadang bisa dapat BPNT dan bantuan BLT, lalu ada bantuan BLT DD yang terakhir tahun 2020 ada juga terkadang bantuan sembako dari bumdes. ^{[P1] [SEP]}	Bantuan Sosial	1
191	Rekap Wawancara Japanan	kalau masalah bantuan pangan tiap tahun kita ada dari dinsos melalui kecamatan ada namanya BPNT sembako nontunai, termasuk PKH terus bantuan sosial tunai juga ada sejak covid masih berjalan hanya saja belum ada penyaluran lagi untuk tahun ini kalo dulu tiap bulan frekuensinya tapi sekali keluar biasanya dirapel, misal BPNT itu untuk sekian bulan	Bantuan Sosial	1
192	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Disini saya juga menemukan bantuan sembako, untuk bantuan tersebut apakah masih berjalan ya pak walau covid telah usai? ^{[P1] [SEP]} Pak Lukman : Masih, karena bantuan tersebut sebelum covidnya sudah ada dan sekarang bantuannya non tunai dan dapat digunakan di toko-toko yang telah ditunjuk.	Bantuan Sosial	1
193	Rekap Wawancara Japanan	Yaitu PKH, itu untuk Lansia dan keluarga yang anaknya masih bersekolah dia keluarnya 6 bulan sekali dari anaknya SD hingga SMA hingga lulus. Kalau berupa beasiswa dan pelatihan pernah tapi untuk tahun ini belum ada	Bantuan Sosial	1
194	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Untuk bantuan di bidang kesehatan apakah ada pak? ^{[P1] [SEP]} Pak Lukman : Ada misalnya untuk ibu hamil, anak balita dan rehabilitasi sarana kesehatan. ^{[P1] [SEP]}	Bantuan Sosial	1
195	Rekap Wawancara Kedungsari	ada juga untuk insentif untuk guru khususnya guru paud dan TK. ^{[P1] [SEP]}	Bantuan Sosial	1
196	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : lalu didesa ini sendiri program-program seperti BPNT, BPUM dll masih berjalan ya pak? ^{[P1] [SEP]} Pak Saroni : masih hingga saat ini. ^{[P1] [SEP]}	Bantuan Sosial	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
197	Rekap Wawancara Mojojajar	disini ada bantuan untuk post paud yaitu pemberian honor guru	Bantuan Sosial	1
198	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Lalu untuk mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di desa bapak sendiri, apa ya pak? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: SD sampai SMA. Untuk sarjana masih sedikit. ^{{P}{SEP}} Nisa: Untuk program-program yang telah dijalankan pemerintah di desa ini sendiri, apakah masih berjalan? seperti PBNT, BPUM, BST, dan PKH? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: Masih berjalan. Ada pendampingan pembagian beras untuk BLT, Kemiskinan Ekstrim, Dana Desa juga ada. ^{{P}{SEP}}	Bantuan Sosial	1
199	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Apakah ada program bantuan dalam bidang pendidikan juga, Pak? Seperti ada penyuluhan, workshop, atau beasiswa? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: itu biasanya dari lembaga pendidikannya langsung, seperti pelatihan. ^{{P}{SEP}}	Bantuan Sosial	1
200	REKAP DESA TEMON	N : Terkait bantuan BPNT di Desa Temon apa masih berjalan pak? ^{{P}{SEP}} Y : Masih berjalan. ^{{P}{SEP}} N : Kalau yang bantuan usaha mikro (BPUM) apa masih jalan? ^{{P}{SEP}} Y : ada tapi kalau sampai sekarang kurang tau mba, soalnya kan itu tidak langsung lewat desa tapi masih dimasukkan di TKS. ^{{P}{SEP}} N : Kalau bantuan langsung tunai itu apa juga masih berjalan pak? ^{{P}{SEP}} Y : Masih berjalan yang dari dana desa saja. Yang dari pemerintah tidak ada. ^{{P}{SEP}} N : Kalau PKH apa masih berjalan juga? ^{{P}{SEP}} Y : PKH masih berjalan lanjut terus. ^{{P}{SEP}}	Bantuan Sosial	1
201	REKAP DESA WATESUMPAK	Disini ada BPNT, SEMBAKO, trus PKH yang dari desa BLT dari dana desa. ^{{P}{SEP}} N : Kalau bantuan produktif untuk usaha mikro gitu ada tidak ya pak? ^{{P}{SEP}} H : Ada Cuma kecil dan masih berjalan, tidak semua hanya Sebagian. ^{{P}{SEP}} D : Kalau program bantuan dalam bidang Pendidikan seperti PIP apa masih ada? ^{{P}{SEP}} H : Ada PIP, beberapa yang dapat PIP masuk dalam data kemiskinan. ^{{P}{SEP}} D : Bantuan yang bidang Kesehatan apa masih ada juga? ^{{P}{SEP}} H : Oh KIS, iya masih ada	Bantuan Sosial	1
202	Rekap Wawancara Desa Pakis	N : Kalau terkait bantuan-bantuan yang ada ini, kalau BPNT masih berjalan ya mas? ^{{P}{SEP}} R : masih berjalan. ^{{P}{SEP}} N : Kalau Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). ^{{P}{SEP}} R : itu ga setiap.. beda sama BPNT ya, BPNT itu rutin tapi kalo yang mikro itu ga setiap itu keluar, tapi masih ada, cuma dalam satu tahun Cuma beberapa kali. ^{{P}{SEP}} N : Kalau BLT? ^{{P}{SEP}} R : BLT terus ada. ^{{P}{SEP}} N : Kalau PKH? ^{{P}{SEP}} R : iya PKH (masih berjalan). ^{{P}{SEP}} N : Kalau bantuan sembako diluar BPNT? ^{{P}{SEP}} R : Kalau bantuan sembako diluar BPNT tidak ada, karena BPNT sudah mencakup sembako, jadi biasanya kalau keluar itu bantuan BPNT, BLT dan PKH itu bareng jadi satu (tegabung dalam penyerahannya). ^{{P}{SEP}} D : Kalau yang PIP itu bagaimana? PIP pendidikan. ^{{P}{SEP}} R : kalau	Bantuan Sosial	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		Pendidikan itu biasanya kan kebanyakan dari sekolahnya langsung nanti diuruskan ke desa, ^[P] _[SEP] Jadi tidak melalui desa dulu, jadi pihak sekolah yang langsung menangani ^[P] _[SEP] D : tapi masih ada ya mas? ^[P] _[SEP] R : banyak.. ^[P] _[SEP] D : yang KIS? ^[P] _[SEP] R : yang KIS iya jalan		
203	Rekap Wawancara Desa Trowulan	berjalan bpnt itu berjalan, PKH itu masih berjalan, BLT-DD itu yang masih di jalan, BST yang provinsi itu lama sudah tidak keluar tapi kalau Desa masih tetap jalan cuma dikurangi kan kemarin covid covid sekarang kan covid sudah tidak seberapa terus Dikurangi jumlahnya, kalau untuk PKH sama BLT itu masih jalan rata-rata ya banyak warga sini yang dapat PKH itu, untuk anak sekolah ya banyak untuk lansia ya banyak. ^[P] _[SEP] D : kalau yang BPUM Bu? ^[P] _[SEP] E : BPUM itu masih jalan kok kemarin, Tahun kemarin itu terakhir untuk tahun ini belum, Tahun 2022 itu kemarin bulan 11 atau bulan 12 masih ada yang dapat. ^[P] _[SEP] H : kalau bantuan sembako di luar bpnt? ^[P] _[SEP] E : itu dari Kecamatan kadang Itu dapat Hanya beberapa kali, biasanya dapat kok dari Kecamatan kan ada beberapa kali kayak bumdesma, kayak simpan pinjamnya itu kan Dulu bumdesma itu Ya mungkin dikasih ke desa, Terus kemarin dari dinas koperasi dapat, ada yang dapat bantuan ^[P] _[SEP] D : kalau yang pendidikan tadi kan ada ya Bu yang pip kalau yang kesehatan itu ada? ^[P] _[SEP] E : kesehatan itu KIS Iya dapat sekarang kan dari dinas sosial itu ada usulan, tanggal berapa itu setiap bulan kalau memang benar-benar tidak mampu bisa, Ada kok kemarin juga ada yang dapat	Bantuan Sosial	1
204	Rekap Wawancara Mojojajar	Bu Siti : kalau untuk bidang kesehatan ada fogging, pmt untuk balita dan ibu hamil untuk mnecegah stunting dan pmt untuk balita stunting, dan pemerian bantuan untuk posyandu lansia hanya saja masih minim	Bantuan Sosial Bantuan Stunting Bantuan Terbatas Disabilitas dan Lansia Edukasi Kesehatan Masalah Program Kesehatan Stunting	8
205	Rekap Wawancara Beratkulon	Pak Mulyadi : Kalau untuk bantuan kesehatan akan dianggarkan di desa, pertahun. Untuk posyandu, untuk lansia posbindu dan frekuensinya 1 bulan sekali. Lalu ada bantuan untuk ibu hamil setiap 1 tahun sekali. Kemudian ada juga bantuan pangan tambahan 1 tahun 2 kali kegiatan khususnya untuk yang stunting dan sudah dimasukkan ke anggaran	Bantuan Sosial Bantuan Stunting Disabilitas dan Lansia Program Kesehatan Respon Stunting	6
206	Rekap Wawancara Kedungsari	kemarin kita telah menganggarkan BLT untuk keluarga ekstream 10% dari dana desa dan sudah tersalurkan bantuannya dari januari hingga maret ^[P] _[SEP]	Bantuan Sosial Bantuan Terbatas	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
207	REKAP DINAS KESEHATAN	nah kebetulan Kalau di kami itu tanpa melihat status mbak ^{[1][1]} Ya mungkin kalau misalnya anggaran saya cukup 100 orang dan di situ ada balita ^{[1][1]} Gizi kurang 100 orang atau 120 orang, berarti kan kurang 20 ya mungkin itu nanti prioritas yang tak diberikan. Mungkin itu yang kurang mampu dulu gitu ya gitu ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Bantuan Terbatas Kriteria Penerima Masalah Respon	5
208	REKAP BPS	Ada, pertanyaan apakah anda mendapatkan bantuan PIP, program sembako, atau BPNT, BLT dll itu ada semua. Ada besarnya dan terakhir dapatnya kapa nada semua ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Data, Pelaporan, Kajian	2
209	Rekap Wawancara Dinsos	Yang pasti dari PMK no 215 bruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau ^{[1][1]} Nisa : Sasaran utama dari wilayah pembagian bantuan sosial itu ada dimana ya pak? ^{[1][1]} Pak Nugroho : Tergantung lokasi dari pabrik rokoknya, tapi harus dengan KTP Kabupaten Mojokerto ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Guna Lahan Kelembagaan dan Regulasi Respon	4
210	Rekap Wawancara Dinsos	Nisa :dan untuk kriterianya sendiri yang menerima bantuan tersebut bagaimana ya pak? ^{[1][1]} Pak Nugroho :masuk ke data DTKS dan warga kabupaten mojokerto dan diusulkan oleh desa dengan alamat sesuai ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Kriteria Penerima	2
211	DISNAKER	Jadi ada 4 TKM (tenaga kerja mandiri) dan padat karya. Lokasinya di Desa Jiu Kecamatan Kutorejo, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas, Desa Randu bango Kecamatan Mojosari, Desa Talok Kecamatan Dlanggu itu untuk TKM. Pelatihannya ada tata boga sama sablon, per desa ada 20 orang yang mendapat pelatihan. untuk padat karya, dilakukan pemavingan jalan di Desa Randu Bango Kecamatan Mojosari ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Pelatihan Kerja Respon	3
212	DISNAKER	Bagaimanakah prosedur untuk pendaftaran bantuan tersebut berlangsung? ^{[1][1]} A : Enggak ada mbak itu memang dana dari Kementerian langsung turun ke bawah. Jadi tidak ada maksudnya prosedur kita minta ke Kementerian atau apa enggak itu malah di suruh ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Prosedur	2
213	DISNAKER	Adakah masalah yang menghambat dalam penyaluran bantuan kepada penerima? ^{[1][1]} A : Masalah yang menghambat sih? Enggak ada sih, dari sisi anggaran tepat waktu dari sisi material kita sudah online juga pelaksanaannya juga tepat waktu. Pembayaran juga sudah selesai semua, jadi enggak ada hal hal yang terhambat kecuali kalau kalau pansusnya itu pemberian apa gitu kan harus hibah itu harus yang nerima siapa harus jelas harus ada SK juga surat keputusan untuk pemberian hibahnya kan juga harus ada ^{[1][1]}	Bantuan Sosial Prosedur Respon	3
214	Dinas Pendidikan	Terus ada dana BOS, itu kan juga sangat membantu sehingga tidak perlu lagi membayar SPP.	Bantuan Sosial Respon	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
215	Dinas Pendidikan	Kalau untuk KIP ini bentuk bantuannya itu seperti apa sih Pak ? mereka digratiskan sekolah atau uang saku atau seperti apa Pak ? ^[PSEP] D : Kalau lebih detailnya nanti tanya sama bidang Dikdas. Setahu saya, itu nanti dana nya ditransfer ke rekening orang tua siswa diperuntukan belanja kebutuhan belajar siswa.	Bantuan Sosial Respon	2
216	DISNAKER	Di era covid kemarin terkait bantuan bantuan sosial. Apalagi masa masa kelamnya kita itu ya covid. ^[PSEP]	Bantuan Sosial Respon	2
217	DISNAKER	Apakah ada bantuan terhadap UMKM lokal baik sebelum atau sesudah covid 19? Jika ada bagaimana bentuk bantuan tersebut? . ^[PSEP] A : Kalau ngomong UMKM lokal nggak sih? Kita langsung ke masyarakat luasnya jadi enggak terkhusus di sektor UMKM kalau kita ngomong UMKM pasti dinas koperasi lebih lebih selangkah lebih maju daripada kita. Jadi ada bantuan pada waktu covid waktu itu ada padat karya itu anggaran itu dari Kementerian yang harus di diberdayakan. ^[PSEP]	Bantuan Sosial Respon	2
218	Rekap Wawancara Dinsos	Jadi untuk syarat utama untuk dapat bantuan ini adalah menjadi warga Kab Mojokerto dan sebagai buruh tani atau buruh pabrik rokok ya pak? ^[PSEP] Pak Nugroho : Iya KTP penduduk Kab Mojokerto, dia bekerja sebagai buruh pabrik rokok atau tani tembakau. Data primer pekerjaanya akan kami dapat dari pabrik atau dari PPL pertanian. ^[PSEP]	Bantuan Sosial Respon	2
219	Rekap Wawancara Disperindag	bantuan sosial yang berkaitan dengan kenaikan bbm	Bantuan Sosial Respon	2
220	Rekap Wawancara Disperindag	Nisa : lalu apakah ada bantuan untuk UMKM ya pak/bu, baik sebelum ataupun sesudah Covid-19? ^[PSEP] Bu Nunuk :ada tentu ada, ada bantuannya dan programnya yang dapat dilihat di data yang akan kami kirim. ^[PSEP]	Bantuan Sosial Respon	2
221	Rekap Wawancara Beratkulon	Bantuan mungkin berupa bantuan untuk spp sekolah dan mungkin ada bantuan untuk TK/postpaud. ^[PSEP]	Bantuan Sosial Respon	2
222	REKAP DESA TEMON	N&D : Kalau bantuan terkait Pendidikan, PIP itu ada atau tidak? ^[PSEP] Y : Kalau PIP itu yang mengajukan dari pihak sekolah, namun kita memasukkan di TKS lalu pihak sekolahnya yang mengajukan ke pusat. Biasanya kalau kesini hanya minta surat keterangan tidak mampu dan surat kalau sudah masuk dalam TKS. ^[PSEP] D : Kalau yang bantuan terkait Kesehatan (KIS) apa masih berjalan juga? ^[PSEP] Y : Oiya itu masih berjalan, banyak juga.	Bantuan Sosial Respon	2
223	Rekap Wawancara Japanan	Ada pemberian pupuk bersubsidi	Bantuan Sosial Respon Sarana Prasarana	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
224	Rekap Wawancara Dinsos	Pak Nugroho : pada prinsipnya bantuan itu dari kementrian sosial, yang dari APBD hanya satu saja yaitu BLT DBHCHT. Untuk tahun ini anggaran sekitar 9,4 Milyar. Itu rencananya kemungkinan akan disalurkan di semester 2 (juni-desember). Dengan ketentuan sebagai buruh pabrik rokok atau buruh petani tembakau. Apakah boleh untuk masyarakat miskin? Masih harus ada koordinasi. Tahun kemarin ada stunting, disabilitas dan lansia. Tahun ini masih belum ada rencana lebih lanjut. Yang pasti dari PMK no 215 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.	Bantuan Stunting Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima Program Kesehatan Stunting	5
225	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Lalu untuk program bantuan dalam bidang kesehatan apakah ada, Pak? Seperti penyuluhan mengenai stunting, penyuluhan kepada ibu hamil, atau asuransi kesehatan. Pak Haryanto: Untuk ibu hamil ada, seperti pemberian BPNT. Setiap anak-anak ikut posyandu, penyuluhan stunting juga ada, dan juga program makanan tambahan. Nisa: Untuk frekuensinya berapa kali dalam setahun? Pak Haryanto: Kalau untuk posyandu sebulan sekali untuk tiap anak umur balita. Untuk stunting baru ada perhatian lebih.	Bantuan Stunting Edukasi Kesehatan Program Kesehatan Respon Stunting	5
226	REKAP DINAS KESEHATAN	E : berarti itu program khususnya ya ibu untuk mengurangi balita stunting. BI : Iya. E : Terus kalau untuk mendeteksi jumlahnya. Gimana ya BU? BI : yaa kan kita setiap bulan ditimbang. Di posyandu-posyandu itu. E : Oh dari posyandu, kalau posyandu itu setiap desa atau bagaimana BU? BI : Ya. Kalo posyandu disini perdusun ya. E : Untuk cara mencegahnya ada nggak program program untuk mencegah stunting kan? Kalo untuk mengatasinya sudah ada lalu untuk mencegahnya apa yang biasanya dilakukan? BI : Ada enggak yah? Yaa Karena memang stunting itu ada di 1000 HPK ya 1000 hari pertama kehidupan jadi mulai hamil itu kali 30 dikali 9 bulan 570 ya kita tambah lagi 2 tahun selama 2 tahun. Ketemunya 1000 hari ketemunya. Jadi kita ramut dan kita cegah dari kehamilan ibunya. Jadi program kita itu kita mulai dari hulunya yaitu sebelum hamil. Kita juga punya kegiatan Jumat Ceria itu kegiatan ibu bupati yang turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada remaja. Pengertian stunting dan anjuran untuk minum obat tambah darah. E : Jadi pencegahannya mulai dari remaja ya Bu? BI : iyaa. E : lalu bu untuk program ODF itu kecamatan mana yang jadi sasaran utama gitu?	Bantuan Stunting Program Kesehatan Stunting	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
227	Rekap Wawancara Kedungsari	Pak Hermawan : ada, di 2023 ada juga program pencegahan stunting ada tambahan PMT, penyuluhan untuk kader posyandu kita buat kelompok kelas ibu hamil. Lalu ada program jamban stimulan juga dari desa berupa suply dana untuk kebutuhan pembuatan jamban	Bantuan Stunting Program Kesehatan Stunting	3
228	REKAP DINAS KESEHATAN	program khususnya ya ibu untuk mengurangi balita stunting. BI : Iya.	Bantuan Stunting Respon	2
229	Rekap Wawancara Beratkulon	Cuma itu kan berdasarkan pengajuan. Hanya saja yang turun siapa sajakan kita tidak tahu	Bantuan Terbatas Masalah	2
230	Rekap Wawancara Japanan	Kendalanya paling bantuan kan sifatnya mendadak, kita sudah oerbarui data tetapi yang turun datanya masih data lama. Sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan warga. Apalagi kadang orang maunya dapat semua bantuan. Lalu kita kan mengaplikasikan bantuan dari atas tidak bisa saklek sesuai dengan dari atas	Bantuan Terbatas Masalah	2
231	REKAP DESA WATESUMPAK	Ada Cuma kecil dan masih berjalan, tidak semua hanya Sebagian	Bantuan Terbatas Masalah	2
232	Rekap Wawancara Japanan	Satu harus tergabung di kelompok tani, lalu setiap anggota memiliki kuota seberapa besar lahan pekerjaannya dan pupuk itu terbatas artinya harus dapat sekian harus setor KTP di toko-toko yang bertanda khusus	Bantuan Terbatas Prosedur	2
233	Rekap Wawancara Disperindag	sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan permohonannya,	Bantuan Terbatas Respon	2
234	Rekap Wawancara Kedungsari	kendala tentu ada, terkadang bantuan tersebut tidak cair tepat waktu tetapi akan ada operator desa yang membantu mengenai hal tersebut	Bantuan Tidak Tepat Waktu Masalah	2
235	Dinas Pendidikan	itu yang jelas itu dukungan untuk kemiskinan paling tidak itu sangat membantu sekali	Dampak Manfaat Program	1
236	Dinas Pendidikan	Mungkin kalau ngomong secara langsung enggak bisa dihubungkan sama kemiskinan, setelah dibangun terus kemiskinan berkurang kan enggak bisa seperti itu. Tapi ternyata. Dari sarana prasarana yang kita bangun kegiatan belajar mengajar jauh lebih baik sehingga siswa lebih semangat belajar dan menghasilkan nilai yang baik juga	Dampak Manfaat Program	1
237	Dinas Pendidikan	E : apa program itu bisa dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan ? D : Tentu bisa, itu juga merupakan salah satu cara menekan tingginya angka pengangguran nantinya, yang mana tingginya angka pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan.	Dampak Manfaat Program	1
238	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : dari program-program yang telah terlaksana tadi bagaimana ya pak pendapat masyarakat ? Pak Hermawan : sangat terbantu	Dampak Manfaat Program	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
239	Rekap Wawancara Mojopilang	isa: Dari pendapat masyarakat sendiri, apakah merasa terbantu dari adanya program bantuan tadi? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: Merasa terbantu. Namun masyarakat masih merasa kurang. Masyarakat sendiri sudah dapat PKH, tapi minta bantuan lagi dari Dana Desa. Yang sudah dapat KIS, minta beras padahal jatah beras sedikit hanya 292 dari datanya 1669 orang. Hanya berapa persen yang dapat beras, lebih banyak yang tidak dapat beras. Kalau KIS-nya sudah mencapai dari data yang ada. Kalau PKH lebih sedikit lagi, karena hitungannya lansia dan masyarakat yang punya anak. Untuk PKH mendapatkan beras dan bedah rumah, dapat bantuan banyak. Tidak perlu bekerja sudah mendapatkan dana. ^{{P}{SEP}}	Dampak Manfaat Program Disabilitas dan Lansia Masalah	3
240	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : apakah ada perubahan kondisi kehidupan ya pak setelah masyarakat menerima bantuan tersebut? ^{{P}{SEP}} Pak Hermawan : untuk itu pasti akan berangsur-angsur membaik tetapi lebih baik tidak menerima bantuan karena jika selama 20 tahun pun diberikan bantuan ya tetap akan ketergantungan	Dampak Manfaat Program Harapan dan Usulan Kultur Masalah	4
241	REKAP DESA WATESUMPAK	Ya kalau setelah adanya bantuan-bantuan ya pasti ada perubahan. Namun balik lagi ke individu masing-masing. Kalau pemikirannya kedepan agar ekonominya bisa tertata ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau individu yang salah pasti pemanfaatannya ada yang langsung dibelikan yang tidak perlu. Sehingga memang kita harus memilih dengan baik agar tepat sasaran. Serta memberikan pengertian dan bekal bahwa bantuan ini bukan bantuan seumur hidup bahwa jika kalian sudah merasa mampu wajib melepaskan atau mengundurkan diri dari bantuan itu. Seharusnya memang dari pihak pemerintah ada peran untuk memberi pendampingan kepada masyarakat terkait hal tersebut, jadi kalo sudah mampu bantuan non tunainya dikurangi tinggal KIS (jaminan Kesehatan) nya saja. ^{{P}{SEP}}	Dampak Manfaat Program Kultur Masalah	3
242	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : apakah setelah mendapatkan bantuan tadi masyarakat di wilayah bapak mengalami peningkatan ya pak/bu? ^{{P}{SEP}} Pak Saroni : sama saja. ^{{P}{SEP}} Bu Siti :sama saja mbak. ^{{P}{SEP}}	Dampak Manfaat Program Masalah	2
243	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Selain itu, apakah ada perubahan kondisi dari masyarakat penerima bantuan tersebut setelah mendapatkan bantuan-bantuan tadi? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: Untuk itu ada pendampingan sendiri. Ada yang sudah dicoret dari list masyarakat miskin. ^{{P}{SEP}} Nisa: Berarti kalau sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik akan langsung dihapuskan namanya? ^{{P}{SEP}} Pak Haryanto: Mungkin, tapi biasanya tetap, jarang ada yang berubah.	Dampak Manfaat Program Masalah	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
244	REKAP DESA TEMON	N : Setelah adanya bantuan tersebut apakah ada perubahan kehidupan di masyarakat? ^{[P]_{SEP}} Y : Kalau saya lihat sih tidak ada, tetap saja tidak ada perubahan.	Dampak Manfaat Program Masalah	2
245	Rekap Wawancara Desa Pakis	D : Kalau setelah adanya bantuan kira-kira yang menerima bantuan tadi ada perubahan jadi yang kiranya mapu? ^{[P]_{SEP}} R : Ada tapi tidak signifikan hanya beberapa orang saja. ^{[P]_{SEP}}	Dampak Manfaat Program Masalah	2
246	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	N : tapi ada nggak ibu perubahan kondisi masyarakat setelah ada bantuan. ^{[P]_{SEP}} S : kalau perubahan kondisi masyarakat setelah ada bantuan, berubah ya untuk sekarang ini Kelihatannya sih belum berubah Mbak soalnya apa, tahun ini juga sama terus meskipun kita sudah covid sudah tidak sehebat yang tahun-tahun kemarin, sebooming tahun-tahun kemarin tetap perekonomiannya sulit,	Dampak Manfaat Program Masalah	2
247	Rekap Wawancara Desa Trowulan	n : tapi kalau dari pemerintah Desa sendiri melihat bagaimana itu ke masyarakat yang diberi bantuan itu tadi apa ada perubahan dari Kondisi kehidupan. ^{[P]_{SEP}} e : ada sebagian besar itu ada cuman ada yang tetap tetep ya ada yang berubah ya ada. ^{[P]_{SEP}} S : Dari dari 10 itu cuma 3 orang yang betul-betul berhasil dari pelatihan ada yang selesai ya udah	Dampak Manfaat Program Masalah Pelatihan Kerja	3
248	REKAP DINAS KESEHATAN	Terus kalau untuk mendeteksi jumlahnya. Gimana ya BU? ^{[P]_{SEP}} BI : yaa kan kita setiap bulan ditimbang. Di posyandu-posyandu itu. ^{[P]_{SEP}} E : Oh dari posyandu, kalau posyandu itu setiap desa atau bagaimana BU? ^{[P]_{SEP}} BI : Ya. Kalo posyandu disini perdusun ya. ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian	1
249	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk keadaan penduduk miskin di wilayah bapak sendiri bagaimana ya pak setiap tahunnya? ^{[P]_{SEP}} Pak Mulyadi : Tentunya berkurang setiap tahunnya,	Data, Pelaporan, Kajian	1
250	Rekap Bapedda	Kalau di kita ada program sinergitas, jd sinergitas itu termasuk operasional semuanya masuk. Sehingga di kita ada LP2KD dan RAD. LP2KD itu laporan	Data, Pelaporan, Kajian Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
251	Rekap Wawancara Dinsos	kerja sama hanya dalam bentuk permintaan data DTKS, untuk disandingkan mana yang masih dtks mana yang tidak. ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Kelembagaan dan Regulasi Respon	3
252	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : Untuk keadaan penduduk miskin di wilayah bapak sendiri bagaimana ya pak setiap tahunnya? ^{[P]_{SEP}} Pak Hermawan : berkurang mbak setiap tahunnya. ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Kondisi Kemiskinan	2
253	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : lalu untuk kemiskinan ekstream di wilayah bapak sendiri bagaimana ya pak kondisinya? ^{[P]_{SEP}} Pak Hermawan : sedikit ya disini, kemarin kita telah menganggarkan BLT untuk keluarga ekstream 10%	Data, Pelaporan, Kajian Kondisi Kemiskinan	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
254	Rekap Wawancara Desa Pakis	untuk penurunan itu biasanya kalau kita dari data yang disini, itu biasanya selama 6 bulan terakhir ada penurunan, penurunannya karena disini banyak data identitas yang ganda, jadi yang dukcapilnya itu ganda, jadi harus memverifikasi ulang terhadap orang yang dapat (bantuan). ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Kondisi Kemiskinan Masalah Respon	4
255	REKAP BPS	Sepertinya semua survey ada pertanyaan seperti asset yang dimiliki, fasilitas rumahnya seperti apa dan ada juga pertanyaan apakah menerima bantuan-bantuan.	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Penerima	2
256	REKAP BPS	Pertanyaan-pertanyaan sama semua dari pusat, Cuma kita dapat menganggap saja dari skor atau SNI pemerintah pusat bahwa keluarga itu tergolong miskin. ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Penerima Kriteria Rancu Masalah	4
257	REKAP DINAS KESEHATAN	meskipun Enggak masuk DTKS, tapi dia kategorinya itu harusnya memang dia enggak punya dia, misalnya tukang becak. Tapi karena anaknya bisa jadi itu rumahnya dibangun karena anaknya itu seperti itu.	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Penerima Kriteria Rancu Masalah	4
258	REKAP BPS	untuk SUSNAS sampelnya beda-beda. Contohnya Sooko kemaren 4 blok, Dawarblandong 7 blok, bangsal Cuma 1 blok. Penentuan itu dari BPS RI jadi menentukan sampel dengan metode statistic dan banyak kriterianya. Jadi di BPS RI terdapat master blok sensus nah dari situ akan diambil penimbangnya sehingga mendapatkan sampel-sampel blok di setiap daerah. ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Penerima Respon	3
259	REKAP DINAS KESEHATAN	Kan kita punya data, data kita itu data orang yang belum mempunyai jamban Kemudian kita sandingkan dengan data dari Dinas Sosial karena Dinas Sosial punya data DTKS nah data DTKS itu kan akhirnya muncul di situ.	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Rancu Masalah	3
260	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	ada kalanya kan usulan itu tidak diterima atau di mentahkan oleh pemerintah alasan salah satunya yang kita dalam sampai saat ini adalah jatuh pada syarat administrasi,	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Rancu Masalah	3
261	REKAP BPS	Paling kalau missal BPS memiliki data yang berubah, misalkan angka kemiskinan kok bertambah atau turun itu kita cross check ke Dinsos apa yang mempengaruhinya. Jadi data kit aitu dibuat dinas untuk evaluasi dll.	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Rancu Masalah Respon	4

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
262	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	karena terkait data makanya kenapa harus diadakan musyawarah insidentil, perangkat desa ini berupaya untuk memberikan bantuan mengorganisir warganya yang mana warga belum mendapat bantuan jadi kita padu padankan data antara data penerima bantuan yang dari Kementerian Sosial yang merujuk pada dinas sosial kabupaten itu kita padu padankan dengan data yang diajukan oleh desa, data yang diajukan oleh desa bersumber dari usulan masyarakat melalui RT RW yang dikemas dalam musyawarah insidentil itu tadi. adanya musyawarah kita padu padankan agar penerima ini bukan salah satu dari penerima yang ada dari Kementerian atau atau penerima dari data kami, artinya menghindari data ganda atau penerima bantuan ganda karena kalau ada penerima bantuan ganda 2 kemungkinan yang akan terjadi satu desa terkena imbasnya untuk mengembalikan atau diputus bantuannya dari pusat.	Data, Pelaporan, Kajian Kriteria Rancu Masalah Respon	4
263	Rekap Wawancara Desa Pakis	Biasanya kalau kendalanya cuma dari data yang lama itu kita tidak bisa merubah untuk yang baru jadi, orang kan itu nggak terus selamanya nggak mampu jadi ada perubahan dari KK nanti KKnya pindah, itu bisa mempengaruhi juga, jadi data-data yang dari situ kekurangannya jadi tidak bisa kita perbaiki, susah dari data yang lama	Data, Pelaporan, Kajian Masalah	2
264	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	biasanya data ini disembunyikan,	Data, Pelaporan, Kajian Masalah	2
265	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kendalanya gini kalau kita ada bantuan itu NIKnya sama yang kita usulkan double sama di dinas sosial itu, itu kan gini Mbak masyarakat itu kita jelaskan tapi beliaunya itu nggak paham, “setelah dapat bantuan diminta lagi”	Data, Pelaporan, Kajian Masalah	2
266	Rekap Bapedda	Berarti data awal yang digunakan itu selalu DTKS ya Pak? ^P _{SEP} A : Iya selalu, kalau pake data PK3E itu ndak berani. Kalau yang valid ada di data DTKS dinsos berani memberi, karna kalau memaksakan data PK3E itu untuk masuk ke DTKS nanti yang tidak seharusnya menerima bisa menerima ^P _{SEP}	Data, Pelaporan, Kajian Masalah Respon	3
267	Rekap Bapedda	Kan kita juga sudah punya data P3KE itu. Secara pendapatan itukan kemiskinan ekstrem sudah di sandingkan dengan data DTKS. Saya rasa data PK3E itu sudah valid. Kemarin temen-temen tn2k sudah ke lapangan rumahnya seperti apa. Ternayta setelah di cek dilapangan itu kok nggak sesuai. Rumahnya bangunannya bagus kemudian pekerjaan nya ada yang PNS dan TNI tapo kok ttp dapet. Tapi di DTKS itu di saring lagi ^P _{SEP}	Data, Pelaporan, Kajian Masalah Respon	3
268	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Soalnya kalau kita tidak matching sama Pak Johan data kita juga rancu ganda, kalau ganda kasihan nanti kalau menerima BLT di sini yang	Data, Pelaporan, Kajian Masalah Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		putus, BLT hanya berapa tiga kali empat kali kan ganti, kalau ini kan selamanya ^{[P]_{SEP}}		
269	REKAP BPS	Terdapat survei yang mencangkup data-data kemiskinan yaitu termasuk dalam kedua Survei SUSNAS untuk mengukur konsumsi rumah tangga dilaksanakan setahun 2 kali (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL-BULAN MARET estimasi sampai level kabupaten & SEPTEMBER estimasi sampel sampai level provinsi) sama tahun kemarin ada PRONAS (PROGRAM NASIONAL REGSOSSEC-OKTOBER NOVEMBER 2022) yang akan dilanjutkan dengan FORUM KONSULTASI PUBLIK-MEI 2023 (mengundang kepala desa dan stakeholders yang mengetahui kondisi real masyarakat). Sehingga SUSNAS untuk mengetahui data kemiskinan masyarakat secara MAKRO jadi kurang tau yang mana yang miskin karena hanya mengetahui berapa persen keluarga miskin karena perhitungannya hanya dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga, sedangkan FORUM KONSULTASI PUBLIK untuk mengetahui data kemiskinan masyarakat secara MIKRO ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Respon	2
270	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	saya mencari resensi yang ada di sini Bagaimana sih cara saya mengambil data yang di aplikasi Itu kan dikunci bisanya diambil satu persatu dan itu pun nggak bisa di-copy kita mencoba untuk mencari esensi akhirnya beberapa hari menemukan varian terbaru yang artinya dari bentuk aplikasi yang memunculkan dalam bentuk Excel padahal sebenarnya bentuknya tidak seperti itu, bentuknya itu satu monitor nuncul nama semuanya bantuan dan sebagainya, dan itu pun nggak bisa dicopy kalau menyajikan hanya print scroll baru nanti di copy paste sekarang saya mempermudah karena data itu juga diperlukan oleh desa ^{[P]_{SEP}}	Data, Pelaporan, Kajian Respon	2
271	Rekap Wawancara Japanan	Pak Lukman : Yaitu PKH, itu untuk Lansia dan keluarga yang anaknya masih bersekolah dia keluarnya 6 bulan sekali dari anaknya SD hingga SMA hingga lulus. Kalau berupa beasiswa dan pelatihan pernah tapi untuk tahun ini belum ada	Disabilitas dan Lansia	1
272	Rekap Wawancara Desa Trowulan	e : berjalan bpnt itu berjalan, PKH itu masih berjalan, BLT-DD itu yang masih di jalan, BST yang provinsi itu lama sudah tidak keluar tapi kalau Desa masih tetap jalan cuma dikurangi kan kemarin covid covid sekarang kan covid sudah tidak seberapa terus Dikurangi jumlahnya, kalau untuk PKH sama BLT itu masih jalan rata-rata ya banyak warga sini yang dapat PKH itu, untuk anak sekolah ya banyak untuk lansia ya banyak.	Disabilitas dan Lansia	1
273	Rekap Wawancara Dinsos	lansia, disabilitas, bumil, balita ataupun anak yang masih bersekolah ^{[P]_{SEP}}	Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
274	Rekap Wawancara Dinsos	Pak Nugroho :iya, satu ada Bpnt, untuk sembako 200rb 1kk, bansos pkh, besaran tergantung banyaknya komponen yang menerima seperti lansia, disabilitas, bumil, balita ataupun anak yang masih bersekolah	Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima	2
275	Rekap Wawancara Japanan	Pak Lukman : Ada kriteria masing masing, contoh keluarga harapan butuh lansia dan anak balitan dan tidak semua sama. Tapi ada beberapa yang menerima 2 bantuan misal BPNT dan KIS. KIS kan program kesehatan	Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima	2
276	Rekap Wawancara Mojojajar	Pak Saroni : tergantu programnya, misal pkh itu untuk yang memiliki anak usia sekolah, ibu hamil dan lansia	Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima	2
277	REKAP DESA WATESUMPAK	Sebagian penerima bantuan ada yang sakit, cacat fisik, cacat mental.	Disabilitas dan Lansia Kriteria Penerima Masalah	3
278	Rekap Bapedda	A : Iyaa karena kadang meskipun mendapat bantuan tapi tidak berpnghasilan kan tetap bantuan itu akan habis untuk makan aja. karna orang yang terdaftar miskin itu biasanya janda dan lansia jadi untuk hidup saja mereka kadang bergantung dengan anaknya saja.	Disabilitas dan Lansia Masalah	2
279	Rekap Wawancara Desa Trowulan	: kalau dari 15% tadi yang masih tergolong kurang mampu kira-kira itu penyebabnya Apakah dari pekerjaannya atau dari ada faktor lain begitu? ^[P] e : kalau segitu karena dari usia ^[P]	Disabilitas dan Lansia Penyebab	2
280	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Desa sudah maksimal mengupayakan masyarakat, masyarakatnya saja yang kurang paham itu kalau bagi saya. ^[P]	Edukasi Finansial Kultur Masalah	3
281	REKAP DINAS KESEHATAN	Kalau yang menghambat itu biasanya orang kekurangtahuan orang orang. Ya kan orang orang desa kan. Kadang kadang ada yang dia itu Pendidikannya memang sudah sudah ngerti lah	Edukasi Kesehatan Masalah Tingkat Pendidikan	3
282	REKAP DINAS KESEHATAN	kegiatan jumat ceria itu kegiatan ibu bupati yang turun ke sekolah-seklah untuk memberikan edukasi kepada remaja.	Edukasi Kesehatan Program Kesehatan Respon	3
283	REKAP DINAS KESEHATAN	yang paling utama kita beri edukasi dulu seperti susunya makanannya gitu. ^[P]	Edukasi Kesehatan Prosedur Respon	3
284	REKAP DINAS KESEHATAN	dengan kemarin kan cuma hanya dengan ini aja motivasi gitu aja kan sekarang Selain motivasi juga diberi sarana juga. ^[P]	Edukasi Kesehatan Respon	2
285	Rekap Wawancara Kedungsari	penyuluhan untuk kader posyandu kita buat kelompk kelas ibu hamil.	Edukasi Kesehatan Respon	2
286	DISNAKER	Ya sama seperti nomor tiga tadi ya. Karena tidak ada aturan, tegasnya. Jadi baik pariwisata, baik komersil atau perdagangan atau apa tidak ada yang mewajibkan berapa persen tenaga kerja lokal.	Guna Lahan Kelembagaan dan Regulasi Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
287	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Bantuannya itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah dana, pemberian material, atau langsung dibantu untuk pembangunannya? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Pemberian material dengan dana langsung ditransfer ke rekening toko bangunan. ^[P] _[SEP] Nisa: Untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, kira-kira di desa ini sudah mendapat berapa rumah? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Ada sekitar 100 rumah yang belum mendapat bantuan. ^[P] _[SEP] Nisa: Apakah ada program atau proyek strategis dari pemerintah? Seperti pembangunan jalan, rehabilitasi saluran drainase, dan sebagainya? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Untuk program seperti itu dalam 4 tahun ini belum ada. Untuk bantuan pertanian hanya ada pupuk subsidi untuk seluruh desa.	Guna Lahan Respon Sarana Prasarana	3
288	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kemarin juga saya berupaya membantu masyarakat, dimasukkan ke BLT juga rancu, yang iri tetangganya, sawahnya luas tapi dapat BLT juga,	Hambatan Investasi Kelembagaan dan Regulasi Kriteria Rancu Masalah	4
289	DISNAKER	Anggaran kita sudah terpotong dipotong direfocusing. Kalau bahasa bapeda ngomongnya direfocusing sehabis habisnya jadi sampai kita kemarin kayak kentang nganggur gitu di jejer, dipanasin dijemur gitu ya enggak ngapa ngapain kita bingung, tapi kita dituntut kinerja kita 100%. Nah ini kan lucu lucu banget kemarin kita jadi kayak orang gimana kita tapi kinerja harus ketok, ini lucu. ^[P] _[SEP] Tapi mohon maaf untuk di disnaker karena memang anggaran kita tidak signifikan gede banget jadi dalam bentuk bantuan bantuan sosial itu kita enggak bisa memberikan. ^[P] _[SEP] Tahun 2023 pun juga kita enggak ada hal hal khusus terkait pemberian bantuan karna angaran kita memang kecil. ^[P] _[SEP]	Hambatan Program Kelembagaan dan Regulasi Masalah	3
290	REKAP DESA WATESUMPAK	Ya ada yang senang kalau dapat, tapi juga banyak yang iri juga krena dia tidak tercantum Namanya dalam program bantuan sosial. Tapi ya bagaimana lagi, kita hanya bisa mengusulkan sesuai siapa saja yang berhak menerima bantuan. ^[P] _[SEP]	Hambatan Program Kriteria Penerima Kultur Masalah	4
291	REKAP DINAS KESEHATAN	: Kalau kendalanya kadang kadang mereka itu loh, kadang kadang dikasih tau itu nggak mau kadang kadang	Hambatan Program Kultur Masalah	3
292	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk bantuan itu rawan sekali, jika satu dapat yang lain bisa iri.	Hambatan Program Kultur Masalah	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
293	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : lalu bagaimana ya pak bu pendapat masyarakat mengenai bantuan tersebut? ^{[P]_{SEP}} Pak Saroni : nanti menimbulkan isu kalau yang dapat itu keluarga perangkat desa padahal tidak seperti itu. ^{[P]_{SEP}} Bu Siti :banyak yang iri mbak, karena seluruhnya ingin dapat. Harusnya ada pembaruan mbak tetapi kadang datanya masih yang lama walau sudah diperbaharui. ^{[P]_{SEP}} Nisa : berarti hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program bantuan sosial ini ya pak bu? ^{[P]_{SEP}} Pak Saroni : iya betul	Hambatan Program Kultur Masalah	3
294	REKAP DESA TEMON	Iya itu pasti ada yang iri-irian terkait siapa yang menjadi penerima bantuan. Kadang ada yang ekonominya terbilang masih mampu tapi malah dianggap tidak mampu agar mendapat bantuan. ^{[P]_{SEP}}	Hambatan Program Kultur Masalah	3
295	Rekap Wawancara Beratkulon	Yaitu tadi butuh lapangan kerja, karena kalo tidak ada lapangan kerja dari pelajar yang lulus tadi akan menganggur. Kalau bisa desa ini digali potensinya	Harapan dan Usulan	1
296	Rekap Wawancara Japanan	Harapan saya setidaknya bantuan itu harus jelas sasaran, karena terkadang dari pemerintah desa hanya mengikuti permintaan dan selama ini telah tersalurkan	Harapan dan Usulan	1
297	Rekap Wawancara Kedungsari	yang kami harapkan, mohon dibantu dalam pebciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Karena banyak yang telah lulus tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bisa juga bantuan workshop dan pembinaan yang lain. ^{[P]_{SEP}}	Harapan dan Usulan	1
298	REKAP DESA WATESUMPAK	Seharusnya memang dari pihak pemerintah ada peran untuk memberi pendampingan kepada masyarakat terkait hal tersebut, jadi kalo sudah mampu bantuan non tunainya dikurangi tinggal KIS (jaminan Kesehatan) nya saja. ^{[P]_{SEP}}	Harapan dan Usulan	1
299	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kalau kemiskinan menurut kriteria yang ada di Kemensos sudah tidak bisa diterapkan lagi untuk saat ini. ^{[P]_{SEP}}	Harapan dan Usulan	1
300	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kalau dikurangi sih enggak, kalau dikurangi harapan kita nggak dikurangi tapi setidaknya harapan kita memperbaiki, mempermudah baik Desa maupun tksk begitu putusan data yang sudah ada,kan kalau data sudah ada Sudah masuk di TKS kalau tidak beliaunya yang mutus itu harus kita yang putus itu harus ada musdes	Harapan dan Usulan Kelembagaan dan Regulasi	2
301	Rekap Wawancara Mojojajar	semoga dikaji ulang dan djuga yang paling kami butuhkan adalah bantuan pupuk untuk petani tadi	Harapan dan Usulan Sarana Prasarana	2
302	Dinas Pendidikan	Kalau pengampunya pengampu sebagai kegiatan itu sampai mengeluarkan kartu KIP Dinas Sosial, tapi sasarannya itu di kita Dinas Pendidikan anak anak yang kurang mampu.	Kelembagaan dan Regulasi	1
303	REKAP DINAS KESEHATAN	alau nggak salah ada surat dari gubernur, kalau bahwa Kabupaten di seluruh Jawa Timur harus sudah ODF di tahun 2024, makanya ini Kabupaten yang belum ofd panik semua dia.	Kelembagaan dan Regulasi	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
304	REKAP DESA WATESUMPAK	Jadi di MUSDES itu ada LPM, RT/RW, Perangkat jadi mengusulkanlah mereka. Jadi kalau masyarakat ingin mendaftar ya langsung bilang ke kepala dusun. Tapi tidak bisa kalau semua meminta bantuan, sehingga kita sebagai kepala dusun dan penentu harus pintar-pintar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya masyarakatnya. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Kriteria Penerima Respon	3
305	Rekap Wawancara Desa Trowulan	pada musyawarah desa sama kepala dusunnya itu lebih pahamarganya, RT RW BPD itu semua terlibat untuk perangkan itu makanya di situ tarungnya, debatnya, yang tahu kan warga sekitar tapi tetap ada perangkan nggak tiba-tiba kita semua dimasukkan, karena ada kuota nanti disaring mana yang benar-benar layak ^{[P]_{SEP}} : kalau ini Bu dari masyarakatnya sendiri Mengajukan sendiri kayak saya butuh bantuan atau emang harus dipilih dari musyawarah desa itu. ^{[P]_{SEP}} : bisa warga itu kan ya itu tadi bilang ke Pak RT atau kepala dusun menyampaikan unek-uneknya nanti kepala dusun bermusyawarah terus gimana ini sarannya itu semua gimana? kalau memang terbaik yang dipakai begitu ^{[P]_{SEP}} : Tetap desa menampung usulan atau permintaan dari masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu kita masukkan PDT desa nanti kita akan mengajukan kalau sudah masuk di PDT , tapi tetap kita rangking, Tidak ujung-ujug semua orang langsung diterima kita tetap musyawarah dari rt-nya dari tetangga-tetangganya tidak mungkin kalau Wah ini orang tidak punya tapi tabungannya banyak ya kan?	Kelembagaan dan Regulasi Kriteria Rancu Masalah Prosedur Respon	5
306	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : lalu di desa ini sendiri kan terdapat pabrik pak, apakah ada lapangan kerja yang diserap dari pabrik tersebut? ^{[P]_{SEP}} Pak Saroni : 80% dari pabrik itu harus dari warga sini, tetapi masih belum berjalan hingga saat ini. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Masalah	2
307	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Apakah ada koordinasi juga antara pemerintah desa dengan aktor-aktor di luar pemerintahan? Misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, atau ada dari perusahaan swasta yang membantu program pengentasan kemiskinan ini. ^{[P]_{SEP}} Pak Haryanto: Tidak ada. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Masalah	2
308	REKAP DESA TEMON	ada tapi kalau sampai sekarang kurang tau mba, soalnya kan itu tidak langsung lewat desa tapi masih dimasukkan di TKS. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Masalah	2
309	Dinas Pendidikan	Jadi untuk monitoring nya ini agak susah ya Pak ^{[P]_{SEP}} D : Iya, bisa lewat peran sekolah, apakah kebutuhan siswa nya ini sudah terpenuhi setelah mendapat bantuan KIP apa belum. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi monitoring Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
310	REKAP DINAS KESEHATAN	kalau monitoring itu dinkes kan punya kepanjangan tangan di puskesmas puskesmas kita punya 27 sanitarian kemudian setelah di desa desa kita punya juga kader kesehatan setiap desa. Dari situ nanti kita bekerja sama, katanya. Kemarin ketika kita mendata STBM untuk STBM 5 pilar, meskipun baru terdata beberapa desa, tapi kita tetap kerja sama sama kader. Artinya ya kita harus merawat kader juga karena Seperti itu bagaimanapun kita butuh. ^{[1][1][1]}	Kelembagaan dan Regulasi monitoring Respon	3
311	DISNAKER	Gini, kita ini ada 2 jenis pelatihan, pelatihan kemampuan dasar dan pelatihan terkompetensi. ^{[1][1]} Kalau pelatihan dasar ini, kita hanya diberikan kemampuan kemampuan dasar. Jadi sekedar dia punya misalkan ngebengkel, oke aku akhirnya punya kemampuan lepas knalpot lepas mesin lepas busi atau apa ganti busi, ganti ban. ^{[1][1]} Setelah sudah punya kemampuan itu akhirnya dia punya inisiatif buka bengkel kecil kecilan bisa seperti itu, tapi secara spesifik untuk dia terkompetensi, dia harus punya kemampuan dasar dulu, jadi peserta peserta pelatihan yang kemampuan dasar yang sudah pernah dilatih atau masyarakat yang sudah punya kemampuan dasar mau lebih advanced. ^{[1][1]} Nah kalau sudah advance diikutkan pelatihan kompetensi kita kerja sama dengan desa desa dengan kecamatan untuk mendata masyarakatnya yang sudah pernah ikut latihan yang sudah punya kemampuan ingin punya sertifikat kompetensi kita ikutkan di situ ada komputer, ada tata boga ada menjahit, service AC. ^{[1][1]} Di situ kalau sudah advance sudah lulus ujian dapat sertifikasi kompetensi dari LSP, lembaga sertifikasi profesi, di situ nanti didaftarkan di bagian bidang penempatan tenaga kerja. ^{[1][1]}	Kelembagaan dan Regulasi Pelatihan Kerja Rencana Respon	4
312	DISNAKER	Ini kita ada malah pelatihan operator alat berat. Kerja sama dengan PUPR, alatnya kita sewa.	Kelembagaan dan Regulasi Pelatihan Kerja Respon	3
313	DISNAKER	Jadi gini kita punya data nih. Perusahaan perusahaan mana yang punya lembaga pemagangan kan harus ada rekom dari kita. Contoh ini perusahaan memberikan informasi bahwa tahun ini kita ada pemagangan untuk. 100 orang misalnya, Dari 100 orang ini kan kita informasikan ke masyarakat. Siapa yang mau? Kita berikan kesempatan mendaftar. Jadi seperti itu. ^{[1][1]}	Kelembagaan dan Regulasi Prosedur Respon	3
314	Rekap Wawancara Japanan	Kita sendiri ada musyawarah desa, karena kita punya anggaran dana desa dan harus dilaporkan setiap pengeluaran setiap tahunnya	Kelembagaan dan Regulasi Prosedur Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
315	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : lalu bagaimana ya pak koordinasinya ^{[P]_{SEP}} Pak Hermawan : tentu dengan musyawarah desa, kita undang tokoh masyarakat dan lembaga desa terkait penentuan bantuan tersebut ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Prosedur Respon	3
316	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	tetap ke Desa nanti bantuan yang akan diberikan itu apa kita koordinasi, terus nanti jelas yang ngasih bantuan kan butuh Data nama yaitu Tadi nanti kita sinkronkan jangan sampai bantuan yang dari luar tadi itu tumpang tindih dengan bpnt dari dinas sosial pokoknya kalau tumpang tindih dari dinas sosial nanti cemburu. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Prosedur Respon	3
317	Dinas Pendidikan	Jadi yang jelas itu kemarin kita koordinasi sama bidang terkait.	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
318	Dinas Pendidikan	Sekarang itu kita sedang bekerja sama dengan UNICEF terkait ATS (anak putus sekolah). Ternyata kemarin itu lihat itu. Sampai kerja sama dengan dinas desa Sampai terjun ke lapangan langsung mendata apa masih ada anak putus sekolah di setiap rumah. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
319	Dinas Pendidikan	masyarakat yang harus berperan aktif mendaftarkan apabila ingin mendapatkan KIP tadi. Tinggal nanti memenuhi syarat atau tidak itu datanya ada di dinas sosial. Kalau dulu ketika penjangkaran ini dari dinas pendidikan lewat sekolah mungkin banyak yang bisa mendapatkan bantuan. Lantas mengapa kok dirubah begini itu karena yang memiliki kewenangan serta kompetensi untuk menjangkarkan masyarakat miskin itu ya memang dinas sosial, sehingga tepat sasaran. Jadi bisa dibidang disini dinas pendidikan sebagai pelaksana, sedangkan dinas sosial sebagai monitoring dan evaluasi. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
320	DISNAKER	yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas tenaga kerja, secara spesifik secara khusus di kami di kepmen 050-5889 terkait nomenklatur, program kegiatan dan sub kegiatan yang kami laksanakan itu tidak merujuk ada program khusus terkait ngomong masalah kemiskinan.	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
321	DISNAKER	Yang kedua ada program penempatan kerja, jadi ada 2 program itu. ^{[1]_{SEP}} Kalau secara global kita punya 3 program sebetulnya. Tapi yang satunya program hubungan industrial itu tidak tidak tidak untuk langsung masyarakat sebetulnya langsung ke masyarakat. ^{[1]_{SEP}} Tapi dia hanya menangani kondisi kondisi hubungan industri yang sudah berjalan sudah berjalan. Jadi jangan sampai kereta itu keluar dari relnya. ^{[1]_{SEP}} Seperti penegakan aturan, pencegahan perselisihan itu kita laksanakan. ^{[1]_{SEP}} Tapi untuk yang bersinggungan dengan program pengentasan kemiskinan ini kita punya program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sama program penempatan tenaga kerja. ^{[1]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
322	DISNAKER	E : Jadi program program ini saling berkesinambungan ya Pak ? ^[SEP] A : Ya memang harusnya seperti itu. ^[SEP]	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
323	DISNAKER	Jadi tidak pernah ada peraturan secara khusus yang mengatakan bahwa setiap perusahaan yang berdiri di wilayah Kabupaten Mojokerto harus menyerap tenaga kerja lokal. ^[SEP] Tapi ada kebiasaan yang tidak tertulis. Biasanya dilakukan oleh perangkat desa. ^[SEP] Oh iya jadi misalkan ada pabrik baru berdiri terus pamong desanya. ^[SEP] Dengan perusahaan korea atau apa Kim Jong un atau siapa lu bikin pabrik di wilayah desaku nih? Tolong lah warga warga desaku, pemuda pemudanya kamu ambil sebagai pekerja 30% 40% sisanya 60 kamu ambil dari luar terserah kamu. Bisa seperti itu ya tinggal kesepakatan saja. Kebiasaan.	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
324	REKAP DINAS KESEHATAN	Jadi 2014 ada permenkes nomor 4 tahun 2013 itu dari situ sudah ada bahwa yang namanya STBM 5 pilar, nah pilar yang pertama itu ODF nah dari situ, makanya kita mengejar paling tidak yang pertama harus ODF, kenapa nama salah satu strategi untuk menjadi Kabupaten sehat juga harus 100% ODF Itu yang pertama kemudian dari Kabupaten sehat itu kita setelah mengacu ke itu ke ODF nya. Nah orang orang di sini kan otomatis kalau belum ODF semua kita harus mengedepankan kita jalan dulu nggak dikit jalannya karena dulu kan Pertama pendataan. Dulu mana mana yang memang orang yang sudah ada indikasi ODF atau desa-desa mana yang Akhirnya tahun 2021 itu. Ternyata di sini itu orang orang itu sudah punya mempunyai sarana gitu. akhirnya kita update datanya. Kemudian kita tanyakan yang ODF sebelah mana? Karena ternyata udah enggak bisa langsung gitu langsung 100% di seluruh Kabupaten yang ada di Jawa timur belum ada yang seperti itu, karena apa? Sambil berproses untuk menuju 100%, tetapi paling tidak kita 90% dan itu sudah ODF. ^[SEP] Jadi kita arahkan orang orang itu mungkin dengan sarana atau dengan kemarin kan cuma hanya dengan ini aja motivasi gitu aja kan sekarang Selain motivasi juga diberi sarana juga. ^[SEP]	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
325	Rekap Wawancara Dinsos	lalu untuk koordinasinya bagaimana ya pak? ^[SEP] Pak Nugroho :pasti ada rapat, kepala dinas yang merencanakan ^[SEP] Nisa :lalu apakah ada aktor diluar dari dinas sosial ya pak? Misalnya dari swasta atau yang lainnya. ^[SEP]	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
326	Rekap Wawancara Disperindag	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
327	Rekap Wawancara Disperindag	bentuknya stabilisasi harga tadi seperti operasi pasar untuk menstabilkan harga	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
328	Rekap Wawancara Disperindag	kita rapat mbak, rapat staff itu dilaksanakan setiap minimal 1 minggu sekali ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
329	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : apakah ada penyerapan tenaga kerja juga ya pak? ^{[P]_{SEP}} Pak Hermawan : ada ^{[P]_{SEP}} Nisa : lalu bagaimana ya pak untuk koordinasinya? ^{[P]_{SEP}} Pak Hermawan : langsung dengan warga, tetapi untuk pembagian butuh data dari pemerintah desa ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
330	REKAP DESA WATESUMPAK	Pertama pasti adanya kordinasi dengan perangkat desa, BPD dan disitu ada perang data terkait siapa saja yang mendapatkan BLT atau bantuan lainnya melalui MUSDES. Intinya didalam musyawarah desa ini banyak perang data antara stakeholder yang mengusulkan siapa saja yang memperoleh bantuan. ^{[P]_{SEP}}	Kelembagaan dan Regulasi Respon	2
331	REKAP DINAS KESEHATAN	PU itu masalah apa ya? Teknik bangunnya gimana?	Kelembagaan dan Regulasi Respon Sarana Prasarana	3
332	DISNAKER	Pelatihan itu dibuka terus setiap waktu atau ada di ada waktunya pak.	Keterbatasan Program Pelatihan Masalah	2
333	DISNAKER	Jadi kita pangkas waktu.Dan ini yang kita sering dapat komplain dari LSP harusnya jalankan pelatihan 30 hari sesuai dengan standar. Pemberian kompetensi ini yang kita dapat sering dapat dikurangi karena itu.	Keterbatasan Program Pelatihan Masalah Pelatihan Kerja Respon	4
334	Rekap Wawancara Japanan	Kalau dibilang cukup, dengan kondisi pupuk mahal membuat para petani risau. Kakau tidak bertani bagaimana mendapatkan pendapatan.	Ketimpangan Pendapatan Masalah Modal Terbatas Produktivitas Masy Rendah	4
335	REKAP DINAS KESEHATAN	tapi dia kategorinya itu harusnya memang dia enggak punya dia, misalnya tukang becak. Tapi karena anaknya bisa jadi itu rumahnya dibangun karena anaknya itu seperti itu. Padahal aslinya nggak ada apa apa ya rumah tok yang ^{[P]_{SEP}} E : oh iyaa pendapatannya masih dibawah rata-rata gitu nggih Bu ^{[P]_{SEP}} Bis : nah iya Itu kan juga termasuk untuk mendukung. Itu kan orang Miskin. ^{[P]_{SEP}}	Ketimpangan Pendapatan Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Produktivitas Masy Rendah	4
336	Rekap Wawancara Beratkulon	Kalau di desa kami kan keduanya suami istri bekerja ya mbak, jadi pendapatannya bisa 8orb perhari. Dan untuk kebutuhan pasti tidak cukup ^{[P]_{SEP}}	Ketimpangan Pendapatan Masalah Produktivitas Masy Rendah	3
337	Rekap Wawancara Kedungsari	tergantung dengan keadaan keluarganya, kalau menengah ya cukup, tetapi jika dikategorikan sebagai penduduk miskin ya pasti kurang ^{[P]_{SEP}}	Ketimpangan Pendapatan Masalah Produktivitas Masy Rendah	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
338	REKAP DESA TEMON	Kalau kondisi penduduk miskin di Desa masih tergolong menengah kebawah dan lumayan banyak. ^{[P]_{SEP}} N : Berapa persen kira-kira dari total jumlah penduduknya? ^{[P]_{SEP}} Y : Hampir 70% kalau menengah kebawah	Kondisi Kemiskinan	1
339	Rekap Wawancara Desa Trowulan	d : kalau dari Desa Trowulan sendiri kondisi penduduk yang kurang mampu kira-kira Bagaimana Bu gambarannya sudah berkurang atau tergolong masih banyak? ^{[P]_{SEP}} e : Trowulan itu masih banyak. ^{[P]_{SEP}} s : kalau kita lihat dari indikator-indikator itu nggak masuk, semua desa seperti itu nggak ada yang berkurang sebetulnya jarang, karena apa, dia punya keluarga pecah tetap ada lagi ada lagi, kemudian ada sifat cemburu sosial	Kondisi Kemiskinan Kultur Masalah	3
340	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa :Untuk keadaan penduduk miskin di wilayah bapak sendiri bagaimana ya pak setiap tahunnya? ^{[P]_{SEP}} Pak Saroni : sebetulnya berkurang, tetapi masih banyak yang meminta bantuan. ^{[P]_{SEP}}	Kondisi Kemiskinan Masalah	2
341	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk keadaan penduduk miskin di wilayah bapak sendiri bagaimana ya pak setiap tahunnya? ^{[P]_{SEP}} Pak Mulyadi : Tentunya berkurang setiap tahunnya, tapi setelah covid banyak yang di PHK. ^{[P]_{SEP}}	Kondisi Kemiskinan Masalah Pandemi Covid-19 Penyebab	4
342	REKAP DESA TEMON	N : Kalau sekarang mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai apa pak? ^{[P]_{SEP}} Y : Ya petani, ada yang punya sawah trus disewakan. ^{[P]_{SEP}} N : Tapi kalau dilihat sekarang apakah masyarakat desa sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya? ^{[P]_{SEP}} Y : Ya itu, masih tergolong kurang dari cukup. Banyak yang mengikuti tabungan bank MEKAR (PNM). ^{[P]_{SEP}}	Kondisi Kemiskinan Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Produktivitas Masy Rendah	4
343	REKAP DESA TEMON	Dinda (D) : Berarti kalau ditinjau dari tahun kemarin tingkat perekonomian masyarakat Desa Temon menurun ya pak? ^{[P]_{SEP}} Y : Iya menurun. ^{[P]_{SEP}}	Kondisi Kemiskinan Masalah Produktivitas Masy Rendah	3
344	REKAP DESA WATESUMPAK	D : Tapi kalau masyarakat desa sendiri dalam pemenuhan kebutuhan primernya apa sudah tergolong cukup atau kurang? ^{[P]_{SEP}} H : Ya masih kurang terlalu memenuhi kriteria tersebut. ^{[P]_{SEP}}	Kondisi Kemiskinan Masalah Produktivitas Masy Rendah	3
345	DISNAKER	Apakah program tersebut memiliki kriteria tersendiri untuk mencari penerimanya? ^{[L]_{SEP}} A : Tidak ada sebenarnya, ada beberapa desa desa yang ditentukan, yang menentukan di situ ya yang paling dekat dengan lokasi kita yang yang lebih mudah untuk itu. ^{[L]_{SEP}}	Kriteria Penerima	1
346	REKAP BPS	jadi yang menentukan itu dari BPS RI yang sudah ada penimbangannya dan tidak ngasal. Dan ada klasifikasi perkotaan dan pedesaan jadi tetap ada penimbangannya berdasarkan strata yang ada di BPS RI sana. ^{[P]_{SEP}}	Kriteria Penerima	1
347	REKAP BPS	Cuma kita dapat menganggap saja dari skor atau SNI pemerintah pusat bahwa keluarga itu tergolong miskin. ^{[P]_{SEP}}	Kriteria Penerima	1
348	REKAP BPS	SUSNAS ada perhitungan pbb daerah dan	Kriteria Penerima	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		semuanya,		
349	REKAP DINAS KESEHATAN	oh iyaa pendapatannya masih dibawah rata-rata gitu nggih Bu ^[SEP] Bis : nah iya Itu kan juga termasuk untuk mendukung. Itu kan orang Miskin. ^[SEP]	Kriteria Penerima	1
350	Rekap Wawancara Dinsos	Nisa :untuk lama bantuannya ini akan diberikan sampai berapa tahun ya pak? ^[SEP] Pak Nugroho :jika yang bersangkutan sudah lepas dari kemiskinan akan selesai bantuannya, namanya graduasi. ^[SEP]	Kriteria Penerima	1
351	Rekap Wawancara Disperindag	dimana penerima bantuan sudah tercatat di SINAS dimana kita bisa mengkriteriakan misalnya omzetnya berapa, NIP dan ada surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu. ^[SEP]	Kriteria Penerima	1
352	Rekap Wawancara Japanan	Ada kriteria masing masing, contoh keluarga harapan butuh lansia dan anak balitan dan tidak semua sama. Tapi ada beberapa yang menerima 2 bantuan misal BPNT dan KIS. KIS kan program kesehatan. ^[SEP]	Kriteria Penerima	1
353	Rekap Wawancara Mojojajar	misal pkh itu untuk yang memiliki anak usia sekolah, ibu hamil dan lansia. ^[SEP]	Kriteria Penerima	1
354	REKAP DINAS KESEHATAN	Kalau di kami itu tanpa melihat status mbak ^[SEP]	Kriteria Penerima Respon	2
355	REKAP DINAS KESEHATAN	Ada yang mungkin agak napa niki mungkin dia agak punya tapi dari anaknya nah itu bisa ^[SEP] meskipun Enggak masuk DTKS, tapi dia kategorinya itu harusnya memang dia enggak punya dia, misalnya tukang becak. Tapi karena anaknya bisa jadi itu rumahnya dibangun karena anaknya itu seperti itu. Padahal aslinya enggak ada apa apa ya rumah tok yang ^[SEP]	Kriteria Rancu Kultur Masalah	3
356	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	Okelah salah satu keluarganya ada yang PPU atau bekerja di perusahaan namun yang ditanggung itu banyak	Kriteria Rancu Kultur Masalah	3
357	Rekap Bapedda	Kemarin temen-temen tnp2k sudah ke lapangan rumahnya seperti apa. Ternyata setelah di cek dilapangan itu kok enggak sesuai. Rumahnya bangunannya bagus kemudian pekerjaan nya ada yang PNS dan TNI tapo kok ttp dapet. Tapi di DTKS itu di saring lagi. ^[SEP]	Kriteria Rancu Kultur Masalah Sarana Prasarana	4
358	Rekap Bapedda	kalau pake data PK3E itu ndak berani. Kalau yang valid ada di data DTKS dinsos berani memberi, karna kalau memaksakan data PK3E itu untuk masuk ke DTKS nanti yang tidak seharusnya menerima bisa menerima. ^[SEP] E : o nggih nggih Pak ^[SEP] A : Soalnya kemarin dilapangan itu tnp2k waktu kita datang juga kaget, tapi temen temen dinsos juga sudah disikapi dengan data sanding dtks itu.	Kriteria Rancu Masalah	2
359	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	secara administrasi dia ditolak secara real di lapangan dia butuh	Kriteria Rancu Masalah	2
360	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	versi saya pribadi saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena kita harus melihat incomenya, kita melihat pengeluarannya, jumlah keluarga,	Kriteria Rancu Masalah	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		dan lain-lain jadi banyak pertimbangan,		
361	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kalau kita mengikuti item yang ada di Kemensos 2013 saya rasa di Wonorejo tidak ada warga miski	Kriteria Rancu Masalah	2
362	Rekap Wawancara Japanan	Kalo untuk dari desa berupa permohonan kalo diluar desa kan banyak bentuknya yang dilakukan sendiri lewat online sendiri-sendiri dan beberapa bantuan tetap ada permohonan ke kantor desa untuk pelaporan SPD. Tetapi ada bantuan yang diluar desa lewat online yang menyebabkan kerancuan data.	Kriteria Rancu Masalah Prosedur	3
363	REKAP DINAS KESEHATAN	Kadang setelah menikah tidak langsung pecah KK atau sudah pecah KK tapi masih 1 rumah. Jadi kemarin waktu kami data harusnya dapat 4 jamban tapi kan masak di satu rumah ada 4 jamban kan nggak mungkin jadi ya kita buat 1 untuk 1 rumah.	Kriteria Rancu Masalah Sarana Prasarana	3
364	Dinas Pendidikan	Ternyata Orang yang enggak mampu itu kan ada persyaratannya, ketika nggak memenuhi syarat ya nggak bisa lanjut. Itu kadang kadang kan ada aja yang padahal masih tergolong mampu tapi mengurus KIP, lah itu kan padahal datanya kan terekam di dinas sosial, sehingga tidak bisa dibohongi, dari situ maka tidak bisa dapat KIP karna tidak memenuhi syarat.	Kultur Masalah	2
365	Dinas Pendidikan	Kalau kendalanya kira kira apa Pak, untuk penjangkaran anak putus sekolah ini Pak ? : Masyarakat yang tidak proaktif, atau justru pola pikir masyarakat yang mengabaikan pendidikan misalnya ?	Kultur Masalah	2
366	Dinas Pendidikan	Ternyata kebanyakan mondok. intinya kalau nggak sekolah ya mondok.	Kultur Masalah	2
367	DISNAKER	kalau enggak mau kerja ini yang bahaya.	Kultur Masalah	2
368	Rekap Bapedda	Ditanya kalau dapat PKH uangnya untuk apa, ternyata ya habis untuk kebutuhan sehari-hari saja.	Kultur Masalah	2
369	Rekap Wawancara Mojopilang	Merasa terbantu. Namun masyarakat masih merasa kurang.	Kultur Masalah	2
370	REKAP DESA TEMON	Sekarang ini kelihatannya memang kondisi rumahnya bagus tapi ya ekonominya kurang. Oleh sebab itu kami selalu memberi tahu penyurvei bahwa jangan terlalu melihat kondisi rumah saja, karena dulu memang dalam kondisi yang berada, namun sekarang banyak yang turun perekonomiannya.	Kultur Masalah	2
371	Rekap Wawancara Desa Trowulan	Iya makanya kadang timbul gejolak dari situ, “ dia kok dapat? dia loh sama seperti aku” begini begitu.. menghadapi orang banyak itu sulit	Kultur Masalah	2
372	Rekap Wawancara Desa Trowulan	di desa diberi keterampilan kadang pelatihan-pelatihan itu ada tapi ya gitu aslinya itu tergantung orangnya kadang dikasih pelatihan Iya Iya Iya ternyata terus Kurang semangat atau kurang apa ya kurang paham	Kultur Masalah	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
373	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	sampeyan lihat-lihat kalau mampu jangan bilang tidak mampu	Kultur Masalah	2
374	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	yang iri tetangganya	Kultur Masalah	2
375	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	aslinya kayak tapi mengaku tidak mampu itu banyak di sini,	Kultur Masalah	2
376	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	makanya kita berupaya untuk mengubah mindset masyarakat kita, karena bantuan itu membunuh karakter masyarakat kita juga, artinya kalau dibiarkan masyarakat itu menggantung pada adanya bantuan, pola pikir untuk memberdayakan dirinya sendiri itu mati, dia menggantung, ujung-ujungnya semisal pemerintah menghilangkan bantuan apa yang terjadi ^[P1]_{SEP}]	Kultur Masalah	2
377	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	S : “nanti belanja nunggu cairnya PKH” ^[P1]_{SEP}] : betul ^[P1]_{SEP}]	Kultur Masalah	2
378	Rekap Bapedda	lyaa karena kadang meskipun mendapat bantuan tapi tidak berpnghasilan kan tetap bantuan itu akan habis untuk makan aja. karna orang yang terdaftar miskin itu biasanya janda dan lansia jadi untuk hidup saja mereka kadang bergantung dengan anaknya saja. ^[P1]_{SEP}]	Kultur Masalah Penyebab	3
379	REKAP DINAS KESEHATAN	ada yang orang orang lama itu dikasih nggak mau “saya lebih suka disungai”, tapi dia tetap dikasih pengertian sama anaknya, bahkan sampai kepala desanya. Kepala desanya kita ajak tapi tetap nggak mau, akhirnya anaknya bilang tetap dikasih aja nanti pelan-pelan kita beri pengertian, Kita beri tahu. Soalnya memang bapak orangnya orang lama jadi memang harus seperti itu dengan kebiasaan mereka seperti itu merasa nyaman kalau dia ada di sungai gitu itu yang harus diubah sedikit demi sedikit.	Kultur Masalah Respon	3
380	REKAP DINAS KESEHATAN	Karena kebanyakan ternyata menurut pandangan saya orang orang yang sudah mempunyai sarana sanitasi itu secara tidak langsung perilakunya akan berubah karena mungkin dia juga merasa sudah ada ^[L1]_{SEP}]	Kultur Masalah Respon Sarana Prasarana	4
381	REKAP DINAS KESEHATAN	meskipun meskipun belum belum ada ya apa itu yang langsung meneliti itu, tapi ternyata dilihat orang orang dengan ada sarana dia mungkin bisa berubah.	Kultur Masalah Respon Sarana Prasarana	4
382	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	karena kita sudah transparansi terkait data, apa saja saya sajikan, perkara orang malu dengan tidak itu resikoanya, atau karena namanya saya catat di sini dia menerima bantuan rasa malu ya sudah silakan keluar, tujuan kita untuk memberikan syok terapi makanya kita lolos semua orang tanya saya kasih tahu	Kultur Respon	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
383	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	untung aja kita hidupnya di kampung, itu yang harus kita patut syukuri, kita hidupnya di kampung kayak bahan pokok itu kita masih setara, kita punya nasi, punya elpiji, datang ke tetangga minta sayur juga bisa, Meskipun kita sulit untuk mencari ekonomi tapi untuk makan sehari-hari Insya Allah bisa. ^{[P]_{SEP}}	Kultur Respon	2
384	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk pkh dan BPNT kendalanya adalah jika sudah ada yang mampu untuk memundurkan diri orang tersebut sulit karena harus dari yang bersangkutan dan ada musyawarah desanya	Masalah	1
385	Rekap Wawancara Beratkulon	Nisa : Apakah setelah mendapatkan bantuan, masyarakat mengalami peningkatan perekonomian? ^{[P]_{SEP}} Pak Mulyadi : Kalau itu belum terlalu, karena biasanya bantuan hanya dapat membantu bertahan. ^{[P]_{SEP}}	Masalah	1
386	Rekap Wawancara Japanan	Untuk warga khususnya saat covid kemarin, bantuan ini dapat menolong mereka untuk bertahan. Untuk meningkatkan ekonomi kita tidak bisa jawab. Tapi untuk ditanya bagaimana jelas terbantu. ^{[P]_{SEP}}	Masalah	1
387	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	padahal kalau bidang tanah sawah tidak ada yang dikelola juga sama betul asetnya ada tapi untuk kebutuhan sehari-harinya sama saja begitu	Masalah Modal Terbatas	2
388	REKAP DESA TEMON	Jadi mereka mencari pekerjaan nguli, tukang bangunan, buruh tani dll.	Masalah Pekerjaan Tidak Tetap	2
389	REKAP DESA WATESUMPAK	D : Dilihat dari pendapatannya kurang itu penyebab utamanya apa dari pekerjaannya atau ada factor lainnya? ^{[P]_{SEP}} H : Lebih ke jenis pekerjaannya sih	Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Penyebab Produktivitas Masy Rendah	4
390	Rekap Wawancara Kedungsari	disini mayoritas petani dan buruh tani. ^{[P]_{SEP}}	Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Produktivitas Masy Rendah	3
391	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: untuk mayoritas dari pekerjaan di desa ini sebagai petani ya? ^{[P]_{SEP}} Pak Haryanto: Iya, Petani, Buruh tani. ^{[P]_{SEP}} Nisa: Dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani itu, apakah pendapatan mereka cukup untuk mencukupi kebutuhan primer seperti sandang dan pangan? ^{[P]_{SEP}}	Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Produktivitas Masy Rendah	3
392	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	S : mayoritas pekerjaan masyarakat di sini itu petani, petani palawija, bercocok tanam, padi, jagung, terus rongsokan, daur ulang	Masalah Pekerjaan Tidak Tetap Produktivitas Masy Rendah	3
393	Dinas Pendidikan	, yang mana tingginya angka pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan	Masalah Penyebab	2
394	Rekap Wawancara Beratkulon	Mungkin BBM juga berdampak ya mbak, karena meningkatkan harga kebutuhan pokok.	Masalah Penyebab	2
395	DISNAKER	kan perusahaan juga enggak mau rugi dong, ambil sembarang orang. Iya kalau bisa kerja bisa kerja, kan kaya beli kucing dalam karung. ^{[L]_{SEP}}	Masalah Produktivitas Masy Rendah	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
396	Rekap Bapedda	Karena kebanyakan memang yang tidak berpenghasilan. ^{[P1]_{SEP}}	Masalah Produktivitas Masy Rendah	2
397	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk pekerjaan mayoritas itu buruh tani. ^{[P1]_{SEP}}	Masalah Produktivitas Masy Rendah	2
398	REKAP DESA TEMON	Masyarakat temon dulu rata2 penncetak batu bara tapi sejak ada perubahan ke bata putih atau bata ringan sehingga mereka kehilangan pekerjaan karena kalah saing. Karena pemasarannya agak lambat sehingga karyawannya dibatasi atau dikurangi yang dulunya mencapai 100 tenaga kerja sekarang mungkin hanya 30an tenaga kerja.	Masalah Produktivitas Masy Rendah	2
399	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	: kalau untuk tingkat pendidikannya paling terakhir ya SMP, yang paling minim. ^{[P1]_{SEP}} D : SD Sudah jarang ya Bu? ^{[P1]_{SEP}} J : Nggak ada Mbak bahkan kita kalau ada yang seperti itu kita ambil kalau mau sekolah. ^{[P1]_{SEP}}	Masalah Respon Tingkat Pendidikan	3
400	REKAP DESA TEMON	Kalau Pendidikan diupayakan ya sampai SMA, paling satu dua saja yang SMP karena dirinya sendiri yang tidak mau melanjutkan, ada juga yang setelah lulus langsung menikah.	Masalah Tingkat Pendidikan	2
401	Rekap Wawancara Desa Pakis	Rata-rata kebanyakan itu tamat SD, SD SMP kalau yang tua-tua. ^{[P1]_{SEP}}	Masalah Tingkat Pendidikan	2
402	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Bagaimana untuk tracking atas pemerataan bantuannya ya pak? ^{[P1]_{SEP}} Pak Lukman : Dari RT ke RT berupa pelaporan, dan kita samaratakan bantuannya ke 6 dusun. ^{[P1]_{SEP}}	monitoring	1
403	Dinas Pendidikan	Setahu saya, itu nanti dana nya ditransfer ke rekening orang tua siswa diperuntukan belanja kebutuhan belajar siswa. Lah jadi sekarang tinggal pengawasan, jangan sampai malah digunakan untuk kebutuhan yang lain.	monitoring Prosedur	2
404	Rekap Wawancara Kedungsari	Nisa : untuk tracking bantuan tersebut bagaimana ya pak? ^{[P1]_{SEP}} Pak Hermawan : kalau untuk program akan diawasi dan dipantau, jika sudah mampu akan diberikan surat untuk mengundurkan diri	monitoring Prosedur	2
405	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : lalu bagaimana cara desa untuk mentracking pemerataan bantuan tadi? ^{[P1]_{SEP}} Bu Siti :kalo untuk BPNT dan PKH itu sudah ada data dari pendamping, kalo untuk BLT DD itu dari musyawarah untuk pengajuannya. ^{[P1]_{SEP}}	monitoring Prosedur	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
406	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Untuk tracking pemerataan bantuannya sendiri di desa ini bagaimana ya, Pak? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Itu dimasukkan data di DTKS saja, mbak. Langsung dari DTKS, lalu hasilnya dikeluarkan DTKS. Desa hanya memasukkan data ke DTKS saja. Yang masuk ke DTKS ada 1669 dari jumlah 3000 masyarakat miskin, 1/3 dari masyarakat miskin dari jumlah penerima PKH, BLT, KIS yang tiap mengambil bantuan ada pendampingan. Desa cuma memasukkan data ini melalui musrembang. ^[P] _[SEP] Nisa: Untuk pengaksesan bantuan itu apakah masyarakat muda yang mengakses bantuan tersebut? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Semua data-data itu (05:44 - 05:50 percakapan tidak terdengar) ... satu bulan sekali ada pendampingan sendiri. KIS juga ada yang bertugas, untuk masing-masing program. ^[P] _[SEP]	monitoring Prosedur	2
407	DISNAKER	onitoring program kita turun beserta didampingi tadi BPK. Monitoring program kita turun beserta didampingi BPK, kita panggil juga itu yang menerima menerima pelatihan, menerima honor. Jadi seperti itu yang dicek oleh BPK. Udah benar enggak kamu menerima duit segini enggak? Itu sudah dilaksanakan di mana ada dokumentasinya apa enggak jalan yang kamu bangun itu paling berapa panjangnya berapa lebarnya sudah sesuai dengan spek yang diharapkan itu aja. ^[P] _[SEP]	monitoring Respon	2
408	Rekap Wawancara Disperindag	Nisa :untuk kegiatan monitoring tersebut biasanya dilakukan dalam berapa hari sekali ya pak/bu? ^[P] _[SEP] Pak Edwin :kalo gak 3 bulan sekali atau persemester kita monitoring? ^[P] _[SEP]	monitoring Respon	2
409	Rekap Wawancara Beratkulon	Nisa : Lalu bagaimana ya pak untuk tracking program tersebut? ^[P] _[SEP] Pak Mulyadi : Lewat pengajuan ya mbak tetap, dan diputuskan dari pemerintah atas dan akan ada informasi dari dinas terkait. ^[P] _[SEP]	monitoring Respon	2
410	REKAP DINAS KESEHATAN	Iya misalnya cuci tangan kayak kemarin kita kan waktu sebelum ada covid kita enggak terbiasa juga. Tapi karena di depan rumah musti ada ketika kita lihat sarananya loh ya saya wajib cuci tangan kan secara tidak langsung mengingatkan. ^[P] _[SEP]	Pandemi Covid-19	1
411	Rekap Wawancara Mojopilang	Kalau karena covid tidak terlalu ya, karena memang usahanya bertani jadi masih bisa beraktivitas. ^[P] _[SEP]	Pandemi Covid-19	1
412	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : Pekerjaan mayoritas di desa bapak sendiri apa ya pak? ^[P] _[SEP] Pak Saroni : Untuk pekerjaan mayoritas itu petani dan buruh tani. ^[P] _[SEP]	Pekerjaan Tidak Tetap	1
413	REKAP DESA WATESUMPAK	Mayoritasnya buruh atau serabutan material, ada pengrajin patung juga. Tapi mayoritas memang petani	Pekerjaan Tidak Tetap	1
414	DISNAKER	Pelatihan pelatihan itu nantinya saat ini kita belum punya aplikasi. ^[P] _[SEP] Tahun ini nanti baru saya bikin aplikasi buat bidang	Pelatihan Kerja Rencana Respon	3

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
		pelatihan. Namanya nanti si petir atau apa enggak tahu nanti.		
415	DISNAKER	Iyaa, jadi nanti masyarakat umum bisa langsung ngecek sendiri, ada pelatihan apa di sini, kapan mau dilaksanakan? Gender apa yang khusus untuk pelatihan ya? Sebetulnya sih bebas kalau kita ngomong gender kita enggak boleh menyekat sekat, kamu misalnya mau pelatihan tata boga, tata rias boleh boleh aja mau MUA (make up artist) ya monggo kita enggak melarang.	Pelatihan Kerja Rencana Respon	3
416	Dinas Pendidikan	Ini akan sedang ada pelatihan, terus teman teman juga sudah bergerak.	Pelatihan Kerja Respon	2
417	DISNAKER	Tapi kalau mau di sinkronisasikan itu kita ada program yang mana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk mau berusaha berupaya meningkatkan kesejahteraannya kita ada namanya program pelatihan kerja dan pra kerja	Pelatihan Kerja Respon	2
418	DISNAKER	Pelatihan ini bagi masyarakat umum dan pencari kerja, idealnya pelatihan kerja ini kan berdasarkan dari musyawarah rembuk bersama.	Pelatihan Kerja Respon	2
419	DISNAKER	Kalau sasaran utama nya desa atau kecamatan mana saja Pak untuk padat karya ? A : Jadi ada 4 TKM (tenaga kerja mandiri) dan padat karya. Lokasinya di Desa Jiu Kecamatan Kutorejo, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas, Desa Randu bango Kecamatan Mojosari, Desa Talok Kecamatan Dlanggu itu untuk TKM. Pelatihannya ada tata boga sama sablon, per desa ada 20 orang yang mendapat pelatihan. untuk padat karya, dilakukan pemavingan jalan di Desa Randu Bango Kecamatan Mojosari.	Pelatihan Kerja Respon	2
420	DISNAKER	Tapi untuk yang bersinggungan dengan program pengentasan kemiskinan ini kita punya program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sama program penempatan tenaga kerja.	Pelatihan Kerja Respon	2
421	Rekap Wawancara Disperindag	pembinaan	Pelatihan Kerja Respon	2
422	Rekap Wawancara Desa Trowulan	di desa diberi keterampilan kadang pelatihan-pelatihan itu ada	Pelatihan Kerja Respon	2
423	Dinas Pendidikan	Masyarakat yang tidak proaktif, atau justru pola pikir masyarakat yang mengabaikan pendidikan misalnya ? kalau kita bicara data, data siswa SD yang melanjutkan SMP itu, ternyata ada beberapa mungkin sampai ratusan, itu kita gali kemana mereka yang tidak melanjutkan ke SMP. Ternyata kebanyakan mondok. intinya kalau nggak sekolah ya mondok. Kalau terkait pola pikir yang lama itu saya rasa sudah hampir tidak ada. Justru kebanyakan orang tua atau anak sekarang kalau tidak sekolah itu malah malu.	Penyebab Tingkat Pendidikan	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
424	Rekap Wawancara Beratkulon	Kalau bisa desa ini digali potensinya ^{[P]_{SEP}}	Produktivitas Masy Rendah Respon	2
425	REKAP DINAS KESEHATAN	ada kegiatan PAJAKA patroli jaga kali gitu. Kalau misalnya ada orang orang yang terbiasa BABS, Kemudian ada yang biasa di pojok pojok buat gubuk-gubuk seperti itu langsung diobrak kerja sama bersama Satpol PP yang ada di situ sama pak camat sama puskesmas untuk langsung datang ke situ bongkarin. ^{[P]_{SEP}}	Program Kesehatan Prosedur Respon	3
426	REKAP DINAS KESEHATAN	lalu bu untuk program ODF Itu kecamatan mana yang jadi sasaran utama gitu? ^{[P]_{SEP}} Bu Ismi (Bis) : Oh kalau itu jatirejo paling tinggi mbak, jadi kemarin Ada pembangunan jamban yang 5000 lebih itu tapi pembangunannya enggak kita pembangunannya itu di dprkp2 kita hanya memberikan jumlahnya aja dan yang harus dibangun orang mana saja. Dan program itu katanya di khususkan untuk orang miskin. Jumlahnya 5908 itu terbangun setelah Desember 2022. Dan terbanyak ada di jatirejo ^{[P]_{SEP}}	Program Kesehatan Respon Sarana Prasarana	3
427	Dinas Pendidikan	Orang tuanya itu mengurus surat dari desa ke Dinas Sosial. ^{[P]_{SEP}} Jadi kita itu menerima data terkait KIP Tolong ini ada berapa anak itu hasilnya. Tapi prosesnya orang tua itu yang mendaftar, artinya kita dikasih informasi bahwa sekolah ini akan dapat KIP berapa orang, namanya siapa aja gitu	Prosedur	1
428	DISNAKER	Bagaimanakah alur penerimaan bantuan sosial kepada penerimanya? ^{[P]_{SEP}} A : Hanya mencari pendataan masyarakat yang mau dilatih aja. Terus yang mana lokasi jalan yang mau diperbaiki? Jadi dari pendataan kemudian dilakukan penilaian evaluasi, survei, eksekusi. Iya seperti itu, jadi enggak ada yang khusus. ^{[P]_{SEP}}	Prosedur	1
429	Rekap Wawancara Dinsos	Biasanya, anggaran masuk ke BPKAD lalu di transfer. Ini berdasarkan tahun lalu pada prinsipnya kami harus menyiapkan data penerima dan diusulkan ke Bupati dan menyerap uang di PKAD melalui bank jatim. Nantinya akan dibuatkan SK Bupati oleh badan hukum sebagai penerima dan mengajukan ke badan keuangan BPKAD dan melakukan kerja sama dengan bank pasar sebagai penyalur. Dan dinas sosial tidak memegang uangnya sama sekali. Ke administrasi prosedurnya harus sesuai dengan kebutuhan. Sebagai leading sector secara administrasi dan melibatkan bagian umum	Prosedur	1
430	Rekap Wawancara Disperindag	dapat di lakukan lewat sinas dan ada juga proposal yang masuk secara offline tapi itu juga melalui kepala desa ^{[P]_{SEP}}	Prosedur	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
431	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Disini saya juga menemukan bantuan sembako, untuk bantuan tersebut apakah masih berjalan ya pak walau covid telah usai? ^[P] ^[SEP] Pak Lukman : Masih, karena bantuan tersebut sebelum covidnya sudah ada dan sekarang bantuannya non tunai dan dapat digunakan di toko-toko yang telah ditunjuk. ^[P] ^[SEP] Nisa : Berarti ada persyaratan untuk penggunaan bantuannya ya pak? ^[P] ^[SEP] Pak Lukman : Iya harus di toko khusus untuk makanan pokok. ^[P] ^[SEP]	Prosedur	1
432	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Untuk warga mengetahui program tersebut apakah ada penyalurannya ya pak? ^[P] ^[SEP] Pak Lukman : Ada karena mereka ada aturannya untuk mengikuti bantuan tersebut, dalam pengambilan harus yang bersangkutan yang mengambil. Nanti saat bantuan cair akan di beritahu ke operator masing-masing. ^[P] ^[SEP]	Prosedur	1
433	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	ada masyarakat yang ingin sama-sama membantu pembangunan di desa Wonorejo, jenengan kalau ada masyarakat yang “ ibu saya ada kenalan Pak dewan Saya mau dikasih bantuan kayak bantuan mushola” kan banyak Mbak disini yang dicover sama salah satu dewan, saya tinggal tanda tangan	Prosedur Respon Sarana Prasarana	3
434	Dinas Pendidikan	Ini kalau terkait KIP nanti saya anter sama yang nanganinya aja ya.	Rekomendasi Informan	1
435	DISNAKER	kalau kita ngomong UMKM pasti dinas koperasi lebih lebih selangkah lebih maju daripada kita	Rekomendasi Informan	1
436	DISNAKER	Dinas Pendidikan	Rekomendasi Informan	1
437	Dinas Pendidikan	Terus ini masih rencana di tahun 2024. Akan ada beasiswa siswa miskin biasanya itu yang prestasi.	Rencana Respon	2
438	Dinas Pendidikan	apa program itu bisa dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan? ^[P] ^[SEP] ^[P] ^[SEP] D : Tentu bisa, itu juga merupakan salah satu cara menekan tingginya angka pengangguran nantinya, yang mana tingginya angka pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan	Respon	1
439	Dinas Pendidikan	Karna kebanyakan itu usia lanjut, jadi akan diarahkan kependidikan non formal, ada paket b ada paket c itu arahnya ke sana.	Respon	1
440	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	kita berupaya untuk mengubah mindset masyarakat kita,	Respon	1
441	Dinas Pendidikan	Dari sarana prasarana yang kita bangun kegiatan belajar mengajar jauh lebih baik sehingga siswa lebih semangat belajar dan menghasilkan nilai yang baik juga. Ada juga kemarin itu seragam gratis dari dinas, itu juga membantu sehingga siswa tidak perlu lagi membeli seragam sekolah. ^[P] ^[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
442	Dinas Pendidikan	Nah prasarana prasarana. Seragam ini sudah 2 tahun terakhir ini, sebelumnya enggak ada. Jadi untuk yang kurang mampu kan otomatis terbantu dengan seragam gratis ini. ^[P] ^[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
443	Rekap Bapedda	BPN ini terkait perluasan lahan untuk RTLH	Respon Sarana Prasarana	2
444	REKAP DINAS KESEHATAN	jadi kita arahkan orang-orang itu mungkin dengan sarana atau dengan kemarin kan cuma hanya dengan ini aja motivasi gitu aja kan sekarang Selain motivasi juga diberi sarana juga.	Respon Sarana Prasarana	2
445	Rekap Wawancara Disperindag	program peningkatan sarana distribusi perdagangan.	Respon Sarana Prasarana	2
446	Rekap Wawancara Disperindag	bantuan kayak alat-alat IKM, di program perencanaan industri.	Respon Sarana Prasarana	2
447	Rekap Wawancara Beratkulon	Tahun 2022 ada bantuan dari dinkes berupa jamban dari PUPR, ada juga dari kabupaten ada jalan usaha tani.	Respon Sarana Prasarana	2
448	Rekap Wawancara Japanan	Untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah apakah ada ya pak? ^[P] _[SEP] Pak Lukman : Ada tapi dari dinas pendidikan langsung atau dari pemerintah ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
449	Rekap Wawancara Japanan	rehabilitasi sarana kesehatan ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
450	Rekap Wawancara Japanan	bantuan untuk rehabilitasi rumah? ^[P] _[SEP] Pak Lukman : Ada tapi terakhir tahun 2020, itu desa yang mengadakan dari dana pemerintah bantuannya berbentuk dana dengan tetap ada pelaporan untuk setiap penggunaan dana, selain dari pemerintah desa ada juga dari koramil tetapi hanya kadang-kadang saja ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
451	Rekap Wawancara Japanan	Ada program MCK ada 46 unit dengan anggaran 3,1 jt perunit berupa uang yang dapat dibelanjakan ke toko tertentu dan desa hanya mendaftarkan saja ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
452	Rekap Wawancara Kedungsari	dari dana desa ada yang kami sisihkan untuk pendidikan, untuk pembangunan gedung khusus untuk yang milik desa	Respon Sarana Prasarana	2
453	Rekap Wawancara Kedungsari	Lalu ada program jamban stimulan juga dari desa berupa supply dana untuk kebutuhan pembuatan jamban	Respon Sarana Prasarana	2
454	Rekap Wawancara Kedungsari	pembangunan jalan rabat beton dan drainase lingkungan karena ada 40% belum tersentuh ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
455	Rekap Wawancara Mojojajar	disini ada bantuan untuk post paud yaitu pemberian honor guru dan seragam. Dan pembanguann gedung ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
456	Rekap Wawancara Mojojajar	Nisa : lalu apakah ada bantuan untuk rehabilitasi RTLH ya pak? ^[P] _[SEP] Pak Saroni : ada bentuknya material dan uang untuk tukang dari PUPR sekitar 2,5 jt ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2
457	Rekap Wawancara Mojopilang	Nisa: Apakah ada program bantuan rehabilitasi untuk rumah yang tidak layak huni, Pak? ^[P] _[SEP] Pak Haryanto: Ada. Dari provinsi BSK	Respon Sarana Prasarana	2
458	REKAP DESA TEMON	N : Kalau Bantuan RTLH itu? ^[P] _[SEP] Y : Ada dan sudah terealisasi ^[P] _[SEP] N : Kalau bantuan terkait pembangunan jalan, rehabilitasi drainase dll dari pemerintah apakah ada? ^[P] _[SEP] Y : Ada dari PU terkait jalan tani ^[P] _[SEP]	Respon Sarana Prasarana	2

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
459	REKAP DESA WATESUMPAK	Program dari pemerintah terkait rehabilitasi drainase atau pembangunan jalan apa ada di Desa ini? H : Ada, kemarin itu dapat BK (Bantuan Keuangan desa) berupa pembangunan jalan aspal tahun 2022 dan sudah terealisasi. Anggaran 2022 dan terealisasi di tahun 2023.	Respon Sarana Prasarana	2
460	Rekap Wawancara Desa Pakis	N : Kalau bantuan itu mas, rumah tidak layak huni R : oh itu kemari nanda sih yang, disini ada beberapa rumah yang direnov, kayak ada 2 rumah gitu jadi jadi total semuanya udah direnov.	Respon Sarana Prasarana	2
461	Rekap Wawancara Desa Pakis	D : Kalau dari PU nya sendiri buat rehabilitasi jalan atau drainase itu? R : biasanya kita harus membuat proposal langsung diusulkan ke kecamatan, terus ke kabupaten jadi kalau nanti bu camat udah clear baru ditransfer. D : tapi ada? R : ada terus.	Respon Sarana Prasarana	2
462	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	S : RTLH J : dilihat dari sumbernya dulu kalau dari PUPR, kalau dari dinsos provinsi juga ada, dari Kementerian juga ada. S : kalau dari PU kemarin mendapat 41 D : berarti sudah terealisasi ya Bu? S : sudah.	Respon Sarana Prasarana	2
463	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	pembangunan jalan di desa itu ada sumbernya dua satu dari kabupaten yang nomor 2 dari provinsi. D : realisasinya tahun berapa Bu? S : ini di sebelah. D : Oh baru? S : bu iya baru kemarin Tahun 2022 sampai sekarang masih dibangun	Respon Sarana Prasarana	2
464	Rekap Wawancara Desa Wonorejo	akhirnya saya bikinkan bantuan benih dari Dana Desa saya belikan benih padi saya serahkan ke masyarakat dan petani-petani rumah kan ada data petani dipoktan masing-masing	Respon Sarana Prasarana	2
465	Rekap Wawancara Beratkulon	Untuk mayoritas pendidikannya sampai SMA diusahakan SMA	Tingkat Pendidikan	1
466	Rekap Wawancara Japanan	Nisa : Untuk mayoritas pendidikan di desa ini sendiri apa ya pak. Pak Lukman : SI dan SMA.	Tingkat Pendidikan	1
467	Rekap Wawancara Kedungsari	mayoritas SMA	Tingkat Pendidikan	1
468	Rekap Wawancara Mojojajar	disini mayoritas s1 dan Sma tetapi bervariasi	Tingkat Pendidikan	1
469	Rekap Wawancara Mojopilang	SD sampai SMA. Untuk sarjana masih sedikit.	Tingkat Pendidikan	1
470	REKAP DESA WATESUMPAK	D : Kalau tingkat pendidikannya bagaimana pak? H : Kalau tingkat pendidikannya sendiri alhamdulillah sudah membaik ya, paling tidak minimal sudah tingkat SMA, tapi kalau orang tua-orang tua ya ada yang SD atau SD belum lulus. Tapi kalau remajanya sudah paling minim tingkat SMA, yang pasti sudah membaik kalau tingkat pendidikannya.	Tingkat Pendidikan	1
471	Rekap Bapedda	Kalau di kita ada program sinergitas, jd sinergitas itu termasuk operasional semuanya masuk.	Kelembagaan dan Regulasi	1

No	Document	Quotation Content	Codes	Density
472	REKAP BPS	Survei SUSNAS untuk mengukur konsumsi rumah tangga dilaksanakan setahun 2 kali (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL-BULAN MARET estimasi sampai level kabupaten & SEPTEMBER estimasi sampel sampai level provinsi)	Kelembagaan dan Regulasi	1



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

